

SOSIOLOGI PENDIDIKAN

SOSIOLOGI PENDIDIKAN

Dr. Eka Susanti, M.Pd.
Yummy Jumiati Marsa, M.Pd.
Henni Endayani, M.Pd.

Editor:
Eka Yusnaldi, M.Pd.



Kelompok Penerbit Perdana Mulya Sarana

SOSIOLOGI PENDIDIKAN

Penulis: Dr. Eka Susanti, M.Pd., dkk

Editor: Eka Yusnaldi, M.Pd.

Copyright © 2022, pada penulis
Hak cipta dilindungi undang-undang
All rights reserved

Penata letak: Muhammad Yunus Nasution
Perancang sampul: Aulia@rt

Diterbitkan oleh:

PERDANA PUBLISHING

Kelompok Penerbit Perdana Mulya Sarana
(ANGGOTA IKAPI No. 022/SUT/11)

Jl. Sosro No. 16-A Medan 20224

Telp. 061-77151020, 7347756 Faks. 061-7347756

E-mail: perdanapublishing@gmail.com

Contact person: 08126516306

Cetakan pertama: Februari 2022

ISBN 978-623-411-025-8

Dilarang memperbanyak, menyalin, merekam sebagian atau seluruh bagian buku ini dalam bahasa atau bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit atau penulis

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah Swt atas rahmat-nya atas izin-nya sehingga penyusunan Buku “Sosiologi Pendidikan” ini dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai waktu yang ditargetkan. Sehingga hal ini merupakan upaya untuk memaksimalkan fungsi khalifah di alam semesta.

Penyusunan buku ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi pembaca terkhusus kalangan mahasiswa perguruan tinggi, dikarenakan mata kuliah Sosiologi Pendidikan merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan, sebagaimana diketahui literature atau buku pegangan mahasiswa pada mata kuliah ini masih tergolong sedikit.

Buku ini membahas tentang pengertian sosiologi Pendidikan, latar belakang sosiologi, tujuan, objek sosiologi, interaksi sosial, ruang kelas sebagai interaksi sosial, ruang kelas sebagai sistem pertukaraan, teori ruang kelas, pengertian sosialisasi, jenis sosialisasi, agen sosialisasi teori structural fungsional, teori konflik teori interaksionalisme simbolik, mengajar sebagai pekerjaan dan mengajar sebagai profesi, peranan guru hubungan guru murid, sertifikasi guru, Profesionalisme guru dan globalisasi. Pengertian Nilai dan Norma Sosial Perbedaan Nilai dan Norma Sosial, Norma dan Nilai dalam Pendidikan. Pengertian Struktur Sosial Status dan Peran Sosial di Sekolah, Fungsi sekolah ialah memilih dan mengajarkan peranan sosial Hakikat Masyarakat, Pendidikan Hubungan antara Masyarakat dengan Pendidikan Konsep Kebudayaan, Hubungan antara Pendidikan dan Kebudayaan, Kebudayaan Sekolah, Konsep Stratifikasi Sosial, Stratifikasi Sosial dan Pendidikan, Pengertian Mobilitas Sosial, Jenis-Jenis Mobilitas Sosial dalam Pendidikan, Pengertian Perubahan Sosial, Proses Terjadinya Perubahan Sosial, Bentuk-Bentuk Perubahan Sosial dalam Pendidikan,

Bentuk-bentuk Perubahan Sosial Faktor, Penghambat Terjadinya Mobilitas Sosial dalam Pendidikan, Pendidikan sebagai Kapital Manusia, Pendidikan sebagai Kapital Sosial, Pendidikan sebagai Kapital Budaya, Pendidikan sebagai Kapital Simbolik, Pengertian Pendidikan Multikultural, Tujuan Pendidikan Multikultural, Prinsip Dasar Pengembangan Model Pembelajaran Multikultural, Asumsi Pendidikan Multikultural, Pentingnya Pendidikan Multikultural,

Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada semua pihak yang turut membantu dan mendukung hingga buku ini rampung dan layak diterbitkan.

Selanjutnya disadari bahwa buku ini ,tidak luput dari kekurangan dan ketidaksempurnaan,Untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat diperlukan agar buku ini lebih tersempurnakan.

Akhirnya,semoga buku ini bermanfaat untuk semua, dan sebagai amal jariyah penulis dalam memanfaatkan diri bagi sesama

Medan, Februari 2022

Penulis

PENGANTAR EDITOR

Segala puji dan syukur senantiasa terucap dan terbuat dalam perilaku kehadiran Allah Swt atas segala limpahan rahmat, nikmat, dan karunia-Nya, sehingga buku ini dapat terselesaikan dengan baik pada waktu yang ditentukan. Salawat dan salam tercurahkan kepada kekasih Allah, junjungan alam, Nabi Muhammad Saw sebagai sosok suri tauladan dalam segala aspek kehidupan, baik aspek hubungan kepada Allah (*hablumminallah*) dan aspek hubungan terhadap manusia (*hablumminannas*), aspek hubungan terhadap alam semesta (*hablumminal 'alam*). Sehingga akhirnya memberikan jalan keselamatan kepada seluruh manusia untuk menjadi ummat terbaik.

Dalam berkehidupan manusia tidak akan pernah terlepas dari interaksi sosial, begitupun interaksi sosial yang terjadi di kehidupan manusia/masyarakat banyak yang dipengaruhi oleh pendidikan. Contohnya pilihan seseorang terhadap suatu pekerjaan dipengaruhi salah satunya oleh pendidikannya. Demikian pula dengan pola konsumsi dan pola pengasuhan anak dipengaruhi oleh pendidikan pula, maka oleh karena itu sejatinya sosiologi pendidikan sangat penting untuk dipelajari dalam hal memecahkan masalah-masalah pendidikan dengan analisis atau pendekatan sosiologis.

Sosiologi mempertumbuhkan semua lingkungan dan kebiasaan manusia, sepanjang kenyataan yang ada dalam kehidupan manusia dan dapat memengaruhi pengalaman yang dirasakan manusia, serta proses dalam kelompoknya. Selama kelompok itu ada, maka selama itu pula akan terlihat bentuk-bentuk, cara-cara, standar, mekanisme, masalah, dan perkembangan sifat kelompok tersebut. Semua faktor tersebut dapat memengaruhi hubungan antara manusia dan berpengaruh terhadap analisis sosiologi.

Selanjutnya disadari bahwa buku ini , tidak luput dari kekurangan dan ketidaksempurnaan, Untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat diperlukan agar buku ini lebih tersempurnakan.

Medan, Februari 2022

Editor

Eka Yusnaldi, M.Pd.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	5
Pengantar Edior	7
Daftar Isi	9

BAB I

KONSEP DASAR SOSIOLOGI PENDIDIKAN	13
A. Pengertian Sosiologi	13
B. Pengertian Pendidikan	15
C. Pengertian Sosiologi Pendidikan	16
D. Latar Belakang Sosiologi Pendidikan	17
E. Tujuan Sosiologi Pendidikan	19
F. Objek Sosiologi Pendidikan	21
G. Ruang Lingkup Sosiologi Pendidikan	21

BAB II

PROSES DAN DINAMIKA SOSIAL DALAM PENDIDIKAN	24
A. Interaksi Sosial sebagai Dasar Proses Sosial	24
B. Ruang Kelas sebagai Sistem Sosial	29
C. Ruang Kelas sebagai Sistem Interaksi	31
D. Ruang Kelas sebagai Sistem Pertukaran	32
E. Teori Ruang Kelas	33

BAB III

SOSIALISASI 38

A. Pengertian Sosialisasi 38

B. Jenis Sosialisasi 39

C. Agen Sosialisasi 40

BAB IV

**TEORI STRUKTURAL FUNGSIONAL, TEORI KONFLIK
DAN TEORI INTERAKSIONALISME SIMBOLIK** 47

A. Teori Struktural Fungsional 47

B. Teori Konflik 50

C. Teori Interaksionalisme Simbolik 54

BAB V

GURU DAN TUGAS MENGAJAR 58

A. Mengajar sebagai Pekerjaan 58

B. Mengajar sebagai Profesi 59

C. Peranan Guru 65

D. Hubungan Guru-Murid 68

E. Sertifikasi Guru 70

F. Profesionalisme Guru dan Globalisasi 74

BAB VI

NILAI DAN NORMA DALAM PENDIDIKAN 77

A. Pengertian Nilai dan Norma Sosial 77

B. Perbedaan Nilai dan Norma Sosial 81

C. Norma dan Nilai dalam Pendidikan 84

BAB VII

PENDIDIKAN DAN STRUKTUR SOSIAL 87

A. Pengertian Struktur Sosial 87

B. Status dan Peran Sosial di Sekolah 88

C. Fungsi Sekolah ialah Memilih dan Mengajarkan Peranan Sosial	91
--	----

BAB VIII

PENDIDIKAN DAN MASYARAKAT	93
A. Hakikat Masyarakat Pendidikan	93
B. Hubungan antara Masyarakat dengan Pendidikan	94

BAB IX

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	99
A. Konsep Kebudayaan	99
B. Hubungan antara Pendidikan dan Kebudayaan	108
C. Kebudayaan Sekolah	109

BAB X

PENDIDIKAN DAN STRATIFIKASI SOSIAL	111
A. Konsep Stratifikasi Sosial	111
B. Stratifikasi Sosial dan Pendidikan	115

BAB XI

PENDIDIKAN DAN MOBILITAS SOSIAL	116
A. Pengertian Mobilitas Sosial	116
B. Jenis-Jenis Mobilitas Sosial dalam Pendidikan	119
C. Faktor Penghambat Terjadinya Mobilitas Sosial dalam Pendidikan	120

BAB XII

PENDIDIKAN DAN PERUBAHAN SOSIAL	122
A. Pengertian Perubahan Sosial	122
B. Bentuk-bentuk Perubahan Sosial	126
C. Proses Terjadinya Perubahan Sosial	128
D. Bentuk-Bentuk Perubahan Sosial dalam Pendidikan	134
E. Eksistensi Pendidikan	138

BAB XIII

PENDIDIKAN SEBAGAI KAPITAL 140

A. Pendidikan sebagai Kapital Manusia 140

B. Pendidikan sebagai Kapital Sosial 143

C. Pendidikan sebagai Kapital Budaya 146

D. Pendidikan sebagai Kapital Simbolik 147

BAB XIX

PENDIDIKAN MULTIKULTURAL 149

A. Pendidikan Multikultural 149

B. Pengertian Pendidikan Multikultural 150

C. Tujuan Pendidikan Multikultural 152

D. Prinsip Dasar Pengembangan Model Pembelajaran
Multikultural 153

E. Peran Guru dalam Pendidikan Multikultural 155

F. Pentingnya Pendidikan Multikultural 160

G. Asumsi Pendidikan Multikultural 166

DAFTAR PUSTAKA 168

BABI

KONSEP DASAR SOSIOLOGI PENDIDIKAN

A. PENGERTIAN SOSIOLOGI

Sosiologi berasal dari kata *sociou dan logos*. *Socius* berarti teman atau kawan, sedangkan *logos* berarti pengetahuan. Dalam bahasa Latin, sosiologi diartikan sebagai pengetahuan tentang pertemanan. Pengertian pertemanan diperluas menjadi hidup bersama atau masyarakat. Dengan demikian, dapat diartikan sosiologi sebagai pengetahuan tentang hidup bermasyarakat.¹

Sosiologi mencari tahu tentang hakikat dan sebab-sebab dari berbagai pola pikiran dan tindakan manusia yang teratur dan dapat berulang. Berbeda dengan psikologi yang memusatkan perhatiannya kepada karakteristik pikiran dan tindakan orang perorang, sosiologi hanya tertarik kepada pikiran dan tindakan yang dimunculkan seseorang sebagai anggota suatu kelompok atau masyarakat.²

1. Menurut **Auguste Comte**, sosiologi sebagai ilmu tentang masyarakat. Dalam pengertian sosiologi bermaksud memahami kehidupan bersama manusia sejauh kehidupan tersebut dapat ditinjau atau diamati melalui metode empiris. Masyarakat dipandang sebagai unit analisis, sedangkan variabel lainnya seperti keluarga, politik, ekonomi, agama, religi, dan interaksinya merupakan sub-analisis. Dengan demikian, fokus perhatian sosiologi adalah tingkah laku manusia dalam konteks sosial.

¹ Eko Handoyo. 2013. *Sosiologi Politik*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, h. 8.

² Stephen King. Sanderson. 2011. *Makrososiologi*. Jakarta: Rajawali Pers, h. 2.

2. **Bertrand** mengartikan sosiologi sebagai ilmu pengetahuan tentang antar hubungan manusia. Bila definisi diperluas menurutnya sosiologi dapat dipahami sebagai ilmu pengetahuan dan teori umum tentang sistem-sistem tindakan sosial.
3. **Blau dan Moore** memahami sosiologi sebagai studi akademis mengenai bagaimana hubungan sosial dan orientasi normatif bersama mempengaruhi pola tingkah laku dan bagaimana tingkah laku sosial dalam keadaan yang beragam melahirkan struktur sosial yang beraneka ragam. Definisi tersebut lebih ditekankan pada aspek struktur sosial.
4. **Pitirim A. Sorokin**, mengemukakan bahwa sosiologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari:
 - a. Hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial, misalnya antara gejala ekonomi dengan agama, keluarga dengan moral, hukum dengan ekonomi, gerakan masyarakat dengan politik dan sebagainya.
 - b. Hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala non-sosial misalnya gejala geografis, gejala biologis dan sebagainya.
 - c. Ciri-ciri umum dari semua jenis gejala-gejala sosial.
5. **Roucek dan Warren**, mendefinisikan sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dengan kelompok-kelompok.
6. **William F. Ogburn dan Meyer F. Nimkoff**, memberi batasan sosiologi sebagai penelitian secara ilmiah terhadap interaksi sosial dan hasilnya yaitu organisasi sosial.
7. **J. A. A. Van Doorn dan C. J. Lammers** membatasi sosiologi sebagai ilmu pengetahuan tentang struktur-struktur dan proses-proses kemasyarakatan yang bersifat stabil.
8. Menurut **Soerjono Soekanto**, sosiologi adalah ilmu sosial yang kategoris, murni, abstrak dan berusaha mencari pengertian-pengertian umum rasional dan bersifat umum.
9. Menurut **Selo Soemardjan dan Soelaeman**, sosiologi atau ilmu masyarakat merupakan ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial termasuk perubahan-perubahan sosial.

10. **Emile Durkheim**, mengatakan bahwa sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari fakta-fakta sosial yaitu fakta-fakta yang berisikan cara, bertindak, berpikir dan merasakan yang mengendalikan individu tersebut..³

Sosiologi merupakan disiplin ilmu yang memiliki cakupan luas dan banyak cabang yang dipersatukan. Menurut Supardan, secara tematis ruang lingkup sosiologi dapat dibedakan menjadi beberapa sub disiplin ilmu sosiologi, seperti sosiologi pedesaan, sosiologi industri, sosiologi perkotaan, sosiologi medis, sosiologi wanita, sosiologi militer, sosiologi keluarga, **sosiologi pendidikan**, dan sosiologi seni.⁴

B. PENGERTIAN PENDIDIKAN

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pendidikan diartikan sebagai proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.⁵

1. Menurut **Plato** pendidikan adalah membimbing seseorang dari sekedar percaya kepada ilmu pengetahuan yang benar.
2. Menurut **Aristoteles** pendidikan adalah alat untuk membantu manusia mencapai kesempurnaan dan kebahagiaan.
3. Menurut **John Locke** pendidikan adalah sebuah proses membantu anak didik yang dianggap kosong, yang bisa diisi apapun sesuai keinginan pendidik, juga dianggap sebagai pribadi yang dewasa belum sempurna yang membutuhkan pertolongan untuk keluar dari ketidaktahuan.
4. **Pestalozzi**, mendidik adalah membantu potensi bawaan manusia berkembang dengan sendirinya dan cara pengajarannya tergantung pada pesan yang harus disampaikan dengan menyesuaikan pada kemampuan murid.

³ Eko Handoyo, *op.cit.*, h. 9-10.

⁴ Dadang Supardan. 2011. *Pengantar Ilmu Sosial: Sebuah Kajian Pendekatan Struktural*. Jakarta: Bumi Aksara, h. h. 78.

⁵ Saidah. 2016. *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Person, h. 2.

5. **Friederich Froebel**, pendidikan harus membimbing dan membina manusia untuk menemukan kejelasan yang berhubungan dengan dirinya dan yang ada pada dirinya.
6. Menurut **John Dewey**, pendidikan adalah sebuah kebutuhan hidup dan fungsi sosial yang bertumpu pada masing-masing individu juga golongan atau masyarakat dengan kemungkinan mengalami kemandekan atau kemajuan yang bisa diukur dengan kriteria-kriteria tertentu secara demokratis bisa dinilai dari kualitas masyarakat yang ada.
7. Menurut **Ki Hajar Dewantara**, pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti dalam atau kekuatan batin dan karakter, pikiran dan tubuh anak dalam rangka kesempurnaan hidup dan keselarasan dengan dunianya.⁶

C. PENGERTIAN SOSIOLOGI PENDIDIKAN

Ditinjau dari segi etimologi, istilah sosiologi pendidikan terdiri atas dua perkataan yaitu sosiologi dan pendidickn. Maka sepintas saja jelas bahwa di dalam sosiologi pendidikan itu yang menjadi masalah sentralnya ialah aspek-aspek sosiologi di dalam pendidikan. Di dalam sekolah terdapat hubungan-hubungan dan pergaulan-pergaulan sosial yang timbal balik satu sama lain, saling pengaruh-mempengaruhi dan terjadi interaksi sosial. Maka jelaslah di dalam sosiologi pendidikan itu berlaku dan bekerja sama antara prinsip-prinsip sosiologis dan prinsip-prinsip pedagogis.⁷

Dictionary of Sociology, sosiologi pendidikan adalah sosiologi yang diterapkan untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan yang fundamental. Cook & cook, sosiologi pendidikan adalah penerapan pengetahuan dan teknik penelitian sosiologi untuk masalah masalah pendidikan dalam lapangan hubungan antar manusia dan kesejahteraan material.⁸

H. P. Fairchild menjelaskan bahwa sosiologi pendidikan adalah sosiologi yang diterapkan untuk memecakan masala-masalah pendidikan yang fundamental. **E.G. Robbins**, mendefinisikan sosiologi pendidikan

⁶ Saidah, *op.cit.*, h. 3-9.

⁷ Abu Ahmadi. 2007. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, h. 5-6.

⁸ St. Vembriarto. 1993. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Grasindo, h. 11.

sebagai sosiologi khusus yang tugasnya menyelidiki struktur dan dinamika proses pendidikan. Struktur yang dimaksud ialah teori dan filsafat pendidikan, sistem kebudayaan, struktur kepribadian, dan hubungan semuanya itu dengan tata sosial masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan dinamika ialah proses sosial dan kultural, proses perkembangan kepribadian, dan hubungan semuanya itu dengan proses pendidikan.⁹

Mahfud menjelaskan beberapa definisi sosiologi pendidikan sebagai berikut:

1. Ilmu pengetahuan yang mempelajari proses interaksi semua orang yang terlibat dalam kegiatan pendidikan.
2. Teori-teori ilmu sosial yang mempelajari dan memecahkan masalah sosial yang terjadi dalam kegiatan pendidikan di masyarakat.
3. Pemecahan secara ilmiah terhadap permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan pendidikan dengan menggunakan teori dan paradigma ilmu-ilmu sosial.¹⁰

Sosiologi pendidikan mengkaji proses-proses sosiologis yang berlangsung dalam lembaga pendidikan.¹¹

D. LATAR BELAKANG SOSIOLOGI PENDIDIKAN

Sosiologi pendidikan timbul karena ahli-ahli sosiologi turun tangan untuk turut memecahkan problema-problema pendidikan yang timbul sebagai akibat adanya perubahan zaman dan yang oleh lembaga-lembaga pendidikan yang telah ada tidak dapat dipecahkan mengenai masalah-masalah pendidikan yang muncul sebagai akibat perubahan zaman.¹²

Latar belakang timbulnya sosiologi pendidikan dapat diterangkan sebagai berikut.

Masyarakat mengalami perubahan sosial yang cepat. Perubahan

⁹ Abu Ahmadi, *op.cit.*, h. 3.

¹⁰ Mahfud. 2012. *Sosiologi Pendidikan*. Bandung: Pustaka setia, h. 14.

¹¹ Lely Risnawaty Daulay. 2010. *Ilmu Alamiah Dasar, Ilmu Budaya Dasar, Ilmu Sosial Dasar*. Bandung: Perdana Mulya Sarana, h. 128.

¹² St. Vembriarto, *op.cit.*, h. 5.

sosial itu menimbulkan cultural lag. Cultural lag ini merupakan sumber masalah masalah sosial dalam masyarakat. Masalah-masalah sosial itu dialami pula oleh dunia pendidikan. Lembaga-lembaga pendidikan tidak mampu mengatasinya. Kemudian ahli-ahli sosiologi menyumbangkan pemikiran pemikirannya untuk memecahkan masalah itu maka lahirlah sosiologi pendidikan.¹³

Perkembangan sosiologi pendidikan secara kronologis sebagai berikut:

1. **Lester F. Ward**, dapat dianggap sebagai **pencetus pertama** timbulnya gagasan sosiologi pendidikan-pendidikan, yaitu dengan idenya mengenai evolusi sosial dengan mana ia juga menekankan peranan pendidikan sosial yang realistik dalam memimpin perencanaan kehidupan pemerintahan.
2. **John Dewey**, dengan karyanya “*school and society*”, yang terbit pada tahun 1899 dalam mana ia menekankan pendapatnya mengenai sekolah sebagai institusi sosial. Pada waktu itu beberapa ahli ilmu pendidikan dan sosiologi menekankan pentingnya peranan sosiologi bagi pendidikan. dan bukunya berjudul “*democracy and education*”, yang menekankan pentingnya nilai sosial pendidikan merupakan **pelopor sosiologi pendidikan**.
3. Tahun 1910 **kuliah sosiologi pendidikan** yang pertama diberikan oleh **Henry Suzzalo di Universitas Columbia (AS)**.
4. Tahun 1960 didirikan **jurusan sosiologi pendidikan** pada universitas New York dan Columbia.
5. Tahun 1917 terbit teks **buku sosiologi pendidikan yang pertama** dengan judul “*Introduction to educational sociology* karya Walter R. Smith.
6. Tahun 1923 dibentuk **himpunan untuk studi Sosiologi pendidikan** di Amerika Serikat.
7. Tahun 1928 terbit *the journal of educational sociology* karya di bawah pimpinan E. George Payne.
8. Melalui tahun 1936 terbit jurnal *social education*.

¹³ St. Vembriarto, *op.cit.*, h. 11-12.

9. Sejak tahun 1940 *review of educational research* membuat artikel-artikel yang ada hubungannya dengan sosiologi pendidikan.¹⁴

Di Indonesia, Pada tahun 1967 mata kuliah sosiologi pendidikan untuk pertama kalinya dicantumkan dalam kurikulum jurusan didaktik dan kurikulum pada fakultas ilmu pendidikan IKIP di Yogyakarta. Salah satu tugas sosiologi pendidikan di Indonesia dalam memantapkan Pancasila sebagai investasi yang menjadi dasar integrasi nasional.¹⁵

E. TUJUAN SOSIOLOGI PENDIDIKAN

Nasution dalam bukunya berjudul “Sosiologi Pendidikan” menjelaskan tujuan sosiologi pendidikan yaitu:

1. Sosiologi pendidikan sebagai analisis proses sosialisasi
Francis Brown mengemukakan bahwa sosiologi pendidikan memperhatikan pengaruh keseluruhan lingkungan budaya sebagai tempat dan cara individu memperoleh dan mengorganisasi pengalamannya. Sosiologi pendidikan adalah ilmu yang berusaha untuk mengetahui cara mengendalikan proses pendidikan untuk memperoleh perkembangan kepribadian individu yang lebih baik.
2. Sosiologi pendidikan sebagai analisis kedudukan pendidikan dalam masyarakat
L.A. Cook mengutamakan fungsi lembaga pendidikan dalam masyarakat dan menganalisis hubungan sosial antara sekolah dengan dengan berbagai aspek masyarakat. Penganut konsep ini misalnya menyelidiki hubungan antara masyarakat pedesaan atau kota dengan sekolah rendah atau menengah. Dalam kelompok ini termasuk juga mereka yang meneliti fungsi sekolah berhubung dengan struktur status sosial dalam lingkungan masyarakat tertentu.
3. Sosiologi pendidikan sebagai analisis interaksi sosial di sekolah dan antara sekolah dengan masyarakat
Di sini diusahakan menganalisis pola-pola interaksi sosial dan peranan

¹⁴ St. Vembriarto, *op.cit.*, h. 12.

¹⁵ St. Vembriarto, *op.cit.*, h. 12.

sosial dalam masyarakat sekolah dan hubungan orang-orang di dalam sekolah dengan kelompok-kelompok di luar sekolah.

4. Sosiologi pendidikan sebagai alat kemajuan dan perkembangan sosial

Pada mulanya ahli pendidikan sosial memandang pendidikan sosial sebagai bidang studi yang memberi dasar bagi kemajuan sosial dan pemecahan masalah-masalah sosial. Pendidikan dianggap sebagai badan yang sanggup memperbaiki masyarakat. Pendidikan merupakan alat untuk mencapai kemajuan sosial. Sekolah dapat dijadikan alat kontrol sosial yang membawa kebudayaan ke puncak setinggi-tingginya.

5. Sosiologi pendidikan sebagai dasar untuk menentukan tujuan pendidikan
Sejumlah ahli memandang sosiologi pendidikan sebagai alat untuk menganalisis tujuan pendidikan secara obyektif. Mereka mencoba mencapai suatu filsafat pendidikan berdasarkan analisis masyarakat dan kebutuhan manusia.

6. Sosiologi pendidikan sebagai sosiologi terapan

Sejumlah ahli merumuskan sosiologi pendidikan sebagai aplikasi sosiologi terhadap masalah-masalah pendidikan, misalnya mengenai kurikulum. Sosiologi pendidikan dianggap bukan ilmu murni, akan tetapi ilmu yang diterapkan untuk mengendalikan pendidikan. Para ahli sosiologi pendidikan menggunakan segala sesuatu yang diketahui dalam bidang sosiologi dan pendidikan lalu memadukannya dalam suatu ilmu baru dengan menerapkan prinsip-prinsip sosiologi kepada seluruh proses pendidikan.

7. Sosiologi pendidikan sebagai latihan bagi petugas pendidikan

Menurut E.G. Payne, sosiologi pendidikan tidak hanya meliputi segala sesuatu dalam bidang sosiologi yang berhubungan dengan proses belajar dan sosialisasi, akan tetapi juga segala sesuatu dalam pendidikan yang dapat dikenakan analisis sosiologi. Tujuan utamanya ialah memberikan guru-guru, para peneliti dan orang-orang lain yang menaruh perhatian akan pendidikan latihan yang serasi dan efektif dalam sosiologi yang dapat memberikan sumbangannya kepada pemahaman yang lebih mendalam tentang pendidikan.¹⁶

¹⁶ S.Nasution. 2015. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, h. 2-4.

Menurut Lester Frank Ward, tujuan sosiologi pendidikan adalah mengatasi masalah sosial seperti kemiskinan, keterbelakangan, dan kebodohan dengan pendidikan. Sosiologi pendidikan harus menghasilkan konsep paling riil untuk mencapai tujuannya. Adapun menurut Robert Angell, tujuan sosiologi pendidikan ialah menganalisis dan meneliti lembaga pendidikan serta peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalamnya.¹⁷

Tujuan sosiologi pendidikan dalam pengertian luas adalah menganalisis peristiwa interaksi peserta pendidikan. Peserta pendidikan itu bisa orang yang ada di sekolah, masjid, rumah atau keluarga, balai pelatihan, lembaga kursus atau tempat mana saja yang di dalamnya terjadi proses pendidikan atau belajar. Sosiologi pendidikan menganalisis cara mereka berinteraksi dengan sesamanya, cara mereka berinteraksi dengan orang lain di luar sistemnya, dan hubungan sistem mereka dengan sistem-sistem yang lainnya.¹⁸

F. OBJEK SOSIOLOGI PENDIDIKAN

Objek penelitian sosiologi pendidikan ialah tingkah laku manusia dan institusi sosial yang terkait dengan pendidikan.¹⁹

G. RUANG LINGKUP SOSIOLOGI PENDIDIKAN

1. Hubungan sistem pendidikan dengan aspek-aspek lain dalam masyarakat
 - a. Hubungan pendidikan dengan sistem sosial atau struktur sosial
 - b. Hubungan antara sistem pendidikan dengan proses kontrol sosial dan sistem kekuasaan
 - c. Fungsi pendidikan dalam kebudayaan
 - d. Fungsi sistem pendidikan dalam proses perubahan sosial dan kultural atau usaha mempertahankan status quo
 - e. Fungsi sistem pendidikan formal bertalian dengan kelompok rasial, kultural dan sebagainya.
2. Hubungan antarmanusia di lembaga pendidikan
Lingkup ini lebih condong menganalisis struktur sosial di dalam sekolah

¹⁷ Mafud, *op.cit.*, h. 18.

¹⁸ Mahfud, *op.cit.*, h.18 .

yang memiliki karakter berbeda dengan relasi sosial di dalam masyarakat luar sekolah, antara lain sebagai berikut:

- a. Hakikat kebudayaan sekolah sejauh ada perbedaannya dengan kebudayaannya di luar sekolah
 - b. Pola interaksi sosial dan struktur masyarakat sekolah, yang antara lain meliputi berbagai hubungan kekuasaan, stratifikasi sosial, dan pola kepemimpinan informal sebagai terdapat dalam *clique* serta kelompok-kelompok murid lainnya.
3. Pengaruh sekolah terhadap perilaku dan kepribadian semua pihak di lembaga pendidikan
- a. Peranan sosial guru-guru/ tenaga pendidikan.
 - b. Hakikat kepribadian guru/ tenaga pendidikan.
 - c. Pengaruh kepribadian guru/ tenaga kependidikan terhadap kelakuan anak/ peserta didik.
 - d. Fungsi sekolah/ lembaga pendidikan dalam sosialisasi murid/ peserta didik.
4. Lembaga pendidikan dalam masyarakat
- Di sini dianalisis pola-pola interaksi antara sekolah atau lembaga pendidikan dengan kelompok-kelompok sosial lainnya dalam masyarakat di sekitar sekolah/ lembaga pendidikan. Hal yang termasuk dalam wilayah itu, antara lain sebagai berikut.
- a. Pengaruh masyarakat atas organisasi lembaga pendidikan.
 - b. Analisis proses pendidikan yang terdapat dalam sistem-sistem sosial dalam masyarakat luar sekolah.
 - c. Hubungan antara sekolah dan masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan.
 - d. Faktor-faktor demografi dan ekologi dalam masyarakat berkaitan dengan organisasi sekolah, untuk memahami sistem pendidikan dalam masyarakat serta integrasinya dalam keseluruhan kehidupan masyarakat.²⁰

¹⁹ Mahfud, *op.cit.*, h. 15.

²⁰ Mamud. 2012. *Sosiologi Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia, h.17-18.

Penyelidikan dan pengembangan sosiologi pendidikan berpusat pada masalah masalah sebagai berikut:

1. Pendidikan ditinjau dari sudut orientasi sosial yang bersifat umum.
2. Proses sosialisasi anak.
3. Kehidupan atau kebudayaan sekolah sebagai suatu sistem sosial.
4. Pendidikan ditinjau dari sudut hubungan antar pribadi.²¹

²¹ St. Vembriarto, *op.cit.*, h. 13.

BAB II

PROSES DAN DINAMIKA SOSIAL DALAM PENDIDIKAN

A. INTERAKSI SOSIAL SEBAGAI DASAR PROSES SOSIAL

1. Interaksi Sosial dan Proses Sosial

a. Interaksi Sosial

1) Pengertian Interaksi Sosial

Interaksi adalah proses di mana orang-orang berkomunikasi saling mempengaruhi dalam pikiran dan tindakan.¹

Sosial ialah pergaulan serta hubungan manusia dan kehidupan kelompok manusia terutama kehidupan dalam masyarakat yang teratur.²

Interaksi sosial merupakan hubungan sosial bersifat dinamis yang menyangkut hubungan antara orang perorangan antara kelompok-kelompok manusia maupun antara orang perorangan dan kelompok-kelompok manusia.³

Manusia berinteraksi dengan sesamanya dalam kehidupan untuk menghasilkan pergaulan hidup dalam suatu kelompok sosial. Pergaulan hidup semacam itu baru akan terjadi apabila manusia dalam hal ini orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia bekerja sama,

¹ Elly M. Setiadi, H. Kama A. Hakim dan Ridwan Efendi. 2008. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Jakarta: Kencana, h. 90.

² Sidi Gazalba. 1993. *Islam dan Perubahan Sosiobudaya*. Jakarta: Alhusna, h. 63.

³ Eti Ismawati. 2012. *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. Yogyakarta: Ombak, h. 26.

saling berbicara dan sebagainya untuk mencapai tujuan bersama mengadakan persaingan, pertikaian dan lain-lain. Maka dapat dikatakan bahwa interaksi sosial adalah proses-proses sosial yang menunjuk pada hubungan-hubungan sosial yang dinamis.⁴

- a) Menurut H. Booner, Interaksi sosial adalah hubungan antara dua individu atau lebih dimana kelakuan individu yang satu mempengaruhi, mengubah dan memperbaiki kelakuan individu lain atau sebaliknya.
- b) Gillin dan Gillin yang menyatakan interaksi sosial adalah hubungan-hubungan antara orang-orang secara individual, antarkelompok orang dan orang-perorangan dengan kelompok.⁵

2) Macam-macam interaksi sosial

Menurut Maryati dan Suryawati interaksi sosial dibagi menjadi tiga macam yaitu:

- a) Interaksi antara individu dan individu
Dalam hubungan ini bisa terjadi interaksi positif maupun negatif. Interaksi positif jika hubungan yang terjadi saling menguntungkan. Jika hubungan timbal balik merugikan satu pihak atau keduanya disebut dengan interaksi negatif atau bermusuhan.
- b) Interaksi antara individu dan kelompok
Interaksi ini pun dapat berlangsung secara positif maupun negatif, bentuk interaksi sosial dan kelompok bermacam-macam sesuai situasi dan kondisinya.
- c) Interaksi sosial antara kelompok dan kelompok
Interaksi sosial kelompok dan kelompok terjadi sebagai satu kesatuan bukan kehendak pribadi misalnya kerjasama antar dua perusahaan untuk membicarakan suatu proyek.⁶

⁴ Elly M. Setiadi, H. Kama A. Hakim dan Ridwan Efendi, *op.cit.*, h. 90.

⁵ Elly M. Setiadi, H. Kama A. Hakim dan Ridwan Efendi, *op.cit.*, h. 91.

⁶ Lely Risnawaty Daulay. 2010. *Ilmu Alamiah Dasar, Ilmu Budaya Dasar, Ilmu Sosial Dasar*. Bandung: Perdana Mulya Sarana, 134.

b. Proses Sosial

1) Pengertian Proses Sosial

Proses sosial merupakan aspek dinamis dari struktur sosial masyarakat yang didalamnya terdapat hubungan antara individu yang satu dengan individu lainnya. Secara sosiologis proses sosial merupakan relasi atau interaksi sosial yang khusus. Dalam kaitannya dengan relasi sosial proses sosial merupakan spesies atau pengertian khusus dari relasi sosial.⁷

- a) **Abdul Syani** mengartikan proses sosial sebagai hubungan-hubungan sosial yang dinamis dalam kehidupan masyarakat.
- b) **Soerjono Dirdjosiworo** mendefinisikan proses sosial sebagai pengaruh timbal-balik antara berbagai segi kehidupan bersama.
- c) **Hendropuspito** memahami proses sosial sebagai bentuk jalinan Interaksi yang terjadi antara perorangan atau kelompok yang bersifat dinamik dan berpola tertentu.⁸

2) Ciri-ciri Proses Sosial

- a) Bentuk interaksi disebut sebagai proses sosial karena terdiri dari serentetan kegiatan yang sambung-menyambung dan berakhir pada suatu ujung yang merupakan hasil dari perjalanan itu.
- b) Proses sosial mengandung unsur dinamika dalam hal mana proses tersebut mengandung berbagai keadaan nilai sosial yang sedang diproses, mulai dari nilai yang belum sempurna sampai pada situasi yang lebih mantap.
- c) Proses sosial mengikuti pola tingkah laku tersendiri, dimana orang yang terlibat dalam proses sosial dalam memperebutkan hadiah misalnya tidak mengikuti pola sopan santun yang dituntut oleh kedudukan dan peranan sosial yang seharusnya dimainkan.
- d) Interaksi yang disebut proses sosial tidak mengenal waktu dan tempat tertentu.
- e) Fenomena proses sosial berada di bawah kontrol sosial yang ketat.

⁷ Eko Handoyp, *op.cit.*, h.46.

⁸ Eko Handoyp, *op.cit.*, h.47.

- f) Fenomena proses sosial bersifat universal dapat terjadi dimanamana dan merupakan bagian dari kebudayaan manusia.⁹

3) Bentuk pokok proses sosial

Bentuk umum proses-proses sosial adalah interaksi sosial yang dapat juga dinamakan proses sosial, karena interaksi sosial merupakan syarat utama terjadinya aktivitas-aktivitas sosial.¹⁰

- a) Asosiatif
- (1) Kerja sama (*cooperation*)
 - (2) Akomodasi (*accomodation*)
 - (3) Asimilasi
- b) Disosiatif
- (1) Persaingan (*competition*)
 - (2) Kontravensi (*contravention*)
 - (3) Oposisi
 - (4) Konflik

2. Interaksi Sosial sebagai Dasar Proses Sosial

Bentuk umum proses sosial adalah interaksi sosial yang dapat juga dinamakan proses sosial. Oleh karena interaksi sosial merupakan syarat utama terjadinya aktivitas aktivitas sosial. Bentuk lain dari proses-proses sosial hanya merupakan bentuk-bentuk khusus dari interaksi sosial. apabila dua orang bertemu interaksi dimulai pada saat itu mereka saling menegur berjabat tangan saling berbicara atau bahkan mungkin berkelahi. aktivitas-aktivitas semacam itu merupakan bentuk-bentuk dari interaksi sosial. Interaksi sosial antara kelompok-kelompok manusia terjadi antara kelompok tersebut sebagai kesatuan dan biasanya tidak menyangkut pribadi anggota-anggota interaksi sosial, antara kelompok-kelompok terjadi, antara kelompok lain juga terjadi dalam masyarakat. interaksi tersebut terjadi secara lebih mencolok apabila terjadi pertentangan

⁹ Eko Handoyo, *op.cit.*, h. 47.

¹⁰ Elly M. Setiadi, H. Kama A. Hakim dan Ridwan Efendi.,*op.cit.*, h. 90.

antara kepentingan-kepentingan orang- perorangan dengan kepentingan kepentingan kelompok.¹¹

Interaksi sosial adalah kunci dari semua kehidupan sosial, tanpa ada interaksi sosial tidak akan mungkin ada kehidupan bersama. Bertemunya orang- perorangan secara badaniah belaka tidak akan menghasilkan pergaulan hidup dalam suatu kelompok sosial. Pergaulan hidup semacam itu baru akan terjadi apabila orang-perorangan atau kelompok-kelompok manusia bekerjasama, saling berbicara, dan seterusnya untuk mencapai suatu tujuan bersama, mengadakan persaingan, pertikaian, dan lain sebagainya. Maka dapat dikatakan bahwa interaksi sosial merupakan dasar proses sosial, yang menunjuk pada hubungan-hubungan sosial yang dinamis. Proses sosial diartikan sebagai pengaruh timbal balik antara berbagai segi kehidupan bersama.¹²

Bentuk umum proses sosial adalah interaksi sosial, karena interaksi sosial merupakan syarat utama terjadinya aktivitas-aktivitas sosial. Bentuk lain proses sosial hanya merupakan bentuk-bentuk khusus dari interaksi sosial. Apabila dua orang bertemu, interaksi sosial dimulai pada saat itu. Mereka saling menegur, berjabat tangan, saling berbicara atau bahkan mungkin berkelahi. Aktivitas-aktivitas semacam itu merupakan bentuk-bentuk interaksi sosial. Walaupun orang-orang yang bertemu muka tersebut tidak saling berbicara atau tidak saling menukar tanda-tanda, interaksi sosial telah terjadi, karena masing-masing sadar akan adanya pihak lain yang menyebabkan perubahan-perubahan dalam perasaan maupun syaraf orang-orang yang bersangkutan, yang disebabkan oleh misalnya bau keringat, kesan di dalam pikiran seseorang, yang kemudian menentukan tindakam

Fungsi mengetahui interaksi sosial yang terjadi di masyarakat.

Dengan mengetahui dan memahami perihal kondisi-kondisi apa yang dapat menimbulkan serta mempengaruhi bentuk-bentuk interaksi sosial tertentu, maka pengetahuan kita dapat pula disumbangkan pada usaha bersama yang dinamakan pembinaan bangsa dan masyarakat.¹³

¹¹ Elly M. Setiadi, H. Kama A. Hakim dan Ridwan Efwndi.,*op.cit.*, h. 90-92.

¹² Soerjono Soekanton. 2015. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. h.54-55.

¹³ Soerjono Soekanto. 2015. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. h. 54.

B. RUANG KELAS SEBAGAI SISTEM SOSIAL

1. Pengertian Sistem Sosial

Dalam pembahasan ini ada dua konsep yang harus dipahami terlebih dahulu yaitu konsep **sosial** dan **sistem sosial**.

Istilah sistem berasal dari bahasa Yunani yaitu *Systema*. Menurut Shrode dan Voich, sistem ialah himpunan dari bagian-bagian yang saling terkait, masing-masing bagian bekerja sendiri dan bersama-sama saling mendukung, semuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan bersama, dan terjadi pada lingkungan yang kompleks.¹⁴

Menurut Talcott Parsons, sistem sosial merupakan sejumlah aktor atau individu yang saling berinteraksi dalam situasi yang sekurang-kurangnya mempunyai aspek lingkungan, mempunyai motivasi dalam arti mempunyai kecenderungan untuk mengoptimalkan kepuasan yang hubungannya dengan situasi mereka, didefinisikan dan dimediasi dalam sistem simbol bersama yang terstruktur secara kultural.¹⁵

Sistem sosial merupakan konsep relasional sebagai pengganti konsep eksistensial perilaku sosial. Konsep sistem sosial adalah alat pembantu untuk menjelaskan tentang kelompok-kelompok manusia. semua sistem sosial termasuk hubungan berdua, kelompok kecil, keluarga, organisasi kompleks dan masyarakat keseluruhan. Tiap-tiap sistem sosial terdiri atas pola-pola perilaku tertentu yang mempunyai struktur dalam dua arti yaitu:

- a. Relasi-relasi sendiri antara orang-orang bersifat agak mantap dan tidak cepat berubah.
- b. Perilaku-perilaku mempunyai corak atau bentuk yang relatif mantap.¹⁶

Menurut Alvin L. Bertrand, bahwa dalam suatu sistem sosial paling tidak harus terdapat:

¹⁴ Abdulsyani. 2007. *Sosiologi: Skematika, Teori dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara, h. 124.

¹⁵ George Ritzer. 2014. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana, h. 140.

¹⁶ Munandar Sulaeman. 1992. *Ilmu Budaya Dasar: Suatu Pengantar*. Bandung: Eresco, h. 18-19.

- a. Dua orang atau lebih;
- b. Terjadi interaksi antara mereka;
- c. Mempunyai tujuan;
- d. dan memiliki struktur, simbol dan harapan-arapan bersama yang dipedomaninya.

Unsur-unsur dalam sistem sosial adalah satuan dari interaksi yang kemudian membentuk struktur artinya unsur-unsur itu merupakan bagian-bagian yang saling bergantung dan menyatu dalam sistem sosial.¹⁷

2. Ruang Kelas sebagai Sistem Sosial

Ruang kelas terdiri dari beberapa unsur yang saling fungsional antara satu sama lain yaitu *guru*, *murid* dan *manajemen sekolah*. Setiap aktor memperhatikan status dan peran sebelum mereka bertindak dan berperilaku. Status aktor apakah ia seorang guru, murid, dan manajemen sekolah, memiliki perilaku yang diharapkan dari seseorang atau disebut peran.¹⁸

Status sebagai manajemen sekolah diharapkan memainkan peran sebagai pengelola yang efektif dari sisi teknis administratif serta penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sekolah. Status sebagai guru diharapkan untuk berperilaku sebagai seorang pendidik, pengayom, pengasuh, dan pemberi motivasi bagi peserta didik. Adapun status sebagai murid umumnya diharapkan untuk berperilaku sebagai penuntut ilmu, pekerja keras dan pencari kebenaran.

Dalam ruang kelas hubungan antara guru dan murid dengan status dan peran mereka masing-masing membentuk suatu jaringan hubungan yang berpola. Pola jaringan hubungan antara guru dan murid akan memberikan dampak terhadap perilaku, kompetensi, kapital sosial budaya, dan keberhasilan peserta didik di masa yang akan datang, yang mengenai

¹⁷ Abdulsyani, op.cit., h. 124.

¹⁸ Damsar. 2012. *Pengantar Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, h.7.

hal ini akan dibahas dalam pembahasan berikutnya yaitu ruang kelas sebagai sistem interaksi.

C. RUANG KELAS SEBAGAI SISTEM INTERAKSI

Sistem interaksi ialah suatu tindakan timbal balik atau saling berhubungan antara dua orang atau lebih melalui kontak dan komunikasi dalam ketergantungan satu sama lain secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan.

Hubungan guru dengan murid di ruang kelas dapat dipandang sebagai suatu masyarakat. Sebab hubungan guru-murid suatu interaksi sosial dimana dalam konsep persahabatan hubungan guru dengan murid di ruang kelas dapat dipandang sebagai masyarakat. Hubungan guru-murid juga dipandang sebagai suatu sistem yaitu sekumpulan dari bagian atau komponen yang saling berhubungan dalam ketergantungan satu sama lain secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan. Oleh karena itu, hubungan guru murid dapat dilihat sebagai sistem interaksi.¹⁹

Hubungan guru-murid terdiri dari dua pihak yang terikat pada suatu ikatan moral dan etika suatu profesi kependidikan. Sebelum mereka membentuk hubungan guru-murid, sebagai individu masing-masing mereka memiliki motif, keinginan, kepentingan, kebutuhan dan orientasi sendiri tentang berbagai macam hal berkaitan dengan pendidikan dan kependidikan.

Pada masa awal pendidikan baik guru maupun murid memberikan sinyal, tanda, persepsi, tindakan dan tentang sesuatu yang berkaitan dengan keberadaan hubungan mereka.

Setelah masa penajakkan berakhir secara perlahan muncul pola hubungan antara guru dan murid, tidak semua motif, keinginan, kepentingan, kebutuhan dan orientasi yang dimiliki oleh guru dan masing-masing murid tercakup dalam pola ini. Namun ketika suatu pola hubungan guru-murid telah terbentuk, maka ia menjadi milik bersama dan menjadi rujukan dalam perilaku dan tindakan masing-masing individu, baik guru dan murid.

¹⁹ Damsar. h, sembian 8.

Dalam pola hubungan ini berisi berbagai kesepakatan, seperti tentang disiplin, kebersihan, kerapian, pekerjaan rumah, kuis, ulangan harian, ulangan tengah semester, dan ujian semester. Dalam kesepakatan ini terkandung prinsip bahwa mereka memiliki saling ketergantungan satu sama lain, antara guru dan semua murid, dalam melaksanakan kegiatan proses belajar-mengajar. Pola hubungan ini juga menjadi pengontrol perilaku masing-masing. Pola hubungan ini dilihat sebagai sistem interaksi.²⁰

D. RUANG KELAS SEBAGAI SISTEM PERTUKARAN

Ruang kelas sebagai sistem pertukaran yakni kelas terdiri dari bagian-bagian: individu dan kelompok yang saling ketergantungan dalam suatu pertukaran yang terpola. Bagian, unsur atau *item* memiliki ketergantungan terhadap suatu pertukaran yang terus-menerus dan ajek. Pertukaran dilakukan karena individu-individu dilihat sebagai makhluk yang rasional, dia memperhitungkan untung-rugi. Suatu sistem bertahan apabila semua unsur pembentuk sistem memperoleh untung atau minimal tidak mendapatkan kerugian. Keuntungan tidak selalu bersifat ekstrinsik, tetapi juga bersifat instrinsik. Jika ada bagian atau unsur pembentuk sistem mengalami kerugian, maka diperkirakan sistem tidak dapat terbentuk atau apabila sistem telah ada maka bisa jadi sistem akan bubar.²¹

Hubungan guru-murid sebagai suatu sistem terbentuk apabila unsur atau item dalam hal ini guru dan para murid memiliki ketergantungan satu sama lain dalam rangka memperoleh keuntungan, baik bersifat ekstrinsik berupa materi dan benda maupun instrinsik berupa nilai atau peringkat. Penghargaan, pengakuan dan kecintaan dari para murid, orang tua/wali murid dan kepala sekolah. Adapun para murid dalam proses pertukaran berusaha memperoleh nilai atau peringkat, penghargaan, kasih sayang, perhatian dan cinta dari guru.²²

²⁰ Damsar, *op.cit.*, h. 99.

²¹ Damsar, *op.cit.*, h. 100.

²² Damsar, *op.cit.*,h. 100.

E. TEORI RUANG KELAS

1. Pendekatan Interaksi

Pendekatan interaksi memberikan perhatian yang khusus terhadap pengamatan pada metode pengajaran dalam mengelola ruang kelas yang efisien. Pendekatan interaksi memperhatikan bagaimana pengaruh perilaku dominatif yang diperbandingkan dengan perilaku integratif terhadap anak. Guru dalam perspektif ini dipandang memiliki perilaku yang berbeda dalam memperlakukan murid atau peserta didik di ruang kelas.

a. Perilaku Dominatif Versus Integratif

Perilaku dominatif memosisikan guru sebagai sumber kebenaran. Guru juga dipandang sebagai makhluk serba tahu terhadap segala sesuatu. Gurulah sebagai tokoh peranan tentang benar salah terhadap suatu hal misalnya sikap, perilaku, aktivitas atau kerja. Sebaliknya, anak dipandang sebagai makhluk bodoh yang senantiasa perlu bimbingan dan arahan dari guru.

Adapun perilaku integratif guru dalam ruang kelas akan menyebabkan terganggunya bagian terbesar murid dalam aktivitas di ruang belajar. Perilaku integratif memosisikan guru sebagai sumber motivasional dan inspirasi. Guru memberikan dorongan inspirasi dan motivasi terhadap semua peserta didik tanpa kecuali, baik miskin-kaya, bodoh-pintar, jelek-cantik. Perilaku integratif guru memberikan ruang terhadap semua jenis perbedaan latar belakang peserta didik untuk memperoleh dorongan, inspirasi dan motivasi yang sama.²³

b. Gaya Kepemimpinan Guru

1) Autokratik

Pemimpin yang otokratis atau otoriter memiliki karakteristik yang dipandang negatif, tergolong egois, bersifat menonjolkan kekuasaannya dan tidak mau menerima saran dan pendapat

²³ Damsar, *op.cit.*, h. 104-105.

orang lain.²⁴ Gaya kepemimpinan guru yang otokratik dicirikan dengan kepemimpinan yang otoriter tidak memberikan ruang bertukar pandangan atau pendapat terhadap sesuatu antara guru dan murid dan tidak memberikan ruang bagi suatu perbedaan terhadap sesuatu.²⁵

2) Demokratik

Tipe demokratis berlandaskan pada pemikiran bahwa aktivitas dalam organisasi akan dapat berjalan lancar dan dapat mencapai tujuan yang ditetapkan apabila masalah yang timbul dipecahkan bersama. Dalam pelaksanaan harus dijalin kebersamaan.²⁶ Gaya kepemimpinan guru yang demokratis ditandai dengan kepemimpinan yang demokratis, adanya ruang untuk bertukar pandangan atau pendapat, dan kebaikan bersama dikonstruksikan secara bersama melalui musyawarah.²⁷

3) Laisser-faire

Disebut juga tipe kendali bebas sebagai kebalikan dari tipe otokratis. Guru dengan tipe ini cenderung memberikan kekuasaan sepenuhnya kepada siswanya. Guru berkeyakinan bahwa dengan menyerahkan aktivitas kepada siswanya akan mempercepat pencapaian tujuan.²⁸ Adapun gaya kepemimpinan *laissez faire* dikarakteristikan dengan kepemimpinan yang cuek dan ruang bertukar pandangan atau pendapat tidak diperlukan sebab peserta didik dibolehkan melakukan apa saja apabila dia memandang sesuatu itu penting untuk dilakukan.²⁹

Gaya kepemimpinan demokratis diajukan sebagai suatu bentuk gaya yang perlu dikembangkan di sekolah. Walaupun produktivitas anak paling tinggi di bawah gaya kepemimpinan otokratik apabila ia hadir di ruang kelas, namun bila ia tidak ada produktivitas rendah seperti halnya anak di bawah pengasuhan guru yang pola kepemimpinan yang *laissez-*

²⁴ Connie Chairunnisa. 2006. *Manajemen Pendidikan dalam Multiperspektif*. Jakarta: Rajawaliipers, h. 114.

²⁵ Damsar, *op.cit.*, h. 105.

²⁶ Connie Chairunnisa, *op.cit.*, h. 115.

²⁷ Damsar, *op.cit.*, h. 105.

²⁸ Connie Chairunnisa, *op.cit.*, h. 116.

²⁹ Damsar, *op.cit.*, h. 105.

faire. Siswa akan merasa puas dan senantiasa produktif di bawah pengawasan guru yang demokratis. Gaya kepemimpinan guru di sekolah dapat mempengaruhi cara berpikir, merasa dan bertindak siswa di kemudian hari. Bagi siswa yang menganggap apa-apa yang diterima, diperoleh dan dipelajari di sekolah merupakan suatu yang baik untuk dijadikan pedoman, referensi atau rujukan di masa akan datang.³⁰

c. Teacher Centred versus Learner Centred

Pola hubungan guru-murid yang disebut dengan *teacher centered* adalah guru diposisikan sebagai orang yang memberikan petunjuk, menetapkan arahan, mengeluarkan nasehat-nasehat dan membenarkan otoritas, sedangkan *learned centered* yaitu guru sebagai orang yang menerima perasaan, menghargai gagasan, memberikan dorongan kepada murid dan mengajukan pertanyaan. Semakin cenderung hubungan guru-murid ke arah *teacher centered* maka semakin cenderung tidak ketergantungan murid terhadap guru dan semakin kecil kemandirian murid, Sebaliknya apabila hubungan guru-murid semakin cenderung ke arah *learned centered* maka semakin kurang ketergantungan terhadap guru dan semakin tinggi kemandirian murid. Menurut Withal, guru dengan menggunakan pendekatan *learned centered* lebih efektif pengajarannya di ruang kelas dibandingkan dengan guru yang menggunakan pendekatan *teacher centered*.³¹

2. Pendekatan Interpretatif

Realitas sosial termasuk ruang kelas dipandang sebagai kenyataan interaksional yang dipenuhi dengan simbol. Kenyataan, oleh sebab itu dipandang sebagai interaksi interpersonal yang menggunakan simbol-simbol dimana individu secara aktif melalui proses interpretatif mengkonstruksikan tindakannya dan proses interaksi dimana individu itu menyesuaikan diri dan mencocokkan berbagai macam tindakan dengan mengambil peran dan komunikasi simbol. Sekali suatu situasi dipandang dengan cara tertentu dari dalam suatu konfigurasi tertentu maka akan

³⁰ Damsar, *op.cit.*, h. 107.

³¹ Damsar, *op.cit.*, h. 106.

sangat sulit untuk melihatnya lagi dengan cara yang berbeda. Jadi Ketika suatu definisi situasi terbentuk maka ia akan digunakan terus-menerus sehingga sukar untuk mengubahnya. Dengan cara pandang demikian maka sekali guru mendefinisikan situasi hubungannya dengan seorang murid sebagai seorang bodoh maka definisi itu akan terus digunakan sehingga sukar mengubahnya meskipun itu tidak lagi bodoh misalnya. Dengan cara pandang definisi sosial maka pendidikan menurut Waller merupakan seni menanamkan definisi situasi yang berlaku pada kaum muda dan yang sudah diterima oleh golongan penyelenggara sekolah. Dengan demikian, sekolah merupakan suatu alat yang ampuh untuk melakukan kontrol sosial.³²

3. Pendekatan Radikal

Salah satu teori yang terpenting dalam pendekatan radikal adalah teori pelabelan. Teori ini dikatakan radikal karena ia mempertanyakan sesuatu yang dipandang memang seharusnya demikian dan memberikan alternatif cara pandang dalam melihat sesuatu. Teori pelabelan memiliki akar pemikiran sama dengan teori interaksionisme simbolik. Teori pelabelan memberikan penekanan pada signifikan label baik nama maupun reputasi yang diberikan pada diri seseorang. Oleh sebab, itu label dipandang menjadi bagian dari konsep diri seseorang yang membawa seseorang kearah suatu persepsi, prasangka atau penyimpangan tertentu yang dikenakan pada dirinya atau sebaliknya keluar dari semua yang disebut.

Mengapa anak-anak diberi label meja 1, meja 2, dan meja 3 oleh guru taman kanak-kanak? Jawabannya menurut Rist, adalah penjenjangan atau stratifikasi dari kelas sosial dari sang murid, semakin bahwa strata yang dimiliki seorang murid Taman Kanak-Kanak maka semakin besar nomor meja yang ditentukan oleh sang guru juga semakin rendah kualitas pemahaman belajar sama anak menurut guru. Cara seperti ini dipandang sebagai pemberian label.

Dalam teori ini korban pemberian label dilihat sebagai korban yaitu korban penggunaan kekuasaan yang sewenang-wenang dari pemegang kekuasaan yaitu guru. Dampak pemberian suatu label terhadap murid

³² Damsar, *op.cit.*, h. 107-108.

adalah persepsi prasangka atau penyimpangan tertentu yang dikenakan pada dirinya, sehingga mereka mempunyai persepsi negatif atau prasangka tidak baik terhadap dirinya sendiri yang dapat menimbulkan pembenaran ramalan pribadi yaitu 1 ramalan yang mengawali serangkaian peristiwa yang akhirnya membuat ramalan itu benar-benar menjadi kenyataan sehingga mereka dikelompokkan sama seperti apa yang mereka persepsikan atau prasangka seperti awalnya.³³

³³ Damsar, *op.cit.*, h. 109-110.

BAB III

SOSIALISASI

A. PENGERTIAN SOSIALISASI

Sosialisasi yang dimaksud ialah suatu proses dimana seseorang mulai menerima dan menyesuaikan diri kepada adat istiadat suatu golongan dan dimana lambat laun ia akan merasa sebagian dari golongan itu. Sosialisasi terjadi di mana seorang anak menerima kebudayaan golongannya dengan kehidupan sehari-hari di mana orang tuanya atau golongannya mendidiknya dengan sengaja ataupun tidak tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dikerjakan. Proses ini dengan sendirinya terjadi jika seseorang dalam suatu golongan masyarakat atau tidak terjadi dengan seseorang yang hidup terpencil.¹ Menurut Soejono Dirdjosisworom sosialisasi mengandung tiga pengertian:

1. Proses sosialisasi ialah proses belajar yaitu suatu proses akomodasi dengan mana individu menahan, mengubah impuls-impuls dalam dirinya dan mengambil alih cara hidup atau kebudayaan masyarakat.
2. Dalam proses sosialisasi itu individu mempelajari kebiasaan, sikap, ide-ide, pola-pola nilai dan tingkah laku, dan ukuran kepatuhan tingkah laku di dalam masyarakat di mana ia hidup.
3. Semua sifat dan kecakapan yang dipelajari dalam proses sosialisasi itu disusun dan dikembangkan sebagai suatu kesatuan sistem diri pribadinya.²

¹ Hasan Shadily. 1980. *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia*. Surabaya. Usana Offset, h. 60.

² Abdulsyani, *op.cit.*, h. 57.

Mekanisme sosialisasi ditempuh melalui penanaman pula kultural seperti nilai-nilai kepercayaan bahasa dan simbol-simbol pada setiap personal sehingga anggota masyarakat akan menerima dan memiliki komitmen terhadap norma-norma yang ada.³

B. JENIS SOSIALISASI

1. Sosialisasi Berdasarkan Kebutuhan

- a. Sosialisasi primer menunjuk pada suatu proses melaluinya seorang anak manusia mempelajari atau menerima pengetahuan, sikap, nilai, norma, perilaku esensial dan harapan agar mampu berpartisipasi efektif dalam masyarakat dan/atau menjadi anggota masyarakat. Sosialisasi primer merupakan kebutuhan sosial primer bagi anak manusia karena apabila mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan sosial primer ini maka mereka akan mengalami kelumpuhan berpartisipasi dalam kehidupan sosial.
- b. Sosialisasi sekunder adalah setiap proses selanjutnya yang bebas individu yang telah disosialisasikan itu ke dalam sektor-sektor baru dari dunia objektif masyarakatnya. Sosialisasi sekunder dikenal juga sebagai resosialisasi, secara harfiah berarti sosialisasi kembali yaitu suatu proses mempelajari norma, nilai, sikap dan perilaku baru agar sepadan dengan situasi baru yang mereka hadapi dalam kehidupan. Dalam bentuknya yang paling lazim resosialisasi terjadi tiap kali kita mempelajari sesuatu yang berbeda bahkan bisa bertentangan dengan kondisi awal.

2. Sosialisasi Berdasarkan Cara yang Dipakai

- a. Sosialisasi represif ialah sosialisasi yang menekankan pada kepatuhan anak dan penghukuman terhadap perilaku yang keliru.
- b. Sosialisasi partisipatif ialah sosialisasi yang menekankan pada otonomi anak dan memberikan imbalan terhadap perilaku anak yang baik.

³ Eti Ismawati. 2012. *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. Yogyakarta: Ombak, h. 15.

3. Sosialisasi Berdasarkan Keberadaan Perencanaan

- a. Sosialisasi berdasarkan perencanaan merupakan sosialisasi dilakukan atas dasar rencana yang berkelanjutan dan sistematis. Sosialisasi jenis ini dapat ditemukan dalam dunia pendidikan formal seperti sekolah dan perguruan tinggi serta pendidikan non-formal seperti kursus dan pelatihan. Dalam sosialisasi berdasarkan perencanaan semua tujuan pembelajaran, materi, proses dan penilaian telah dikonstruksi secara matang sehingga semua terukur dan dapat dievaluasi dan monitor.
- b. Adapun sosialisasi tanpa perencanaan terjadi dalam suatu proses interaksi yang terjadi dalam masyarakat misalnya dalam keluarga, kelompok teman sebaya atau lingkungan tempat tinggal. Sosialisasi tanpa perencanaan dilakukan melalui perilaku, sikap dan struktur aktual dari orang tua atau anggota senior dari masyarakat. keteladanan atau percontohan melalui perilaku, sikap dan struktur aktual ini para anggota senior masyarakat melakukan transmisi pengetahuan, nilai, norma dan harapan-harapan kepada anggota muda mereka. Proses seperti ini juga dikenal sebagai pendidikan informal.⁴

C. AGEN SOSIALISASI

1. Keluarga

a. Pengertian Keluarga

Noller dan Fitzpatrick menggambarkan keluarga sebagai kelompok intim yang menurunkan identitas rumah dan kelompok, lengkap dengan kesetiaan dan emosi yang kuat, serta pengalaman budaya dan masa depan.⁵

b. Bentuk Keluarga

- 1) **Keluarga inti:** biasanya terdiri dari satu atau kedua orangtua dan seorang anak atau beberapa anak.

⁴ Damsar, *op.cit.*, h. 66-68.

⁵ Larry A. Samovar, Richard E. Porter dan Edwin R. Mc. Daniel. 2010. *Komunikasi Lintas Budaya*. Jakarta: Salemba Humanika, h. 65.

2) **Keluarga besar**: biasanya meliputi kakek, nenek dan kerabat.⁶

c. Peran Keluarga

Keluarga memiliki peranan sebagai:

1) Reproduksi

keluarga bertanggung jawab dalam dalam hal reproduksi demi kelangsungan masyarakat, keluarga membesarkan anak untuk menggantikan anggota yang lebih tua yang telah meninggal. Tanpa kehadiran dari generasi baru budaya akan cepat menghilang.

2) Mengajarkan ekonomi

Tugas penting dari keluarga adalah mengajarkan tanggung jawab dan pembagian ekonomi. Hampir setiap keluarga terlibat dalam aktivitas yang bertujuan untuk menyediakan hal-hal seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Selanjutnya mengajarkan bagaimana perbedaan dalam peranan ekonomi keluarga, mengajarkan nilai budaya penting seperti sifat hemat, berbagi dan kerja keras.

3) Sosialisasi

Keluarga merupakan salah satu guru yang menyampaikan budaya dari satu generasi ke generasi yang lain, termasuk mengajarkan anak-anak bagaimana beradaptasi dalam budaya mereka. Hal ini berarti membentuk perilaku anak untuk dapat menyesuaikan diri dengan norma dan peraturan. Ingoldsby dan Smith menyimpulkan tugas ini sebagai berikut “masyarakat bergantung pada orangtua untuk mencintai dan membesarkan anak-anak mereka, untuk melatih dan mengajarkan mereka berbicara dan sebaliknya bertindak sesuai dengan perilaku orang yang berbudaya”.

4) Mengajarkan nilai dasar dan pola pikir

Nilai inti dan cara pandang suatu budaya bersumber dari banyak hal, namun keluargalah sebagai pengemban tanggung jawab yang pertama dan terutama yang pertama kali memperkenalkan hal ini pada anak.

⁶ Larry A. Samovar, Richard E. Porter dan Edwin R. Mc. Daniel, *op.cit.*, h. 66.

5) Perkembangan identitas

Setiap orang memiliki banyak identitas seperti identitas individu, nasional, budaya, jenis kelamin, etnik dan kelas sosial juga keluarga. Namun keluarga merupakan identitas anda yang paling penting dibandingkan dengan identitas yang lain. Keluarga merupakan institusi pertama yang menandakan identitas anda.

6) Pelatihan komunikasi

Keluarga tidak hanya memperkenalkan pada bahasa dalam budayanya, namun keluarga juga mengajarkan bagaimana menggunakan bahasa tersebut.⁷

d. Keluarga sebagai agen Sosialisasi

Seorang bayi menemukan ibunya sebagai orang yang pertama kali memeluk, membelai dan mengasihinya secara fisik. Pelukan, belaian dan kasih secara fisik ini merupakan pelajaran pertama yang diperolehnya tentang aspek afeksi-emosional dari kehidupan. Pelajaran berikutnya seperti nilai, norma, sikap dan harapan diterima dari keluarga seiring dengan berjalannya waktu, yang berkait dengan bertambahnya usia.⁸

Pada awal kehidupan manusia biasanya agen sosialisasi terdiri atas orang tua dan saudara kandung. Pada masyarakat yang mengenal sistem keluarga luas, agen sosialisasi bisa berjumlah lebih banyak dan dapat mencakup pula nenek, kakek, paman, bibi dan sebagainya. Di kalangan lapisan menengah dan atas dalam masyarakat perkotaan sering kali orang lain seperti pengasuh memegang peran penting sebagai agen sosialisasi.⁹

Fungsi sosialisasi ini menunjukkan peranan keluarga dalam membentuk kepribadian anak. Melalui interaksi sosial dalam keluarga itu anak mempelajari pola-pola tingkah laku, sikap, keyakinan, cita-cita dan nilai-nilai dalam masyarakat dalam rangka perkembangan kepribadiannya.¹⁰

⁷ Larry A. Samovar, Richard E. Porter dan Edwin R. Mc. Daniel, *op.cit.*, h. 70-72.

⁸ Damsar, *op.cit.*, h. 70.

⁹ Kamanto Sunarto. 2004. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, h. 24.

¹⁰ St. Vembriarto. 1993. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Gramedia, h. 38.

Sosialisasi dalam lingkungan keluarga ada tiga tujuan yang harus diajarkan orang tua kepada anaknya yaitu:

- a. **Penguasaan diri.** Masyarakat menuntut penguasaan diri pada anggota-anggotanya. Proses mengajar anak untuk menguasai diri ini dimulai pada waktu orang tua melatih anak untuk memelihara kebersihan dirinya. Ini merupakan tuntutan sosial pertama yang dialami oleh anak untuk melatih penguasaan diri. Tuntutan penguasaan diri ini berkembang dari yang bersifat fisik kepada penguasaan diri secara emosional. Anak harus belajar menahan kemarahannya terhadap orang tua atau saudara-saudaranya, tuntutan sosial yang menuntut anak agar menguasai diri, sehingga hal ini merupakan pelajaran berat bagi anak.
- b. **Nilai-nilai.** Bersamaan dengan latihan penguasaan diri ini kepada anak diajarkan nilai-nilai. Sambil melatih anak menguasai diri agar permainannya dapat dipinjamkan kepada temannya, kepadanya diajarkan nilai kerjasama. Sambil mengajarkan anak menguasai diri agar tidak bermain-main dahulu sebelum menyelesaikan pekerjaan rumahnya, kepadanya diajarkan tentang nilai sukses dalam pekerjaan. Penelitian penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai dasar dalam diri seseorang terbentuk pada usia 6 tahun. Penelitian juga menunjukkan bahwa keluarga memegang peranan penting dalam menanamkan nilai-nilai itu.
- c. **Peranan-peranan sosial.** Mempelajari peranan-peranan sosial ini terjadi melalui interaksi sosial dalam keluarga. Setelah dalam diri anak berkembang kesadaran diri sendiri yang membedakan dirinya dengan orang lain, dia mulai mempelajari peranan-peranan sosial yang sesuai dengan gambaran tentang dirinya. Dia mempelajari peranannya sebagai anak, sebagai saudara laki-laki ataupun perempuan. Proses mempelajari peranan-peranan sosial ini kemudian dilanjutkan di lingkungan kelompok sebaya, sekolah dan perkumpulan-perkumpulan.¹¹

2. Sekolah

Agen sosialisasi berikutnya ialah lembaga pendidikan formal. Di

¹¹ St. Vembriarto, *op.cit.*, h. 44-48.

sekolah seseorang mempelajari hal baru yang belum dipelajarinya dalam keluarga ataupun kelompok bermain. Pendidikan formal mempersiapkannya untuk penguasaan peran-peran baru di kemudian hari, di kala seseorang tidak tergantung lagi pada orang tua. Menurut Robert Dreeben bahwa anak di sekolah di samping membaca, menulis dan berhitung juga diajarkan aturan mengenai kemandirian, prestasi, universalisme dan spesifitas. Menurutnya, sekolah merupakan suatu jenjang peralihan antara keluarga dan masyarakat.¹²

3. Kelompok Teman Sebaya

Kelompok teman sebaya merupakan suatu kelompok dari orang-orang yang seusia dan memiliki status yang sama, dengan siapa seseorang umumnya berhubungan dan bergaul. Seiring dengan perkembangan waktu, kelompok teman sebaya menjadi kelompok rujukan dalam mengembangkan sikap dan perilaku.¹³ Setelah mulai dapat bepergian, seorang anak memperoleh agen sosialisasi lain yaitu teman bermain yang terdiri atas kerabat, maupun tetangga dan teman sekolah. Di sini seorang anak mempelajari kemampuan baru. Pada tahap ini anak memasuki *game stage*, mempalari aturan yang mengatur peran orang yang kedudukannya sederajat.¹⁴

Anda mengetahui dari pengalaman Anda sendiri betapa bersifat memaksanya kelompok sebaya. Hampir tidak mungkin kita melawan kelompok sebaya yang peraturan utamanya ialah “konformitas atau penolakan”. Seseorang yang tidak melakukan apa yang dilakukan orang lain menjadi orang luar atau bukan anggota. Bagi anak-anak di bawah dan di atas sepuluh tahun yang sedang belajar menemukan jalannya di dunia, tidaklah mengeharnkan bawa kelompok teman sebaya berkuasa.¹⁵

¹² Kamanto Sunarto, op.cit., h. 25-26.

¹³ Damsar, op.cit., h. 74-75.

¹⁴ Kamanto Sunarto, op.cit., h. 25.

¹⁵ James M. Henslin. 2006. *Sosiologi: dengan Pendekatan Membumi*. Jakarta: Penerbit Erlangga, h. 79.

4. Media Massa

Media massa merupakan agen sosialisasi yang semakin menguat peranannya. Media massa baik media cetak, seperti surat kabar dan majalah maupun media elektronik seperti internet, televisi, radio semakin memegang peranan penting dalam mempengaruhi cara pandang, cara pikir, tindak dan sikap seseorang. Pengaruh media massa cenderung bersifat masif, berskala besar dan segera. Pesan-pesan yang disampaikan melalui siaran atau tayangan mempengaruhi khalayak baik secara positif maupun negatif. Berbagai tayangan agama, pendidikan, perilaku baik dan sebagainya merupakan teknik positif yang dapat meningkatkan kualitas keterlibatan partisipasi efektif individual dalam masyarakat atau meningkatkan pemahaman akan nilai dan pengetahuan yang bermanfaat bagi individu untuk dapat hidup efektif dalam masyarakat. sebaliknya berbagai tayangan kekerasan, kriminal dan pornografi dapat menjadi sesuatu yang negatif bagi khalayak. Berbagai kekerasan dan perbuatan asusila yang dilakukan anak-anak di bawah umur ternyata mereka pada umumnya melakukan perbuatan itu disebabkan karena menonton tayangan baik di televisi maupun video. Berbagai tindak kekerasan yang dilakukan oleh anak-anak disebabkan oleh inspirasi yang muncul setelah menonton tayangan televisi.¹⁶

5. Lingkungan Tempat Tinggal

Di masyarakat Indonesia dikenal paling sedikit dua lingkungan tempat tinggal yaitu kompleks perumahan dan perkampungan. Bagi orang tua yang ingin menumbuhkembangkan pada suatu lingkungan tempat tinggal, biasanya mereka akan mempertimbangkan plus minus antara memilih perkampungan atau kompleks perumahan. Para orang tua akan mempertimbangkan bagaimana memilih dari lingkungan tempat tinggal seperti interaksi sosial antar warga, fasilitas publik, status sosial dan ekonomi. Pilihan lingkungan tempat tinggal oleh seorang memiliki banyak variabel diantaranya hanya kenyamanan dan keamanan bagi sosialisasi anak mereka dari perspektif mereka tentunya. Disamping itu juga terdapat

¹⁶ Damsar, *op.cit.*, h. 76.

variabel status sosial ekonomi, budaya dan agama menjadi pertimbangan pemilihan lingkungan tempat tinggal.¹⁷

6. Agama

Agama tidak hanya berpengaruh pada aspek hubungan vertikal antara manusia dan Tuhannya atau aspek religius dari kehidupan, tetapi juga berpengaruh pada aspek-aspek kehidupan lainnya seperti ekonomi, sosial dan budaya. Demikian juga dalam aspek sosial budaya, cara berbusana, bergaul, bertindak, tata krama dan berperilaku memiliki tuntutan dalam agama. Jadi dalam perspektif ini tampak bahwa aspek agama dalam berbagai aspek kehidupan lainnya.¹⁸

7. Tempat Kerja

Suatu agen sosialisasi lain yang berperan pada tahap lebih lanjut kehidupan kita adalah tempat kerja. Dengan orang yang bekerja bersama kita di tempat kerja, kita tidak hanya mempelajari beberapa keterampilan tetapi juga suatu perspektif mengenai dunia. Sebagian besar dari kita akhirnya akan menjalin komitmen dengan suatu jenis pekerjaan tertentu setelah kita mencoba berbagai pekerjaan. Ada suatu segi menarik pada pekerjaan sebagai suatu agen sosialisasi. Semakin lama kita bekerja dalam suatu jenis pekerjaan tertentu maka pekerjaan tersebut semakin menjadi bagian dari konsep diri kita. Sehingga memasukkan pekerjaan dalam deskripsi diri kita misalnya saya seorang pegawai.¹⁹

¹⁷ Damsar, *op.cit.*, h. 79-80.

¹⁸ Damsar, *op.cit.*, h. 76.

¹⁹ James M. Henslin, *op.cit.*, h. 78-79.

BAB IV

TEORI STRUKTURAL FUNGSIONAL, TEORI KONFLIK DAN TEORI INTERAKSIONALISME SIMBOLIK

A. TEORI STRUKTURAL FUNGSIONAL

1. Pengertian Struktural Fungsional

Teorinya struktural-fungsional juga populer disebut teori integrasi atau teori konsensus. Tujuan utama pembuatan teori integrasi konsensus atau fungsional ini tidak lain agar pembaca lebih jelas dalam memahami masyarakat secara integral. Pendekatan fungsional menganggap masyarakat terintegrasi atas dasar kata sepakat anggota-anggotanya akan nilai-nilai kemasyarakatan tertentu. *General agreements* ini memiliki daya yang mampu mengatasi perbedaan-perbedaan pendapat dan kepentingan di antara para anggota masyarakat. Masyarakat sebagai suatu sistem sosial secara fungsional terintegrasi ke dalam suatu bentuk *equilibrium*. Oleh sebab itu, aliran pemikiran tersebut disebut fungsional struktural atau fungsionalisme struktural.¹

Teori ini menekankan keteraturan dan mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Para penganut pendekatan fungsional bagi masyarakat dan lembaga lembaga sosial sebagai suatu sistem yang seluruh bagiannya saling tergantung satu sama lain dan

¹ I.B. Wirawan. 2013. *Teori-teori Sosial dalam Tiga Paradigma*. Jakarta: Prenada Media, h.41.

bekerja sama menciptakan keseimbangan. Mereka memang tidak menolak keberadaan konflik di masyarakat, akan tetapi mereka percaya benar bahwa masyarakat itu sendiri akan mengembangkan mekanisme yang dapat mengontrol konflik yang timbul. Inilah yang menjadi pusat perhatian analisis bagi kalangan fungsionalis.²

Menurut teori ini, masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi pada satu bagian akan membawa perubahan pula terhadap bagian yang lain. Asumsi dasarnya adalah setiap struktur dalam sistem sosial fungsional terhadap yang lain. Sebaliknya, kalau tidak fungsional maka struktur itu tidak akan ada atau akan hilang dengan sendirinya.³

2. Asumsi Teori Struktural Fungsional

- a. **Menurut Lawer**, teori ini berdasarkan pada tujuan asumsi yaitu:
 - 1) Masyarakat harus dianalisis sebagai satu kesatuan yang utuh yang terdiri atas bagian-bagian yang saling berinteraksi.
 - 2) Hubungan yang ada bisa bersifat satu arah atau hubungan yang bersifat timbal balik.
 - 3) Sistem sosial yang ada bersifat dinamis, penyesuaian yang ada tidak perlu banyak mengubah sistem sebagai satu kesatuan yang utuh.
 - 4) Integrasi yang sempurna di masyarakat tidak pernah ada sehingga di masyarakat senantiasa timbul ketegangan-ketegangan dan penyimpangan-penyimpangan tetapi ketegangan dan penyimpangan ini akan dinetralisir lewat proses pelembagaan.
 - 5) Perubahan-perubahan akan berjalan secara gradual dan perlahan-lahan sebagai suatu proses adaptasi dan penyesuaian.
 - 6) Perubahan merupakan hasil penyelesaian dari luar, tumbuh oleh adanya diferensiasi dan inovasi.

² I.B. Wirawan, *op.cit.*, h. 42.

³ I.B. Wirawan, *op.cit.*, h. 42.

- 7) Sistem diintegrasikan lewat pemilikan nilai-nilai yang sama.⁴
- b. **Menurut Ralph Dahrendorf**, asumsi dasar yang dimiliki oleh teori struktural fungsional ialah:
- 1) Setiap masyarakat terdiri dari berbagai elemen yang terstruktur secara relatif mantap dan stabil.
 - 2) Elemen-elemen struktur tersebut terintegrasi dengan baik.
 - 3) Setiap elemen dalam struktur memiliki fungsi yaitu memberikan sumbangan pada bertanya struktur itu sebagai suatu sistem.
 - 4) Setiap struktur yang fungsional dilandaskan pada suatu konsensus nilai diantara para anggotanya.⁵

Menurut teori struktural fungsional, masyarakat sebagai suatu sistem memiliki struktur yang terdiri atas banyak lembaga. Masing-masing lembaga memiliki fungsi sendiri-sendiri. Struktur dan fungsi dengan kompleksitas yang berbeda-beda ada pada setiap masyarakat baik masyarakat modern maupun masyarakat primitif. Misalnya lembaga sekolah mempunyai fungsi mewariskan nilai-nilai yang ada kepada generasi baru. Lembaga keluarga berfungsi menjaga kelangsungan perkembangan jumlah penduduk. Lembaga politik berfungsi menjaga tatanan sosial agar berjalan dan ditaati sebagaimana mestinya. Semua lembaga tersebut akan saling berinteraksi dan saling menyesuaikan yang mengarah pada keseimbangan. Bila terjadi penyimpangan dari suatu lembaga masyarakat, maka lembaga lainnya akan membantu dan mengambil langkah penyesuaian.⁶

3. Tokoh Teori Struktural Fngsional

Tokoh-tokoh Teori Struktural Fungsional yaitu:

- a. Ralf Dahrendorf
- b. Emile Durkheim
- c. Robert K. Merton
- d. Talcott Parson

⁴ I.B. Wirawan, *op.cit.*, h. 43.

⁵ Damsar. 2017. *Teori Sosiologi*. Jakarta: Penerbit, h. 169-172.

⁶ I.B. Wirawan, *op.cit.*, h. 43.

4. Teori Struktural Fungsional dalam Relasi Perempuan dan laki-laki

Subordinasi perempuan bukan saja dikategorikan sebagai faktor kultural 6 juga merupakan faktor struktural. Pandangan ini didasarkan pada beberapa anggapan bahwa ruang gerak perempuan hanya sebatas urusan domestik dan mengurangi tingkat partisipasi dalam lingkup publik, maka status dan martabat perempuan juga ikut ditentukan oleh anggapan yang berkembang hingga saat ini. Pemikiran persoalan perempuan sebagai gejala struktural dilengkapi. Melalui teori ini persoalan gender adalah persoalan yang berkaitan dengan struktur masyarakat dan fungsi atau peran yang dijalankan perempuan dan laki-laki.⁷

B. TEORI KONFLIK

1. Pengertian Konflik

Menurut Webster, konflik berarti suatu perkelahian, peperangan atau perjuangan yaitu berupa konfrontasi fisik antara beberapa pihak. Konflik juga oleh Webster diartikan sebagai suatu persepsi mengenai perbedaan kepentingan atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan.⁸

Teori ini dipaparkan dalam rangka memahami dinamika yang terjadi dalam masyarakat. Di dalam realitas masyarakat, konflik sebagai hal yang harus ada dan kehadirannya tidak dapat ditawar-tawar lagi. Adanya perbedaan kekuasaan dapat dipastikan menjadi sumber konflik dalam sebuah sistem sosial terutama masyarakat yang kompleks dan heterogen. Sumber daya yang langka terutama sumber daya ekonomi di dalam masyarakat akan membangkitkan kompetisi di antara pelaku ekonomi yang memperebutkan dan bukan mustahil berujung pada pertikaian akibat persoalan distribusi sumber daya tersebut yang tidak pernah merata. Kelompok-kelompok kepentingan yang berbeda dalam sistem sosial akan saling mengejar tujuan yang berbeda dan saling bersaing. Kondisi

⁷ Eti Ismawati, *op.cit.*, h. 114.

⁸ Syarifuddin Jurdi. 2013. *Sosiologi Nusantara: Memahami Sosiologi Integralistik*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, h. 214-215.

semacam ini dalam banyak kasus kerap menyebabkan terjadinya konflik terbuka.⁹

Para teoritis konflik memandang suatu masyarakat itu dapat menjadi satu karena terikat bersama oleh kekuatan-kekuatan kelompok atau kelas yang dominan di masyarakat. Berbeda dengan fungsionalis yang memandang nilai-nilai bersama atau konsensus anggota masyarakat menjadi suatu ikatan pemersatu, maka dalam teoritis konflik, konflik itu merupakan ciptaan dari kelompok atau kelas dominan untuk memaksakan nilai-nilai tertentu yang mereka inginkan.¹⁰

2. Asumsi Teori Konflik

Penganut teori konflik menunjukkan persepsi yang sangat berbeda dengan kalangan fungsionalis dalam memahami masyarakat. Jika kalangan fungsionalis melihat adanya saling ketergantungan dan kesatuan di dalam masyarakat, maka kalangan penganut teori konflik justru melihat masyarakat merupakan arena di mana suatu kelompok dengan yang lain saling bertarung untuk memperebutkan *power* dan mengontrol bahkan melakukan penekanan bagi saingan-saingan mereka. Jika kalangan fungsionalis melihat hukum atau undang-undang sebagai sarana untuk meningkatkan integrasi sosial, maka para penganut teori konflik melihat undang-undang itu tidak lain merupakan cara yang digunakan untuk menegakkan dan memperkuat suatu ketentuan yang menguntungkan kelompok tertentu di atas pengorbanan kelompok lainnya.¹¹

a. Ralf Dahrendorf tentang asumsi dasar yang dimiliki oleh teori konflik yaitu:

- 1) Setiap masyarakat dalam setiap hal tunduk pada proses perubahan, perubahan sosial terdapat di mana-mana.

Berbeda dengan teori struktural fungsional yang melihat masyarakat selalu dalam keadaan seimbang. Teori struktural konflik melihat

⁹ I.B. Wirawan, *op.cit.*, h. 59.

¹⁰ I.B. Wirawan, *op.cit.*,h. 60.

¹¹ I.B. Wirawan, *op.cit.*,h. 60.

masyarakat pada proses perubahan. Hal tersebut terjadi karena elemen-elemen yang berbeda sebagai pembentuk masyarakat mempunyai perbedaan pola dalam motif, maksud, kepentingan atau tujuan. Perbedaan tersebut menyebabkan setiap elemen yang ada berusaha untuk mengusung motif atau tujuan yang dipunyai menjadi motif atau tujuan dari struktur. Ketika motif atau tujuan dari suatu elemen telah menjadi bagian dari struktur makalah tersebut cenderung untuk mempertahankan. Di satu sisi lainnya elemen lain berjuang mengusung motif atau kepentingan dirinya menjadi motif atau kepentingan struktur. Konsekuensi logis dari keadaan tersebut adalah perubahan yang senantiasa diperjuangkan oleh setiap elemen terhadap motif, maksud, kepentingan atau tujuan diri.

- 2) Setiap masyarakat dalam setiap hal memperlihatkan pertikaian dan konflik, konflik sosial terdapat di mana-mana

Kita telah diskusikan bahwa setiap struktur sosial terdiri dari beberapa elemen yang memiliki motif, maksud, kepentingan atau tujuan yang berbeda satu sama lain. Perbedaan tersebut merupakan sumber terjadinya pertikaian dan konflik di antara berbagai elemen dalam struktur sosial. Selama perbedaan tersebut masih terdapat di dalam struktur, maka selama itu pula pertikaian dan konflik dimungkinkan ada.

- 3) Setiap elemen dalam suatu masyarakat menyumbang disintegrasi dan perubahan.

Perbedaan motif, maksud, kepentingan atau tujuan dari berbagai elemen seperti ditegaskan diatas merupakan sumber pertikaian dan konflik. Selanjutnya, pertikaian dan konflik menyebabkan disintegrasi dan perubahan dalam struktur sosial. Ini berarti bahwa berbagai elemen yang membentuk struktur tersebut mempunyai sumbangan terhadap terjadinya disintegrasi dan perubahan dalam struktur tersebut.

- 4) Setiap masyarakat didasarkan pada paksaan dari berbagai anggotanya atas orang lain.

Keteraturan, Harmoni atau kenormalan yang tampak dalam masyarakat dipandang oleh teoritis konflik sebagai suatu hasil paksaan dari

sebagian anggotanya terhadap sebagian anggota yang lainnya. Kemampuan memaksa dari sebagian anggota masyarakat berasal dari kemampuan mereka untuk memperoleh kebutuhan dasar yang bersifat langka seperti hak istimewa, kekuasaan, kekayaan.¹²

b. Menurut Alison dan Wallace, teori konflik memiliki tiga asumsi utama dimana satu dengan yang lain saling berhubungan.

- 1) Manusia memiliki kepentingan-kepentingan yang asasi dan mereka berusaha untuk merealisasikan kepentingan-kepentingan itu
- 2) Kekuasaan bukanlah sekedar barang langka dan terbagi secara tidak merata sehingga merupakan sumber konflik, melainkan sebagai sesuatu yang bersifat memaksa.
- 3) Ideologi dan nilai-nilai dipandang sebagai senjata yang digunakan oleh berbagai kelompok yang berbeda untuk meraih tujuan dan kepentingan mereka masing-masing.¹³

3. Tokoh-tokoh Teori Konflik

- a. Karl Marx
- b. Max Weber
- c. Rendhal Collins
- d. Geoger Simmel
- e. Lewis Coser
- f. Ralf Dahrendorf

4. Teori Konflik dalam Relasi Perempuan dan laki-laki

Dasar teori ini dalam hubungan antara laki-laki dengan perempuan didasarkan pada aspek kekuasaan dan kepentingan. Namun sebagian besar kalangan modern feminis beranggapan bahwa kekuasaan tidak dapat dipertahankan tanpa disertai perjuangan. Oleh karena itu, usaha dari gerakan ini adalah untuk memperoleh dan perluasan kekuasaan

¹² Damsar, *Teori Sosiologi*, h. 178-181.

¹³ I.B. Wirawan, *op.cit.*,h. 61.

untuk perempuan dalam kegiatan pemerintahan dan sektor lainnya yang selama ini didominasi oleh laki-laki.¹⁴

C. TEORI INTERAKSIONALISME SIMBOLIK

1. Pengertian Interaksionalisme Simbolik

Konsep teori interaksi simbolik ini diperkenalkan oleh Herbert Blumer sekitar tahun 1939. Dalam lingkup sosiologi, Ide ini sebenarnya sudah lebih dahulu dikemukakan George Herbert Mead, tetapi kemudian dimodifikasi oleh Blumer guna mencapai tujuan tertentu. Teori ini memiliki ide yang baik, tetapi tidak terlalu dalam dan spesifik sebagaimana diajukan G. H. Mead. Karakteristik dasar teori ini adalah suatu hubungan yang terjadi secara alami antara manusia dalam masyarakat dan hubungan masyarakat dengan individu, Interaksi yang terjadi antar individu berkembang melalui simbol-simbol yang mereka ciptakan. Realitas sosial merupakan rangkaian peristiwa yang terjadi pada beberapa individu dalam masyarakat. Interaksi yang dilakukan antar individu itu berlangsung secara sadar. Interaksi simbolik juga berkaitan dengan gerak tubuh antara lain suara atau vokal, gerakan fisik, ekspresi tubuh yang semuanya itu mempunyai maksud yang disebut dengan simbol. Teori interaksi simbolik disebut juga teori sosiologi interpretatif. Teori ini ternyata dipengaruhi oleh ilmu psikologi khususnya psikologi sosial. Teori ini juga didasarkan pada persoalan konsep diri.¹⁵

Secara umum ada enam proporsi yang dipakai dalam konsep interaksi simbolik yaitu:

- a. Perilaku manusia mempunyai makna dibalik yang menggejala.
- b. Pemaknaan kemanusiaan perlu dicari sumber pada interaksi sosial manusia.
- c. Masyarakat merupakan proses yang berkembang holistik, tak terpisah, tidak linier dan tidak terduga.

¹⁴ Esti Ismawati, *op.cit.*, h. 115.

¹⁵ I.B. Wirawan, *op.cit.*,h. 109.

- d. Perilaku manusia itu berlaku berdasar penafsiran fenomenologi yaitu berlangsung atas maksud, pemaknaan dan tujuan bukan didasarkan atas proses mekanik dan otomatis.
- e. Konsep mental manusia itu berkembang dialektik.
- f. Perilaku manusia itu wajar dan konstruktif reaktif.¹⁶

Karakteristik dari teori interaksi simbolik ini ditandai oleh hubungan yang terjadi antar individu dalam masyarakat. Dengan demikian, individu yang satu berinteraksi dengan individu yang lainnya melalui komunikasi. Individu adalah simbol-simbol yang berkembang melalui interaksi simbol yang mereka ciptakan. Masyarakat merupakan rekapitulasi individu secara terus-menerus.¹⁷

2. Asumsi Teori Interaksionalisme Simbolik

a. Menurut Blumer

Asumsi-asumsi interaksi simbolik dari Herbert Blumer meliputi:

- 1) Manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan atas makna yang dimiliki benda itu bagi mereka yang tengah berinteraksi.
- 2) Maknanya merupakan hasil dari interaksi sosial dalam masyarakat manusia.
- 3) Makna dimodifikasi dan ditangani melalui suatu proses penafsiran yang digunakan oleh setiap individu dalam keterlibatannya dengan tanda-tanda yang dihadapi.

Ide-ide dasar *intraksi* simbolik yang dikembangkan oleh Blumer sebagai berikut:

- 1) Masyarakat terdiri dari manusia yang berinteraksi melalui tindakan bersama dan membentuk organisasi atau struktur sosial.
- 2) Interaksi terdiri atas berbagai tindakan manusia yang berhubungan dengan kegiatan manusia lain, interaksi simbolik mencakup

¹⁶ I.B. Wirawan, *op.cit.*,h. 109.

¹⁷ I.B. Wirawan, *op.cit.*,h. 119

penafsiran tindakan sedangkan interaksi non simbolik hanya mencakup stimulus-respon yang sifatnya sederhana.

- 3) Objek-objek tidak memiliki makna yang intrinsik. Makna lebih merupakan produk interaksi simbolik.
- 4) Manusia tidak hanya mengenal objek eksternal di luar dirinya tetapi bisa juga melihat dirinya sendiri sebagai objek.
- 5) Tindakan manusia adalah tindakan interpretatif yang dibuat oleh manusia sendiri.
- 6) Tindakan itu saling terkait dan diselesaikan oleh para anggota kelompok. Tindakan ini disebut tindakan bersama yang dibatasi sebagai organisasi sosial dan perilaku tindakan berbagai manusia.¹⁸

b. Menurut Turner

Menurut Turner, ada empat asumsi dari teori interaksionisme simbolik yaitu:

- 1) Manusia adalah makhluk yang mampu menciptakan dan menggunakan simbol
Tindakan sosial dipahami sebagai suatu tindakan individu yang memiliki arti atau makna subjektif bagi dirinya dan dikaitkan dengan orang lain. Dalam proses melakukan tindakan sosial terdapat proses pemberian arti atau pemaknaan. Proses pemberian arti atau pemaknaan menghasilkan simbol. Ketika tindakan sosial dilakukan oleh dua orang atau lebih, maka pada saat ini dua anak manusia atau lebih sering menggunakan atau menciptakan simbol.
- 2) Manusia menggunakan simbol untuk saling berkomunikasi
Untuk saling berkomunikasi manusia menggunakan simbol. Manusia menciptakan simbol melalui pemberian nilai atau pemaknaan terhadap sesuatu baik berupa bunyi, kata, gerak tubuh, benda atau hal lainnya. Sesuatu yang telah diberi nilai atau makna disebut dengan simbol. Melalui simbol ini manusia saling berkomunikasi.

¹⁸ I.B. Wirawan, *op.cit.*,h. 118-119

- 3) Manusia berkomunikasi melalui pengambilan peran
Pengambilan barang merupakan proses pengambilan barang yang mengacu pada bagaimana kita melihat situasi sosial dari sisi orang lain di mana dari dia kita akan memperoleh respon. Dalam proses pengambilan peran, seseorang menempatkan dirinya dalam kerangka berpikir orang lain. Jadi, seseorang mengambil peran polisi misalnya adalah berusaha menempatkan diri dalam kerangka berpikir polisi atau melihat situasi atau berperilaku seorang seperti yang dilakukan oleh polisi.
- 4) Masyarakat terbentuk, bertahan dan berubah berdasarkan kemampuan manusia untuk berpikir, mendefinisikan, melakukan refleksi diri dan melakukan evaluasi
Masyarakat dibentuk, dipertahankan dan diubah berdasarkan kemampuan manusia yang dikembangkan melalui interaksi sosial. Kemampuan manusia dalam berpikir, mendefinisikan, refleksi diri dan evaluasi berkembang melalui interaksi sosial. Jadi, proses interaksi sosial yaitu sangat penting dalam mengembangkan kemampuan manusia. Dengan kemampuan ini, melalui proses interaksi juga manusia membentuk, mempertahankan dan mengubah masyarakat.¹⁹

3. Tokoh Teori Interaksionalisme Simbolik

Tokoh teori interaksionalisme simbolik di antaranya:

- a. George Herbert Mead
- b. Herbert Blumer

¹⁹ Damsar, *op.cit.*, h. 60-61.

BAB V

GURU DAN TUGAS MENGAJAR

A. MENGAJAR SEBAGAI PEKERJAAN

Kerja merupakan usaha yang ditujukan untuk memproduksi atau mencapai hasil. Pekerjaan diartikan sebagai tugas kewajiban dan tanggung jawab sebagai penugasan kerja total untuk pekerja. Definisi ini menekankan bahwa kerja dan pekerjaan sebagai bentuk penjumlahan dan pengurangan tenaga manusia dalam aktivitas baik fisik maupun psikologis untuk menghasilkan suatu produk atau layanan. Oleh karena itu dalam bekerja tidak hanya dituntut keterampilan fisik akan tetapi juga nonfisik seperti berpikir dan merasa. Konsep ini lebih menekankan bahwa bekerja merupakan perpaduan yang harmonis antara kemampuan fisik dan psikologis tersebut. Untuk dapat memperoleh hasil kerja yang maksimal maka pekerja harus memiliki pendidikan, keterampilan baik teknis konsep maupun interpersonal terkait pekerjaan yang menjadi tanggung jawab. Untuk dapat bekerja secara maksimal juga dibutuhkan pemahaman terkait bakat, kepribadian dan pengalaman.¹

Dalam masyarakat Indonesia pada masa lampau, pembagian kerja perempuan bekerja di ruang domestik (rumah dan lingkungannya), dan laki-laki ditempatkan di ruang publik (di luar rumah seperti kantor dan pabrik). Konstruksi sosial budaya seperti ini dipandang sebagai sesuatu yang seharusnya dan semestinya demikian yang terkristalisasi sebagai tradisi, adat atau kebiasaan.

¹ Jejen Musfah. 2015. *Redesain Pendidikan Guru: Teori, Kebijakan, dan Praktik*. Jakarta: Kencana, h. 113-114.

Namun saat ini sudah dilakukan kompromi yang perlahan perlahan menafsirkan kembali mengenai tindakan yang menyimpang atau tidak menyimpang dalam kaitannya dengan pekerjaan dan sampai pada satu titik menghasilkan kompromi yaitu mensinergikan pekerjaan domestik dan publik.

Salah satu pekerjaan yang dilihat sinergi antara pekerjaan domestik dan publik adalah pekerjaan sebagai guru. Pekerjaan guru dilihat dari perspektif *emic* merupakan pekerjaan lanjutan dari pekerjaan domestik yang dilakukan dalam rumah tangga. Aktivitas seperti mengasuh, membesarkan dan mendidik anak di dalam keluarga dapat diperbesar cakupan, jangkauan dan kuantitasnya dengan memperluas ruang dan memperpanjang waktu melalui memasuki pekerjaan sebagai guru.

Bekerja sebagai guru bagi seorang perempuan akan memperluas ruang dan memperpanjang waktu dalam mengasuh, membesarkan dan mendidik anak, dalam hal ini anak secara sosial pedagogis yaitu guru sebagai ibu sedangkan murid sebagai anak dalam hal ini adalah anak didik.

Kegiatan sebagai guru dipahami secara *emic* oleh masyarakat bukan merupakan pekerjaan yang berat dan bertentangan dengan pekerjaan yang dilakukan di rumah tangga, sebaliknya ia dilihat sebagai kelanjutan dari pekerjaan rumah tangga seperti tugas pengasuhan dan pendidikan anak. Karena ia dipandang sebagai pekerjaan lanjutan maka bisa dipahami Mengapa banyak perempuan masuk ke sekolah atau perguruan tinggi yang berdimensi atau berkaitan dengan kependidikan, di mana pekerjaan utama setelah selesai yaitu mengikuti pendidikan adalah guru.²

B. MENGAJAR SEBAGAI PROFESI

1. Konsep Profesi

- a. Perbedaan antara Profesi, Profesional, Profesionalisme dan Profesionalitas Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perbedaan antara istilah profesi, profesional, profesionalisme dan profesionalitas ialah:

² Damsar, *op.cit.*, h. 148-149.

- 1) **Profesi** ialah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejujuran dan sebagainya).
- 2) **Profesional** ialah bersangkutan dengan profesi, memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya, mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya.
- 3) **Profesionalisme** ialah mutu, kualitas dan tindak-tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang profesional.
- 4) **Profesionalitas** ialah perihal profesi, keprofesian dan kemampuan untuk bertindak secara profesional.

Menurut Bukhari Alma, perbedaan arti istilah profesi, profesional, profesionalisme dan profesionalitas:

- 1) **Profesi** adalah suatu pekerjaan, mempunyai fungsi pengabdian pada masyarakat dan adanya pengakuan dari masyarakat. Profesi menurut keterampilan tertentu melalui pendidikan dan latihan yang lama dalam lembaga tertentu, dan dalam disiplin ilmu tertentu serta memiliki kode etik yang menjadi pedoman perilaku anggotanya, serta ada sanksi yang jelas terhadap pelanggaran kode etik.
- 2) **Profesional** yaitu orang yang menyanggah suatu profesi. Sebagai profesional yang melakukan pekerjaan secara otonom, mengabdikan diri kepada masyarakat, penuh rasa tanggung jawab.
- 3) **Profesionalisme** yaitu menyangkut paham, keyakinan. Ini menunjukkan komitmen para anggota untuk meningkatkan kemampuan profesional secara terus menerus.
- 4) **Profesionalitas** berarti produk, kadar. Ini mengacu pada sikap anggota profesi terhadap profesinya dalam hal pengetahuan dan keahlian dalam melakukan pekerjaan.³

b. Syarat Profesi

Prasyarat profesi akan terpenuhi jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

³ Ahmad Susanto.. 2018. *Manajemen Peningkatan Kinerja Guru*. Depok: Prenada Mediagroup, h. 120-121.

- a. Profesi menuntut suatu latihan profesional yang memadai dan membudaya
- b. Profesi menuntut suatu lembaga yang sistematis dan terspesialisasi
- c. Profesi harus memberikan keterangan tentang keterampilan yang dibutuhkan di mana masyarakat umum tidak memikirkan
- d. Profesi harus sudah mengembangkan hasil dan pengalaman yang sudah teruji
- e. Profesi harus memerlukan pelatihan kebijaksanaan dan penampilan tugas
- f. Profesi harus merupakan tipe pekerjaan yang bermanfaat
- g. Profesi harus mempunyai kesadaran ikatan kelompok sebagai kekuatan yang mampu mendorong dan membina anggotanya
- h. Profesi harus tidak dijadikan batu loncatan mencari pekerjaan lain.⁴

c. Ciri Pokok Profesi

Ciri-ciri pokok profesi yaitu:

- a. Pekerjaan itu mempunyai fungsi dan signifikansi sosial karena diperlukan untuk mengabdikan kepada masyarakat di pihak lain pengakuan masyarakat merupakan syarat mutlak bagi suatu profesi bahkan jauh lebih penting dari pengakuan pemerintah
- b. Profesi menuntut keterampilan tertentu yang diperoleh lewat pendidikan dan latihan yang lama dan intensif serta dilakukan dalam lembaga tertentu yang secara sosial dapat dipertanggungjawabkan. Proses pemerolehan keterampilan itu bukan hanya rutin melainkan bersifat produktif terhadap suatu masalah.
- c. Profesi didukung oleh suatu disiplin ilmu bukan sekedar serpihan atau hanya berdasarkan akal sehat semata.
- d. Ada kode etik yang menjadi pedoman perilaku anggotanya beserta sanksi yang jelas dan tegas terhadap pelanggar kode etik. Pengawasan terhadap ditegakkannya kode etik dilakukan oleh organisasi profesi.

⁴ Muhammad Anwar. 2018. *Menjadi Guru Profesional*. Jakarta: Prenadamedia Group, h. 24-25.

- e. Sebagai konsekuensi dari layanan yang diberikan kepada masyarakat anggota profesi secara perorangan atau berkelompok memperoleh imbalan finansial.⁵

2. Mengajar sebagai profesi

Guru sebagai profesi, hal ini tidak dapat ditawar lagi. Legalisasi pemerintah dengan undang-undang nomor 14 tahun 2005 mengisyaratkan bahwa kedudukan guru harus memiliki landasan hukum yang kuat. Dengan landasan tersebut guru dapat melakukan berbagai aktivitas, berbagai pengembangan diri dan boleh berkelompok untuk jenis pekerjaannya. Contoh kegiatan ini didasarkan pada upaya yang jelas dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas guru. Bila guru telah diakui sebagai sebuah profesi, maka pekerjaan guru dituntut menjadi profesional. Eksklusivisme fungsi dan peran guru dalam kegiatan sehari-hari, menjadi guru harus memiliki nilai lebih dibandingkan dengan profesi lain.⁶

Guru pada saat ini telah mempunyai organisasi profesi semisal PGRI, IPTPI, ISMAPI, dan lain sebagainya. Kemitraan pemerintah dengan organisasi profesi ini memberikan media atau instrumen untuk peningkatan kualitas pendidikan lewat guru. Jabatan guru merupakan jabatan profesional dan sebagai jabatan profesional pemegangnya harus memenuhi kualifikasi tertentu. Kriteria jabatan profesional antara lain jabatan itu melibatkan kegiatan intelektual, mempunyai batang tubuh ilmu yang khusus, memerlukan latihan dalam jabatan yang berkesinambungan, merupakan karir hidup dan keanggotaan yang permanen, menentukan baru perilakunya, mementingkan layanan, mempunyai organisasi profesi dan mempunyai kode etik yang ditaati oleh anggotanya.⁷

Dari uraian di atas dapat ditegaskan bahwa jabatan guru adalah jabatan profesi dan guru memiliki kemampuan tertentu ia akan menjadi profesional dalam pekerjaannya.

Guru merupakan jabatan profesional, sehingga memerlukan profesionalitas yang tinggi. Profesional adalah orang yang terampil, andal dan sangat

⁵ Muhammad Anwar, *op.cit.*, h. 25-26.

⁶ Amini. 2013. *Profesi Keguruan*. Medan:Perdana Publishing, h. 38.

⁷ Amini, *op.cit.*, h. 38-39.

bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya. Jabatan guru dikenal sebagai suatu pekerjaan profesional sebagaimana seorang menilai bahwa dokter, insinyur, ahli hukum dan sebagainya sebagai profesi tersendiri maka guru pun adalah suatu profesi tersendiri. Pekerjaan ini tidak bisa dikerjakan oleh sembarangan orang tanpa memiliki keahlian khusus sebagai guru, banyak orang pandai berbicara tertentu Namun orang demikian belum dapat disebut sebagai seorang guru.⁸

Pekerjaan guru adalah suatu profesi tersendiri, pekerjaan ini tidak dapat dikerjakan oleh sembarangan orang tanpa memiliki keahlian sebagai seorang guru. Guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan terhadap anak didik, jadi seseorang yang mengabdikan diri kepada masyarakat dan tentunya guru memiliki tanggung jawab dan melaksanakan proses belajar mengajar di tempat-tempat tertentu. Jadi, seorang guru adalah orang yang benar-benar terjadi dan terlatih dengan baik serta memiliki pengalaman yang kaya di bidangnya masing-masing. Terdiri dan terlatih di sini bukan hanya memperoleh pendidikan formal tetapi juga harus menguasai berbagai strategi atau teknik di dalam kegiatan belajar mengajar serta menguasai landasan-landasan pendidikan yang tentunya juga akan memenuhi beberapa persyaratan atau kriteria sehingga dikatakan benar-benar terdidik dan terlatih.⁹

Guru bermakna sebagai pendidik profesional yang memiliki tugas utama sebagai pendidik, mengajar, membimbing dan mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik. Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, menengah dan pendidikan anak usia dini dalam lembaga pendidikan formal yang dianggap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kedudukan guru sebagai tenaga profesional dimaksudkan untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran dalam meningkatkan mutu pendidikan.¹⁰

Profesi guru bukan pekerjaan yang ringan melainkan profesi yang cukup berat karena memiliki tugas ganda yakni harus memiliki keahlian

⁸ Inom Nasution dan Nurabdiah Pratiwi. 2017. *Profesi Kependidikan*. Jakarta: Kencana, h. 5-8.

⁹ Inom Nasution dan Nurabdiah Pratiwi, *op.cit.*, h. 8-9.

¹⁰ Inom Nasution dan Nurabdiah Pratiwi, *op.cit.*, h. 9-10.

dalam bidang pendidikan dan keahlian dalam bidang studi yang diajarkan. Oleh karena itu profesi guru seharusnya mendapat perlindungan hukum untuk menjamin agar pelaksanaannya tidak merugikan berbagai pihak yang membutuhkan jasa guru secara profesional.¹¹

Berikut beberapa karakteristik yang harus dipenuhi seseorang sehingga sesuatu yang dikerjakan tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah profesi:

a. Sumber pendapatan utama

Suatu jabatan dikatakan bisa memenuhi suatu profesi sudah tentunya adalah apabila ia dilakukan karena menjadi sumber pendapatan utama bagi pemenuhan kebutuhan hidup. Karena na dilakukan terhadap pekerjaan ini. Semakin baik dan optimal sesuatu itu dilakukan maka semakin besar pula peluang peningkatan penerimaan pendapatan.

b. Curahan waktu kerja terbesar

Esensi dari karakteristik profesi sebagai pekerjaan utama di atas adalah curahan waktu kerja terbesar berada pada aktivitas yang menjadi sumber pendapatan utama. Seorang guru yang profesional misalnya akan mencurahkan waktu kerja yang terbesar pada aktivitas dan kegiatan yang berhubungan dengan profesinya sebagai guru seperti mempersiapkan bahan dan materi, mengoreksi latihan dan memperdalam cara dan strategi baru dalam mengajar bukan pada pekerjaan yang lain.

c. Keahlian dan kompetensi khusus

Suatu profesi tertentu memiliki keahlian dan kompetensi tertentu pula termasuk guru sebagai profesi. Keahlian seorang guru terkait dengan kemampuannya dalam mengajar, mendidik, membimbing dan mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik. Adapun kompetensi dari seorang guru profesional berhubungan dengan penguasaan materi atau bahan ajar, perencanaan program proses belajar mengajar, penggunaan media dan sumber pembelajaran, dan lain lain.

d. Pendidikan dan Pelatihan khusus

Untuk mendapatkan keahlian dan kompetensi khusus dari Suatu

¹¹ Inom Nasution dan Nurabdiah Pratiwi, *op.cit.*, h. 11. 152-154.

profesi diperlukan pula suatu Pendidikan dan Pelatihan khusus. Seorang calon guru harus menyelesaikan pendidikan Strata 1 yang berhubungan dengan isi dan substansi yang akan diajarkan seperti sosiologi, sejarah dan matematika. Setelah itu dia harus mengikuti pendidikan keprofesian sebagai guru di lembaga yang direkomendasikan menurut aturan perundangan.

e. *Standardisasi*

Keahlian dan kompetensi memerlukan standar. Melalui standar setiap profesional bisa diuji atau dinilai keahlian dan kompetensi yang dimilikinya. Dalam profesi guru, *standardisasi* dilakukan melalui sertifikasi guru.

f. Organisasi dan kode etik profesi

Setiap profesi memiliki organisasi dan kode etik profesi. Guru di Republik ini memiliki organisasi profesi yang bernama Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI.¹²

C. PERANAN GURU

Guru dan pekerjaannya adalah menyatu dalam proses pendidik, pelatih dan pembimbing. Artinya bahwa guru akan dapat dilihat eksistensinya sebagai seorang guru ketika ia menampilkan pekerjaannya, akan tetapi juga bahwa semua hal yang dilakukan sebagai sumber pekerjaan akan terkait dengan identitasnya sebagai guru.¹³

1. Fungsi Manifes

Fungsi manifes merupakan berbagai konsekuensi dari praktik kultural yang disengaja atau disadari, membantu penyesuaian atas adaptasi sistem. Fungsi yang diharapkan, disengaja dan disadari dari guru oleh masyarakat pada suatu ruang terdiri dari:

- a. Guru sebagai pengajar
- b. Guru sebagai pendidik

¹² Inom Nasution dan Nurabdiah Pratiwi, *op.cit.*, h. 11.

¹³ Amini, *op.cit.*, h. 78.

- c. Guru sebagai teladan
- d. Guru sebagai motivator

2. Fungsi laten

Fungsi laten merupakan berbagai konsekuensi dari praktik kultural yang tidak disengaja atau tidak disadari, membantu penyesuaian atau adaptasi sistem. Fungsi yang tidak diharapkan, tidak disengaja dan tidak disadari dari guru terhadap masyarakat pada suatu ruang terdiri dari:

- a. Guru sebagai pelabel
- b. Guru sebagai penyambung lidah kelas menengah atas
- c. Guru sebagai status quo.¹⁴

Guru merupakan faktor utama dan berpengaruh terhadap proses belajar siswa. Dalam pandangan siswa guru memiliki otoritas bukan saja otoritas dalam bidang akademis melainkan juga bidang non akademis karena itu pengaruh guru terhadap para siswanya sangat besar dan sangat menentukan.¹⁵ Banyak peranan yang diperlukan dari guru sebagai pendidik. Menurut Syaiful Bahri Djamarah peranan guru ialah:

1. Korektor, sebagai korektor guru harus bisa membedakan mana nilai yang baik dan yang buruk. Semua nilai yang baik harus guru pertahankan dan semua nilai yang buruk harus disingkirkan dari jiwa dan watak peserta didik.
2. Inspirator, guru harus dapat memberikan *inspirasi* bagaimana belajar yang baik bagi peserta didik.
3. Informator, sebagai informator guru harus dapat memberikan informasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selain sejumlah mata pelajaran yang telah diprogramkan dalam kurikulum.
4. Organisator, dalam bidang ini guru memiliki kegiatan pengelolaan akademik, menyusun tata tertib sekolah, menyusun kalender akademik,

¹⁴ Damsar, *op.cit.*, h. 159-160.

¹⁵ Muhammad Anwar. 2018. *Menjadi Guru Profesional*. Jakarta: Prenadamedia Group, h. 15.

- dan sebagainya. Semua diorganisasikan sehingga dapat mencapai efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan belajar peserta didik.
5. Motivator, sebagai motivator guru hendaknya mendorong anak didik agar bergairah dan aktif belajar. Dalam upaya memberikan motivasi, guru dapat menganalisis motif-motif yang melatarbelakangi anak didik malas belajar dan menurun prestasinya di sekolah.
 6. Inisiator, dalam peranannya sebagai inisiator, guru harus dapat menjadi pencetus ide-ide kemajuan dalam pendidikan dan pengajaran. Proses interaksi edukatif yang ada sekarang harus diperbaiki sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pendidikan.
 7. Fasilitator, sebagai fasilitator guru hendaknya dapat menyediakan fasilitas yang memungkinkan kemudahan kegiatan belajar anak didik.
 8. Pembimbing, peranan ini harus lebih dipentingkan, karena kehadiran guru di sekolah adalah untuk membimbing anak didik menjadi manusia dewasa susila yang cakap. Tanpa bimbingan, anak didik akan mengalami kesulitan menghadapi perkembangan dirinya.
 9. Demonstrator, untuk materi pelajaran yang sukar dipahami anak didik guru dapat memperagakan apa yang diajarkan secara didaktis, sehingga apa yang guru inginkan sejalan dengan pemahaman anak didik.
 10. Pengelola Kelas, guru hendaknya dapat mengelola kelas dengan baik, karena kelas ialah tempat terhimpunnya anak didik dan guru dalam rangka menerima bahan pelajaran dari guru. Kelas yang dikelola dengan baik akan menunjang jalannya interaksi edukatif.
 11. Mediator, guru hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media pendidikan dalam berbagai bentuk dan jenisnya, baik media nonmaterial maupun materiil. Media berfungsi sebagai alat komunikasi guru mengefektifkan proses interaksi edukatif.
 12. Supervisor, sebagai supervisor guru hendaknya dapat membantu, memperbaiki, dan menilai secara kritis terhadap proses pengajaran. Teknik-teknik supervisi harus guru kuasai dengan baik agar dapat melakukan perbaikan terhadap situasi belajar-mengajar menjadi lebih baik.

13. Evaluator, sebagai evaluator guru dituntut untuk menjadi seorang evaluator yang baik dan jujur. Sebagai evaluator guru tidak hanya menilai produk atau hasil pengajaran. Dari kedua kegiatan ini akan dilakukann umpan balik tentang pelaksanaan interaksi edukatif yang telah dilakukan.¹⁶

D. HUBUNGAN GURU-MURID

Hubungan guru dan murid sangat besar pengaruhnya pada proses dan hasil yang akan dicapai. Hubungan dimaksudkan dalam hal ini adalah pola interaksi yang dapat dilakukan sebagai upaya meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan pembinaan sikap murid. Dalam tugas sehari-hari guru dan murid setiap saat akan selalu berinteraksi. Interaksi ini dapat direncanakan, dikembangkan dan juga dievaluasi.¹⁷

Adanya suatu kemajuan proses interaksi edukatif antara pendidik dan anak didik lebih ditentukan kompetensi pendidik dalam proses pembelajaran. Pendidik sebagai pengembang kurikulum di kelas memiliki peranan terdepan terhadap pembelajaran di kelas. Interaksi edukatif antara pendidik dan anak didik ditunjukkan pola adanya interaksi timbal balik. Thomas Gordon, menuturkan bahwa keterampilan-keterampilan berkomunikasi yang diperlukan pendidik agar lebih efektif dalam berinteraksi edukatif, dalam menciptakan mata rantai dan dalam membangun jembatan penghubung antara pendidik dan anak didik. Keterampilan berkomunikasi yang diperlukan tidak terlalu kompleks dan tidak sulit bagi pendidik untuk mengerti kendatipun memerlukan latihan dan adanya motivasi ingin maju dan sukses dalam keterampilan berkomunikasi.¹⁸

Interaksi edukatif antara pendidik dan anak didik yang diharapkan dapat tercapai dengan optimal apabila adanya kesadaran pendidik bahwa tugas mulia dalam mengajar dan mendidik anak itu sifatnya komprehensif. Melaksanakan tugas sebagai pendidik haruslah dipahami sebagai tugas

¹⁶ Syaiful Bahri Djamarah. 2010. *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif: Suatu Pendekatan Teoritis Psikologis*. Jakarta: Rineka Cipta, h. 43-47.

¹⁷ Amini, *op.cit.*, h. 137.

¹⁸ Abdullah Idi. 2011. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers, h. 133.

mencerdaskan anak didik yang memerlukan keteladanan baik di dalam maupun di luar sekolah.¹⁹

Menjadi seorang pendidik yang efektif dalam proses pembelajaran yang mengedepankan interaksi edukatif diperlukan cara-cara membangun berdasarkan kegiatan edukatif fundamental dalam rutinitas proses pembelajaran. Hal ini dimaksudkan seorang pendidik perlu menyadari atas pentingnya ketekunan, keikhlasan dan ketabahan dalam menjalankan tugas dan meniti karir sebagai pendidik. Produk final dari interaksi edukatif di sekolah dan di luar sekolah adalah menginginkan keberhasilan anak didiknya. Sukses tidaknya anak didik lebih ditentukan oleh kualitas seorang pendidik.²⁰

S. Nasution dalam bukunya *Sosiologi Pendidikan* menjelaskan bahwa hubungan antara guru dan murid mempunyai sifat yang relatif stabil.

1. Ciri khas dari hubungan ini adalah bahwa terdapat status yang sama antara guru dan murid. Guru itu secara umum diakui mempunyai status yang lebih tinggi dan karena itu dapat menuntut murid untuk menunjukkan kelakuan yang sesuai dengan sifat hubungan itu. Bila anak itu meningkat sekolahnya ada kemungkinan ia mendapat kedudukan yang lebih tinggi dan sebagai siswa pascasarjana ia dapat diperlakukan sebagai manusia yang matang dan dewasa, jadi banyak sedikit dengan status yang dekat status dosen. Namun hubungan guru-murid dari masa sebelumnya masih melekat dan masih susah dihilangkan, Setidaknya di negara kita ini. Guru atau dosen banyak sedikit masih turut berkuasa atas nasib siswa dan selalu dapat berlindung di belakang posisinya yang berkuasa itu.
2. Dalam hubungan guru-murid biasanya hanya murid diharapkan mengalami perubahan kelakuan sebagai hasil belajar. Setiap orang yang mengajar akan mengalami perubahan dan menambah pengalamannya, akan tetapi ia tidak diharuskan atau diharapkan menunjukkan perubahan kelakuan, sedangkan murid harus memperlihatkan dan membuktikan bahwa ia telah mengalami perubahan kelakuan.
3. Aspek ketiga ini bertalian dengan aspek kedua yakni bahwa perubahan

¹⁹ Abdullah Idi, *op.cit.*, h. 133.

²⁰ Abdullah Idi, *op.cit.*, h. 133.

kelakuan yang diharapkan mengenai hal-hal tertentu yang lebih spesifik misalnya agar anak menguasai bahan pelajaran tertentu. Mengenai hal-hal yang umum, yang kabur, yang tidak mudah tercapai kesamaan pendapat misalnya Apakah guru harus menunjukkan cinta kasih kepada murid, Apakah yang harus bertindak sebagai orang tua atau sebagai sahabat. Karena sifat tak sama dalam kedudukan guru murid maka sukar bagi guru untuk mengadakan hubungan akrab. Demi hasil belajar yang diharapkan diduga guru itu harus dihormati dan dapat memelihara jarak dengan murid agar dapat berperan sebagai modal bagi muridnya.

Guru akan lebih banyak mempengaruhi kelakuan murid bila dalam memberi pelajaran dalam kelas hubungan itu tidak sepihak seperti terdapat dalam metode ceramah, akan tetapi hubungan interaktif dengan partisipasi yang sebanyak-banyaknya dari pihak murid. Hubungan itu akan lebih efektif dalam kelas yang kecil daripada di kelas yang besar.²¹

E. SERTIFIKASI GURU

1. Landasan

Dasar utama pelaksanaan sertifikasi adalah:

- a. Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen yang disahkan tanggal 30 Desember 2005.
 - 1) Pasal yang menyatakan adalah pasal 8 yakni guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
 - 2) Pasal lainnya adalah pasal 11 ayat 1 yang menyebutkan bahwa sertifikat pendidik sebagaimana dalam pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan.
- b. Landasan hukum lainnya adalah undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional

²¹ S. Nasution. 2004. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, h. 78-79.

- c. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 tahun 2007 tentang sertifikasi bagi guru dalam jabatan yang ditetapkan pada 4 Mei 2007.²²

2. Pengertian sertifikasi

Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. Sertifikasi pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Berdasarkan pengertian tersebut sertifikasi guru dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian pengakuan bahwa seseorang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu, setelah lulus mengikuti ujian kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi. Dengan kata lain sertifikasi guru adalah proses uji kompetensi yang dirancang untuk mengungkapkan penguasaan kompetensi seseorang sebagai landasan pemberian sertifikat pendidik. Sertifikasi bagi guru dalam jabatan dilakukan oleh lembaga LPTK yang terakreditasi dan ditetapkan pemerintah. Pelaksanaan sertifikasi bagi guru dalam jabatan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 tahun 2007 yakni dilakukan dalam bentuk portofolio.²³

3. Tujuan sertifikasi guru

Dalam kaitannya dengan membantu meningkatkan kualitas pendidik, sertifikasi pendidik memiliki beberapa tujuan diantaranya adalah sebagai berikut:

Menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan Nasional.

- a. Meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan.
- b. Meningkatkan martabat guru.
- c. Meningkatkan profesionalitas guru.²⁴

4. Manfaat sertifikasi guru

Adapun manfaat uji sertifikasi guru adalah sebagai berikut:

²² Inom Nasution dan Nurabdiah Pratiwi, *op.cit.*, h. 14.

²³ Inom Nasution dan Nurabdiah Pratiwi, *op.cit.*, h. 14.

²⁴ Inom Nasution dan Nurabdiah Pratiwi, *op.cit.*, h. 14.

- a. Melindungi profesi guru dari praktik-praktik layanan pendidikan yang tidak kompeten sehingga dapat merusak etika profesi guru itu sendiri.
- b. Melindungi masyarakat dari praktik praktik pendidikan yang tidak berkualitas dan profesional yang akan dapat menghambat upaya peningkatan kualitas pendidikan dan penyiapan sumber daya manusia di negeri ini.
- c. Menjadi wahana penjaminan mutu bagi LPTK yang bertugas mempersiapkan calon guru dan juga berfungsi sebagai kontrol mutu bagi pengguna layanan pendidikan.
- d. Menjaga lembaga penyelenggaraan pendidikan dari keinginan internal dan tekanan eksternal yang potensial dapat menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- e. Memperoleh tunjangan profesi bagi guru yang lulus ujian sertifikasi sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan guru.²⁵

5. Prinsip-prinsip sertifikasi guru

Pelaksanaan sertifikasi memiliki beberapa prinsip yang harus diperhatikan yaitu:

- a. Dilaksanakan secara objektif, transparan dan akuntabel
 - 1) **Objektif** yaitu mengajak kepada proses pemerolehan sertifikat pendidik yang impartial, tidak diskriminatif dan memenuhi standar pendidikan nasional.
 - 2) **Transparan** yaitu mengacu kepada proses sertifikasi yang memberikan peluang kepada para pemangku kepentingan pendidikan untuk memperoleh akses informasi tentang proses dan hasil sertifikasi.
 - 3) **Akuntabel** yaitu proses ratifikasi yang dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan pendidikan secara administratif, finansial dan akademik.

²⁵ Inom Nasution dan Nurabdiah Pratiwi, *op.cit.*, h. 14.

- b. Berujung pada peningkatan mutu pendidikan nasional melalui peningkatan guru dan kesejahteraan guru.
Sertifikasi guru merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu guru yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan guru. Guru yang telah lulus uji sertifikasi guru akan diberi tunjangan profesi sebesar 1 kali gaji pokok sebagai bentuk upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru. Tunjangan tersebut berlaku bagi guru yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil maupun bagi guru yang berstatus non Pegawai Negeri Sipil. Dengan peningkatan mutu dan kesejahteraan guru maka diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan.
- c. Dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Program sertifikasi pendidik dilaksanakan dalam rangka memenuhi amanat undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan.
- d. Dilaksanakan secara terencana dan sistematis
Agar pelaksanaan program sertifikasi dapat berjalan dengan efektif dan efisien harus direncanakan secara matang dan sistematis. Sertifikasi mengacu kepada kompetensi guru dan standar kompetensi guru. Kompetensi guru mencakup empat kompetensi pokok yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, Kompetensi sosial dan kompetensi profesional. Sedangkan standar kompetensi guru mencakup kompetensi inti guru yang kemudian dikembangkan menjadi kompetensi guru TK, guru SD dan guru mata pelajaran. Untuk memberikan sertifikat pendidik kepada guru perlu dilakukan uji kompetensi melalui penilaian portofolio.
- e. Jumlah peserta sertifikasi guru ditetapkan oleh pemerintah
Untuk alasan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan sertifikasi guru serta penjaminan kualitas hasil sertifikasi jumlah peserta pendidikan profesi dan uji kompetensi setiap tahunnya ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan jumlah yang ditetapkan pemerintah

tersebut maka disusunlah kuota guru peserta sertifikasi untuk masing-masing provinsi dan kabupaten. Penyusunan dan penetapan kuota tersebut didasarkan atas jumlah data individu guru per kabupaten atau kota yang masuk di pusat dan data Direktorat Jenderal peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan.²⁶

F. PROFESIONALISME GURU DAN GLOBALISASI

Sejumlah kecenderungan dan tantangan globalisasi yang harus diantisipasi pendidik dengan pentingnya mendepankan profesionalisme ialah:

1. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat dan mendasar

Dengan kondisi ini seorang pendidik diharapkan dapat menyesuaikan diri dengan responsif, arif dan bijaksana. Responsif artinya pendidik harus bisa menguasai dengan baik produk Iptek terutama yang berkaitan dengan dunia pendidikan seperti pembelajaran dengan menggunakan multimedia. Tanpa penguasaan Iptek yang baik pendidikan tertinggal dan menjadi korban Iptek.

2. Krisis moral

Krisis Moral yang melanda bangsa dan negara Indonesia akibat pengaruh Iptek dan globalisasi telah menjadi pergeseran nilai-nilai yang ada dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai tradisional yang sangat menjunjung tinggi moralitas bisa saja dapat bergeser seiring dengan pengaruh iptek dan globalisasi. Di kalangan remaja sangat begitu terasa akan pengaruh iptek dan globalisasi. Pengaruh hiburan baik berasal dari media cetak maupun media elektronik yang menjurus pada hal-hal pornografi telah menjadikan sebagai remaja tergoda dalam suatu pilihan kehidupan yang menjurus pada pergaulan bebas dan materialisme. Mereka sebenarnya hanya menjadi korban dari globalisasi yang selalu menuntut kepraktisan, kesenangan belaka dan budaya cepat saji.

²⁶ Inom Nasution dan Nurabdiah Pratiwi, *op.cit.*, h. 14.

3. Krisis Sosial

Krisis sosial seperti kriminalitas, kekerasan, pengangguran dan kemiskinan yang terjadi dalam masyarakat dunia. Akibat perkembangan industri dan kapitalisme maka muncul masalah masalah sosial yang ada dalam masyarakat. Tidak semua lapisan sosial bisa mengikuti dan menerima dunia industri dan kapitalisme. Mereka yang lemah secara pendidikan, akses dan ekonomi akan menjadi korban ganasnya industrialisasi dan kapitalisme. Ini merupakan tantangan bagi guru dalam merespon realitas ini terutama dalam kaitannya dengan dunia pendidikan. Sekolah sebagai lembaga pendidikan yang formal dan sudah mendapat kepercayaan dari masyarakat harus menghasilkan peserta didik yang siap hidup dalam kondisi dan situasi bagaimanapun. Dunia pendidikan harus menjadi solusi dari suatu masalah sosial bukan menjadi bahkan penyebab dari masalah sosial tersebut.

4. Krisis identitas sebagai bangsa

Sebagai bangsa dan negara di tengah bangsa lain di dunia membutuhkan identitas kebangsaan yang tinggi dari warga negara Indonesia. Semangat nasionalisme dibutuhkan tetap eksis nya bagi bangsa dan negara Indonesia. Nasionalisme yang tinggi dari warga negara akan mendorong jiwa positif dan terbaik untuk bangsa dan negara. Dalam dekade terakhir ada kecenderungan menipisnya jiwa nasionalisme di kalangan generasi muda. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator seperti kurangnya apresiasi generasi muda terhadap kebudayaan asli bangsa Indonesia, pola dan gaya hidup remaja yang ke barat-baratan dan beberapa indikator lainnya. Melihat realitas perilaku generasi muda ini, pendidik sebagai penjaga nilai-nilai termasuk nilai nasionalisme harus mampu memberikan kesadaran kepada generasi muda akan pentingnya jiwa nasionalisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak semua nilai-nilai Global harus diterima dan tidak semua nilai-nilai tradisional bangsa harus ditinggalkan. Misalnya, nilai-nilai bangsa yang mengedepankan musyawarah, kerjasama, gotong royong dan saling membantu tetap relevan dalam menyelamatkan Generasi masa datang di tengah kehidupan pada era globalisasi yang membawa nilai-nilai sebaliknya.

5. Adanya Perdagangan Bebas

Adanya perdagangan bebas baik di tingkat ASEAN, Asia Pasifik maupun

dunia. Kondisi ini membutuhkan kesiapan yang matang terutama dari segi sumber daya manusia. Indonesia kedepan membutuhkan sumber daya manusia yang handal dan unggul yang siap bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Dunia pendidikan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Dibutuhkan pendidik yang visioner, kompeten, berdedikasi tinggi dan berkomitmen agar mampu membekali peserta didik, dengan sejumlah kompetensi yang diperlukan dalam kehidupan di tengah masyarakat yang sedang dan terus berubah.²⁷

²⁷ Abdullah Idi, *op.cit.*, h. 235-236.

BAB VI

NILAI DAN NORMA DALAM PENDIDIKAN

A. KONSEP NILAI DAN NORMA SOSIAL

1. Nilai Sosial

a. Pengertian Nilai Sosial

Nilai berasal dari bahasa latin *vale're* yang artinya berguna mampu akan berdaya berlaku sehingga nilai diartikan sebagai sesuatu yang dipandang baik bermanfaat dan paling benar menurut keyakinan seseorang atau sekelompok orang. Nilai adalah kualitas suatu hal yang menjadikan hal itu disukai, diinginkan, dikejar, dihargai, berguna dan dapat membuat orang yang menghayatinya menjadi bermartabat.¹

Nilai adalah ukuran atau standar untuk menghukum dan memilih tindakan dan tujuan tertentu.² Nilai adalah sesuatu yang baik, yang selalu diinginkan, dicita-citakan dan dianggap penting oleh seluruh manusia sebagai anggota masyarakat. Karena itu, sesuatu dikatakan memiliki nilai apabila berharga (nilai kebenaran), indah (nilai estetika), baik (nilai moral atau etis), religius (nilai agama).³

Nilai sosial adalah nilai-nilai kolektif yang dianut oleh masyarakat

¹ Sutarjo Adisusilo. 2014. *Pembelajaran Nilai Karakteristik*. Jakarta: Rajawali Pers, h. 56.

² Sidi Gazalba, *op.cit.*, h. 17.

³ Elly M. Setiadi, H. Kama A. Hakim dan Ridwan Efendi. 2008. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Jakarta: Kencana, h. 31.

kebanyakan. Nilai-nilai sosial merupakan hal yang dituju oleh kehidupan sosial itu sendiri, sedangkan metode pencapaian nilai-nilai sosial tersebut adalah norma, sehingga fungsi norma sosial adalah sebagai petunjuk atau arahan tentang cara untuk mencapai nilai tersebut.

b. Macam-macam Nilai

Notonegoro, membedakan nilai menjadi 3 macam yaitu:

- 1) **Nilai material** yaitu berbagai konsepsi tentang segala sesuatu yang berguna bagi jasmani manusia. Misalnya nilai tentang baik buruknya atau harga suatu benda yang diukur dengan alat ukur tertentu seperti uang atau benda-benda berharga lainnya. Misalnya tipe rumah akan dinilai layak atau tidak layak, baik atau buruk tergantung bagaimana corak dan tipenya, corak dan bentuk perhiasan yang dikenakan oleh para wanita, baju, mobil dan peralatan hidup lainnya.
- 2) **Nilai vital** yaitu meliputi berbagai konsepsi yang berkaitan dengan segala sesuatu yang berguna bagi manusia dalam melaksanakan berbagai aktivitas. Suatu benda akan dinilai dari daya guna yang dimiliki oleh benda tersebut misalnya pasir akan bernilai karena digunakan untuk membuat konstruksi bangunan tetapi ketika pasir berada di gurun pasir tentu tidak bernilai sebab disana pasir tidak berguna. Contoh lain seperti batu di gunung yang dianggap tidak bernilai akan memiliki nilai jika dibawa ke kota sebab digunakan untuk kepentingan pembangunan dan sebagainya.
- 3) **Nilai kerohanian** yakni berbagai konsepsi yang berkaitan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan rohani manusia seperti:
 - a) **Nilai kebenaran** yang bersumber pada rasio atau akal manusia misalnya sesuatu itu dianggap benar atau salah karena akal manusia memiliki kemampuan untuk memberikan penilaian.
 - b) **Nilai keindahan** yang bersumber pada unsur perasaan misalnya daya tarik suatu benda sehingga nilai yang daya tarik atau pesona yang melekat pada benda tersebut lah yang dihargai.
 - c) **Nilai moral** yang bersumber pada unsur kehendak terutama pada tingkah laku manusia antara penilaian perbuatan yang

dianggap baik atau buruk, kuliah atau hina, menurut tatanan yang berlaku di dalam kelompok sosial tersebut.

- d) **Nilai keagamaan** yang bersumber pada kitab suci atau Wahyu Tuhan.⁴

2. Norma Sosial

a. Pengertian Norma Sosial

Norma sosial ialah laku perbuatan yang standar yang sama-sama dipegangi oleh anggota-anggota masyarakat dan mereka dituntut untuk mematuhi.⁵

Lebih spesifik dari nilai-nilai adalah norma sosial baik yang bersifat formal dan tertulis maupun informal yang tak tertulis. Norma-norma ini akan menjabarkan nilai-nilai ini lebih terperinci ke dalam bentuk Tata aturan atau tata kelakuan yang secara makro adalah konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah, Konvensi dan aturan tak tertulis lainnya. Misalnya Demokrasi adalah nilai yang penjabarannya melalui norma adalah berupa mekanisme demokrasi itu sendiri misalnya adanya prosedur pemilihan pemimpin suatu negara melalui pemilihan umum. Jika nilai-nilai yang abstrak, moralistik, status itu ingin dijadikan motivasi perilaku manusia dan masyarakat maka nilai-nilai itu haruslah dijabarkan. Bentuk penjabaran nilai-nilai yang dinamakan norma. Norma-norma yang formal atau tertulis maupun norma yang informal tidak tertulis merupakan cermin dari nilai-nilai yang mencoba mengatur perilaku individu dan masyarakat dalam situasi sosial tertentu. Norma formal tertulis adalah peraturan tertulis yang disusun dalam bentuk undang-undang dasar, undang-undang dan peraturan lainnya yang lebih konkrit. Adapun norma informal tak tertulis adalah peraturan yang berupa perintah, anjuran dan larangan yang tetap terpelihara dan dilaksanakan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan karena keberadaannya dianggap memiliki manfaat bagi terciptanya ketertiban sosial.⁶

⁴ Elly M. Setiadi dan Usman Kolip. 2007. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Kencana Prenada media grup, h. 124-125.

⁵ Sidi Gazalba. 1993. *Islam dan Perubahan Sosiobudaya*. Jakarta: Alhusna, h. 17.

⁶ Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *op.cit.*, h. 129.

b. Norma moral

Norma moral berarti aturan bagi kelakuan atau tindakan dan sekaligus ukuran Apakah seseorang itu baik atau tidak baik bagi manusia. Norma moral yang berlaku di masyarakat diantaranya:

- 1) Norma agama
- 2) Norma kesopanan
- 3) Norma kesusilaan
- 4) Norma hukum.⁷

c. Macam-macam Norma Sosial

Proses pertumbuhan normal dapat dilihat dari pola pola kebiasaan berupa sanksi yang dijatuhkan pada para pelanggarnya. Masing-masing pengertian tersebut memiliki dasar yang sama yaitu norma-norma sosial memiliki fungsi yang sama sebagai petunjuk arah bagi tingkah laku di dalam kehidupan sosial. Proses ini dikelompokkan dalam empat macam akan tetapi oleh sosiologi ditambah lagi menjadi satu yaitu hukum sehingga keberadaannya menjadi 5 macam.

- 1) Cara (*usage*)

Merupakan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku sebagai produk dari hubungan sosial antar individu di dalam masyarakat yang tidak mengakibatkan sanksi yang berat bagi pelanggarnya. Contoh dalam kehidupan kebiasaan makan bersama dengan tata cara makan yang tidak boleh mengeluarkan Bunyi atau suara suara kecepatan makan maka jika ada seseorang anggota melakukan pelanggaran dengan mengeluarkan bunyi kecapan diwaktu makan maka ia akan ditegur oleh pihak lain.

- 2) Kebiasaan (*folksway*)

Merupakan aktivitas yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama karena dirasakan kebiasaan itu dianggap baik, enak dirasakan ada manfaatnya dan sebagainya sehingga banyak orang yang menyukainya. Contoh kebiasaan menghormati orang

⁷ Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *op.cit.*, h. 132-133.

lain yang dianggap lebih tua, jika kebiasaan itu dilanggar oleh pihak-pihak tertentu maka pelanggar dianggap telah melakukan penyimpangan atas kebiasaan yang berlaku.

3) Tata kelakuan (*mores*)

Mores mencerminkan sifat-sifat yang hidup dari kelompok manusia yang dilaksanakan sebagai alat pengawas baik secara sadar maupun tidak sadar oleh masyarakat terhadap para anggotanya. Tata kelakuan sudah menempati posisi yang kuat di mana satu pihak memiliki kekuatan memaksa di pihak lain memiliki kekuatan melarang atau suatu perbuatan para anggotanya sehingga secara langsung merupakan alat agar anggota masyarakat yang ada didalamnya menyesuaikan perbuatannya dengan tata kelakuan tersebut.

4) Adat istiadat (*customs*)

Adat istiadat pola-pola kelakuan yang tidak tertulis tetapi memiliki kekuatan mengikat kepada para anggotanya sehingga bagi yang melanggar adat istiadat tersebut akan menderita sanksi yang keras yang kadang-kadang jatuhnya sanksi tersebut tidak secara langsung.

5) Hukum (*laws*)

Hukum merupakan tata kelakuan sosial yang dibuat secara formal dengan sanksi yang tegas bagi pelanggarnya misalnya para Pengendara kendaraan bermotor harus membawa SIM dan kelengkapan surat lainnya bila ada seorang pengemudi yang tidak membawa SIM ketika tertangkap polisi maka ia akan dikenakan sanksi dan sebagainya.⁸

B. PERBEDAAN DAN KAITAN NORMA DAN NILAI SOSIAL

Nilai dan norma memiliki hubungan yang saling terkait, kendati keduanya memiliki perbedaan. Jika nilai merupakan sesuatu yang dianggap sebagai hal yang baik, patut, layak, benar, maka norma merupakan perwujudan dari nilai yang didalamnya terdapat kaidah, aturan, patokan, atau kaidah pada suatu tindakan. Bagi orang yang melanggar norma maka ia akan mendapat sanksi atau hukuman oleh masyarakat yang berupa digosipkan, ditegur, dimarahi, diancam hingga sampai pada hukuman yang diberikan

⁸ Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *op.cit.*, h. 136-138.

oleh negara melalui aparat hukum. Dengan demikian, norma merupakan petunjuk, kaidah atau aturan untuk berbuat atau berperilaku yang dibenarkan untuk mewujudkan nilai atau tujuan tersebut. Dengan kata lain, norma merupakan cara kelakuan sosial yang disetujui oleh nilai tersebut sehingga setiap pola perilaku yang telah dijadikan sebagai norma mengandung unsur pembenaran artinya perbuatan yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang dengan cara tertentu tersebut akan dibenarkan oleh banyak pihak jika perbuatan tersebut mengandung kebaikan, memiliki daya ikat memaksa yang berpedoman pada pemikiran bahwa hal itu baik, benar, patut, layak sehingga memiliki kekuatan memaksa pada setiap orang dalam kelompok. Dengan demikian, alat pembenar dari tindakan adalah nilai-nilai yang telah lama disepakati oleh publik dalam kehidupan sosial tersebut.

Untuk menjaga agar nilai-nilai di dalam kehidupan sosial tersebut bisa bertahan maka disusunlah norma-norma yang memiliki kekuatan untuk menjaganya. Dengan begitu, untuk pelanggaran terhadap norma juga berarti pelanggaran terhadap nilai. Berdasarkan kenyataan inilah maka nilai dan norma yang dapat mendorong bahkan dapat menekan anggota masyarakat untuk mencapai dan memenuhi tujuan kehidupan sosial. Jadi nilai bagi kehidupan manusia merupakan dasar, alasan atau motivasi dalam segala perbuatan. Nilai merupakan sumber norma yang memiliki kekuatan mengikat bagi semua tingkah laku kelompok. Bagi para pelanggar akan mendapatkan sanksi baik sanksi moral hingga sanksi fisik. Sanksi moral misalnya dikucilkan dari pergaulan, digosipkan, dihina, dilecehkan, dimarahi, diusir dari komunitasnya dan sebagainya. Adapun sanksi fisik misalnya perlakuan dari kelompok yang berupa menyakiti, memenjarakan, menyiksa hingga membunuh dan sebagainya.⁹

Pada hakikatnya nilai dan norma tidak akan terpisahkan dari kehidupan sosial masyarakat misalnya di dalam keluarga terdapat kebiasaan anak mematuhi orang tuanya, seseorang yang mudah mematuhi saudaranya yang lebih tua atau masyarakat mematuhi petuah para sesepuh seperti ulama, tokoh masyarakat dan sebagainya. Pola-pola demikian adalah nilai. Nilai yang demikian ini termasuk nilai informal.

⁹ Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *op.cit.*, h. 136-138.

Adapun nilai formal terbentuk melalui mekanisme yang resmi misalnya Sekretaris Daerah di suatu Kabupaten dijabat oleh orang yang lebih tua usianya daripada Bupati jika menurut ketentuan informal orang yang lebih tua biasanya dihormati oleh orang yang lebih muda tetapi kenyataannya Bupati sering dipanggil dengan sebutan Bapak oleh Sekda yang usianya lebih muda dan seluruh perintah Bupati dipatuhi. Bentuk hubungan seperti ini merupakan nilai dan norma yang bersifat formal. Di dalam tata aturan formal yang dipandang bukan masalah tua atau muda akan tetapi lebih menekankan pada jabatan struktural sehingga sebutan bapak bagi Bupati dan ketaatan Sekda yang usianya lebih muda bukanlah karena faktor tatakrama komunal tetapi tatakrama resmi.¹⁰

Nilai sosial dan norma sosial merupakan sesuatu yang seringkali disamakan akan tetapi sebenarnya keduanya berbeda. Perbedaannya terletak pada orientasi bahwa nilai lebih merupakan sikap dan perasaan yang diperlihatkan oleh perorangan maupun kelompok masyarakat secara keseluruhan tentang baik buruk, benar salah, Suka tidak suka dan sebagainya terhadap objek tertentu baik secara material maupun secara imaterial.

Adapun norma orientasinya adalah aturan dalam kehidupan sosial secara kolektif atau bersama yang mengandung berbagai sanksi, baik sanksi secara moral maupun sanksi fisik, bagi orang atau kelompok orang yang melakukan pelanggaran atas nilai-nilai sosial. Adapun pemberlakuan atas norma ditujukan untuk menekan anggota masyarakat agar segala perbuatan atau perilaku yang dilakukannya tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang telah disepakati bersama. Dengan demikian antara nilai dan norma selalu bergandengan bagaikan dua sisi mata uang sehingga antara satu dan lainnya tidak dapat dipisah-pisahkan. Adapun keberadaan dari keduanya tidak lain adalah untuk mencapai cita-cita dalam kehidupan bersama.¹¹

¹⁰ Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *op.cit.*, h. 129.

¹¹ Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *op.cit.*, h. 129.

C. NORMA DAN NILAI DALAM PENDIDIKAN

1. Norma-norma Sosial dalam Situasi Belajar

Kegiatan belajar yang berpusat dalam ruang kelas hanya dapat berjalan lancar karena adanya pola-pola kebudayaan sekolah yang menentukan kelakuan yang diharapkan dari murid-murid dalam proses belajar mengajar.

Interaksi yang terus-menerus antara guru dengan murid mengharuskan masing-masing memahami norma-norma kelakuan serta syarat-syarat yang melambangkan norma-norma tertentu.

- a. Di sekolah-sekolah kita murid-murid tidak diperbolehkan bercakap-cakap dalam kelas atau
- b. Murid-murid tidak diperbolehkan berjalan mondar-mandir karena mengganggu Jalan pelajaran.
- c. Dengan syarat-syarat tertentu guru dapat menuntut ketentraman kelas dan meminta perhatian penuh akan pelajaran.
- d. Di sekolah-sekolah modern yang menjalankan disiplin yang “*permissive*” dan memberikan lebih banyak kebebasan terdapat norma-norma yang harus dipahami dan ditaati oleh semua.
- e. Tanpa disiplin kegiatan dapat berjalan baik. Pelanggaran akan terjadi bila isyarat-isyarat itu tidak dipahami atau tidak diterima baik oleh sebab komunikasi antara kedua belah pihak tidak serasi.

Norma-norma di sekolah juga harus memperhatikan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Guru harus memanfaatkan harapan-harapan orang tua dan menerapkannya dalam kelasnya dalam bentuk norma-norma. Sedapat mungkin norma-norma yang disarankan di sekolah tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dalam keluarga anak didik. Bila ini terjadi maka kesulitan dan salah paham akan timbul antara sekolah dengan orang tua. Dalam hal ini pribadi guru dan latar belakangnya turut menentukan cara menginterpretasikan norma-norma masyarakat ke dalam situasi kelas.¹²

¹² S. Nasution, *op.cit.*, h. 68-69.

2. Nilai-nilai yang dianut Sekolah

Pada umumnya nilai-nilai yang dianut di sekolah sejalan dengan yang berlaku dalam masyarakat sekitarnya. Anak-anak dikirim ke sekolah dengan tujuan agar mereka dididik menjadi manusia sesuai dengan cita-cita masyarakat. Untuk seluruh warga negara Indonesia berlaku Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa dan dasar negara. Dalam hal ini terdapat kesamaan bagi seluruh bangsa dan dengan demikian bagi seluruh masyarakat sekolah.

Ada pula norma-norma yang dianut oleh masyarakat tempat sekolah itu berada perlu diperhatikan oleh sekolah. Norma-norma yang diajarkan di sekolah tak boleh bertentangan dengan adat istiadat masyarakat sekitar. Antara sekolah dan masyarakat harus ada hubungan dan kesesuaian mengenai norma-norma dan nilai-nilai. Mungkin dalam hal ini ada perbedaan antara norma-norma kelakuan yang diajarkan di sekolah di berbagai daerah di negara kita yang tentunya tak boleh bertentangan dengan falsafah bangsa kita.

Nilai-nilai di sekolah juga ditentukan oleh guru-guru. Norma-norma kelakuan yang diajarkan oleh guru terdapat tiada menurut apa yang dianggapnya baik. Norma-norma itu mungkin banyak diperolehnya selama pendidikan sebagai guru. Oleh sebab lembaga mempunyai kurikulum nasional, besar kemungkinan guru-guru menganut norma-norma yang banyak persamaannya. Maka karena itu dapat diharapkan banyak kesamaan pada norma kelakuan yang diajarkan kepada anak-anak di seluruh negara kita.

Adanya Kanwil dan aparat inspeksi yang sama dasar dan tujuan kerjanya memperbesar kemungkinan adanya kesamaan antara norma yang diajarkan kepada anak-anak kita. Selain itu uniformitas kurikulum, upacara bendera dan peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh guru dan murid menambah kemungkinan bahwa norma-norma kelakuan anak yang secara formal dituntut dari semua anak banyak persamaannya.

Namun tak dapat disangkal adanya banyak sedikit perbedaan antara norma kelakuan dan suasana di sekolah masing-masing. Tiap-tiap sekolah mempunyai kepala sekolah, guru dan murid yang berbeda-beda. Tiap sekolah mempunyai tradisi tersendiri dan dapat mengeluarkan peraturan

menurut keperluan sekolah itu sendiri selama tidak melanggar peraturan yang lebih tinggi.

Ada pula nilai-nilai dan norma kelakuan yang berlaku di kalangan murid-murid sendiri. Murid-murid biasanya merasa dirinya kompak yakni bersatu padu terhadap murid-murid sekolah atau kelas lain bahkan juga kompak terhadap guru. Perkelahian dengan sekolah lain sering terjadi karena rasa kekompakan atau solidaritas ini. Bila salah seorang murid dihina atau ditantang menurut tafsiran mereka, maka seluruh kelas atau sekolah berdiri di belakangnya. Dalam hal ini mereka lebih dikuasai oleh emosi subjektif daripada pikiran rasional yang objektif. Teman sendiri selalu pada pihak yang benar dan sekolah lain sudah pasti pihak yang bersalah.

Dalam hal ini nilai-nilai moral sekolah kebanyakan berpedoman pada norma-norma yang berlaku bagi golongan menengah misalnya menghargai nilai-nilai seperti kejujuran, kebersihan, kerajinan, rasa tanggung jawab, ketekunan, ketertiban dan sebagainya. Bila dalam keluarga murid dianut nilai-nilai yang sama maka mereka tidak akan mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri dengan kehidupan di sekolah. Kesulitan akan dialami murid-murid yang berasal dari golongan rendah atau tinggi yang mempunyai norma-norma yang berbeda dengan yang berlaku di sekolah.

Di sekolah nilai-nilai yang berkaitan dengan aspek akademis atau intelektual mendapat penghargaan yang khusus. Prestasi akademis dijunjung tinggi dan dengan demikian juga kerajinan dan ketekunan belajar, angka-angka yang tinggi, rapor yang baik, kenaikan kelas dan ranking yang tinggi. Dengan sendirinya murid-murid yang tidak mempunyai motivasi yang cukup untuk melanjutkan pelajaran akan merasa kurang pada tempatnya di sekolah. Sekolah menginginkan anak-anak yang akademis teoritis baik.¹³

¹³ S. Nasution, *op.cit.*, h. 131-134.

BAB VII

PENDIDIKAN DAN STRUKTUR SOSIAL

A. KONSEP STRUKTUR SOSIAL

1. Pengertian Struktur Sosial

Struktur sosial adalah susunan antar komponen yang meliputi status dan peranan yang ada di dalam satuan sosial yang didalamnya terdapat nilai-nilai dan norma-norma yang mengatur perilaku antara status dan peranan di dalam masyarakat. Kaidah-kaidah sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok sosial, lapisan-lapisan sosial, dinamika sosial dan termasuk masalah sosial.

Struktur sosial dan sistem sosial merupakan dua hal di dalam ilmu sosial yang tidak dapat dipisahkan keberadaannya, sebab struktur sosial lebih ditekankan pada wujud fisik suatu unsur-unsur sosial, sedangkan sistem sosial lebih mengarah pada mekanisme atau kinerja sistem tersebut yang berupa aturan main dari struktur itu sendiri.

Sebagai contoh pengadilan adalah lembaga sosial yang merupakan salah satu unsur sosial, proses mengadili tersangka adalah sistem sosial, jaksa, hakim, kantor pengadilan, polisi, rumah tahanan adalah komponen atau alat dari lembaga peradilan tersebut. Agama adalah salah satu lembaga sosial yang juga berperan menata moralitas manusia, tata cara melakukan ajaran agama adalah sistem sosialnya, sedangkan Kristen, Hindu, Islam, kiai, pendeta, masjid, gereja, pura merupakan perangkat dari lembaga ini.¹

¹ Elly M. Setiady dan Usman Kolip, *op.cit.*, h. 39.

2. Komponen dalam struktur sosial

- a. Status dan peranan
- b. Institusi atau lembaga sosial
- c. Pelapisan sosial
- d. Kelompok sosial
- e. Dinamika sosial.²

B. STATUS DAN PERAN SOSIAL DI SEKOLAH

Status dan peranan mempunyai hubungan timbal balik yang merupakan unsur penentu bagi penempatan seseorang dalam strata tertentu dalam masyarakat.³

1. Pengertian Status dan Peranan

a. Pengertian Status

Status misalnya dapat memberikan pengaruh keharmonisan dan kewibawaan kepada seseorang.⁴ Status atau kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial sehubungan dengan orang-orang lainnya dalam kelompok tersebut atau tempat suatu kelompok hubungan kelompok-kelompok lainnya di dalam kelompok yang lebih besar lagi. Kedudukan sosial artinya adalah tempat seseorang secara umum dalam masyarakatnya sehubungan dengan orang lain dalam arti lingkungan pergaulannya prestisenya dan hak serta kewajibannya. Kedudukan sosial tidaklah semata-mata berarti kumpulan kedudukan akan tetapi kedudukan-kedudukan sosial tersebut mempengaruhi kedudukan orang tadi dalam kelompok-kelompok sosial yang berbeda.⁵

b. Pengertian Peranan

Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan Apabila

² Elly M. Setiady dan Usman Kolip, *op.cit.*, h. 39.

³ Eko Handoyo, *op.cit.*, h. 44.

⁴ Eko Handoyo, *op.cit.*, h. 44.

⁵ Lely Risnawaty Daulay, *op.cit.*, h. 137.

seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan.⁶

Peranan merupakan sikap tindak seseorang yang menyandang status dalam kehidupan masyarakat.⁷ Gross, Mason dan McEchern mendefinisikan peranan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Harapan-harapan tersebut merupakan imbangan dari norma-norma sosial. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa peranan-peranan itu ditentukan oleh norma-norma di dalam masyarakat. Maksudnya kita diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang diharapkan oleh masyarakat di dalam pekerjaan kita seperti dalam lingkungan keluarga dan di dalam peranan-peranan lainnya.⁸

Di dalam peranan terdapat dua macam harapan yaitu:

- a. Harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban kewajiban dari pemegang peran.
- b. Harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya.⁹

Status adalah kedudukan dan **peranan** adalah perilaku yang diharapkan atau perilaku normatif yang melekat pada status itu. Dalam sistem sosial individu penduduk di suatu tempat atau status dan bertindak atau peranan sosial dengan norma atau aturan-aturan yang dibuat oleh sistem. peranan bersifat timbal balik dalam arti mengandung pengharapan yang sifatnya timbal balik pula. Misalnya status sebagai seorang suami mengandung peranan normatif sebagai seorang pencari nafkah yang baik bukan peranan satu-satunya. Peranan sebagai suami bersifat timbal balik dalam arti saling ketergantungan dengan peranan istri.¹⁰

⁶ Lely Risnawaty Daulay, *op.cit.*, h. 137.

⁷ Eko Handoyo, *op.cit.*, h. 44.

⁸ David Berry. 1995. *Pokok-pokok Pikiran dalam Sosiologi*. Jakarta: Rajawali Pers, h. 100.

⁹ David Berry, *op.cit.*, h. 101.

¹⁰ Eti Ismawati. 2012. *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. Yogyakarta: Ombak, h. 13.

2. Status dan Peranan di Sekolah

a. Kepala sekolah

Kepala sekolah menduduki posisi yang paling tinggi di sekolah berkat kedudukannya. Ia berhak mengambil keputusan yang harus dipatuhi oleh seluruh sekolah, dan memikul tanggung jawab penuh atas kelancaran pendidikan di sekolah.

Kepala sekolah merupakan perantara antara atasannya yakni Kanwil dengan guru-guru. Ia merupakan perantara antara guru dengan atasan misalnya mengenai kenaikan gaji atau tingkat. Pada sekolah swasta kepala sekolah menjadi perantara antara pengurus yayasan dengan guru-guru dan sebaliknya.

Kepala sekolah juga berkedudukan sebagai konsultan yang memberikan petunjuk, nasihat dan saran-saran kepada guru dalam usaha untuk memperbaiki mutu sekolah.

Kepala sekolah juga memegang kepemimpinan di sekolah dan ia diharapkan sanggup memberi pimpinan dalam segala hal yang mengenai sekolah, dalam menghadapi masyarakat, murid-murid maupun guru.

b. Guru

Kedudukan guru lebih rendah daripada kepala sekolah dan karena ia harus menghormatinya dan bersedia mematuhi dalam hal-hal mengenai sekolah. kedudukan guru juga telah ditentukan oleh lama masa kerja. Berkat usia dan pengalamannya mengajar guru lama mengharapakan rasa hormat dari guru-guru baru yang lebih muda.

c. Pegawai administrasi dan pesuruh sekolah

Secara formal kedudukan mereka lebih rendah daripada kepala sekolah dan tenaga pengajar. Pesuruh dipandang lebih rendah kedudukannya daripada pegawai administrasi.

d. Murid-murid di sekolah

Sekolah Bagi murid-murid dapat dipandang sebagai hubungan-hubungan

sosial. Bedanya dengan orang dewasa ialah bahwa struktur sosial ini lebih bersifat formal. Kedudukan murid hanya dikenal dalam lingkungan sekolah saja. Di suatu sekolah dapat kita temukan macam-macam kedudukan murid dan hubungan antara murid, antara lain:

- 1) Hubungan dan kedudukan berdasarkan usia dan tingkat kelas
- 2) Struktur sosial berhubungan dengan kurikulum
- 3) Kelompok persahabatan di sekolah.¹¹

C. TUGAS SEKOLAH DALAM MENGAJARKAN PERANAN SOSIAL DI MASYARAKAT

Salah satu tugas atau fungsi sekolah ialah memilih dan mengajarkan peranan sosial. Masyarakat kita mengenal diferensiasi atau spesialisasi pekerjaan yang menimbulkan berbagai masalah.

1. masyarakat harus mempunyai fasilitas untuk mengajarkan bermacam-macam spesialisasi itu
2. Masyarakat harus mengusahakan agar orang-orang yang mempunyai spesialisasi itu jumlahnya seimbang dengan kebutuhan.
3. Masyarakat harus menciptakan mekanisme yang mampu menyelesaikan antara bakat dan kemampuan individu dengan tuntutan spesialisasi.
4. menghasilkan tenaga kerja yang berspesialisasi ini menjadi tugas sekolah sebab itu berkembanglah sekolah-sekolah kejuruan. Bahkan dalam sekolah-sekolah kejuruan dikembangkan lebih lanjut jurusan-jurusan yang mengajarkan keahlian yang lebih khusus misalnya dalam Sekolah Teknik ada jurusan jurusan teknik listrik, mesin, kimia, pertanian, pertambangan dan sebagainya.

Kelebihan atau kekurangan tenaga spesialis dalam masyarakat selalu menimbulkan berbagai masalah sosial. Penemuan teknologi dapat mengurangi kebutuhan tenaga spesialis untuk sesuatu jenis pekerjaan dengan ditemukannya komputer. Memang dengan penemuan itu muncul jenis pekerjaan baru yang ahli teknik komputer dan komputer programmers.

¹¹ S. Nasution, *op.cit.*, h. 81-82.

Para ahli tata buku tidak dapat ditolong lagi kecuali apabila mereka mampu mempelajari keahlian yang baru itu. Sebab itu sekolah harus berpandangan jauh kedepan:

1. Pendidikan sekolah tidak perlu mengajarkan keterampilan-keterampilan yang di masa depan akan dengan mudah diganti dengan mesin.
2. Sekolah hendaknya mengajarkan kepada anak lebih dari satu macam spesialisasi, sehingga mereka mudah berpindah pekerjaan.
3. Tugas utama pendidikan sekolah sekarang ya Allah mengajarkan bagaimana caranya belajar, kepada anak diberikan pengetahuan kunci dan motivasi belajar mengemudikan mereka belajar terus sepanjang hidupnya setelah menyelesaikan pendidikannya pada suatu jenjang pendidikan formal.¹²

¹² Abu Ahmadi. 2007. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: IKAPI, h. 148-143.

BAB VIII

PENDIDIKAN DAN MASYARAKAT

A. HAKIKAT MASYARAKAT

1. Pengertian Masyarakat

Masyarakat adalah kumpulan orang yang di dalamnya hidup bersama dalam waktu yang cukup lama. Jadi bukan hanya kumpulan atau kerumunan orang dalam waktu sesaat seperti kerumunan orang di terminal pasar atau di lapangan sepak bola. Dalam kebersamaan yang lama terjadi interaksi sosial, selanjutnya orang-orang yang membentuk masyarakat harus memiliki kesadaran bahwa mereka merupakan satu kesatuan. Masyarakat merupakan suatu sistem hidup bersama di mana mereka menciptakan nilai, norma, dan kebudayaan bagi kehidupan mereka.¹

- a. Selo Soemardjan, masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan.
- b. Karl Marx, masyarakat adalah suatu struktur yang menderita suatu ketegangan organisasi atau perkembangan akibat adanya pertentangan antara kelompok-kelompok yang terbagi secara ekonomi.
- c. Emile Durkheim, masyarakat merupakan suatu kenyataan objektif pribadi-pribadi yang merupakan anggotanya
- d. Paul B. Horton dan C. Hunt, masyarakat merupakan kumpulan manusia yang relatif mandiri hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup

¹ Elly M. Setiadi, H. Kama A. Hakim dan Ridwan Efwndi, *op.cit.*, H. 83-84.

lama tinggal di suatu wilayah tertentu mempunyai kebudayaan sama serta melakukan sebagian besar kegiatan di dalam kelompok atau kumpulan manusia tersebut.²

2. Ciri-ciri Masyarakat

Ciri atau unsur masyarakat menurut Krech:

- a. Kumpulan orang
- b. Sudah terbentuk dengan lama
- c. Sudah memiliki sistem sosial atau struktur sosial tersendiri
- d. Memiliki kepercayaan sikap dan perilaku yang dimiliki bersama.

Dengan demikian karakteristik dari masyarakat itu terutama terletak pada kelompok manusia yang bebas dan bersifat kekal menempati kawasan tertentu memiliki kebudayaan serta yang terjalin dalam suatu hubungan di antara anggota-anggotanya.³

B. HUBUNGAN ANTARA MASYARAKAT DENGAN PENDIDIKAN

1. Pengertian Hubungan Sekolah dan Masyarakat

Menurut tim dosen administrasi pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia bahwa hubungan masyarakat dan sekolah merupakan komunikasi dua arah antara organisasi dengan publik secara timbal balik dalam rangka mendukung fungsi dan tujuan manajemen dengan meningkatkan pembinaan kerjasama serta pembunuhan kepentingan bersama.⁴

Antara pendidikan dan perkembangan masyarakat tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kemajuan suatu masyarakat dan suatu bangsa sangat ditentukan pembangunan sektor pendidikan dalam penyiapan sumber daya manusia yang sesuai dengan. Sumber daya manusia yang sesuai dengan perkembangan zaman tidak terlepas dari fungsi pendidikan.⁵

² Lely Risnawaty Daulay, *op.cit.*, h. 143.

³ Elly M. Setiadi, H. Kama A. Hakim dan Ridwan Efendi, *op.cit.*, H. 81.

⁴ Abdullah idi, *op.cit.*, h. 66.

⁵ Abdullah Idi, *op.cit.*,h . 60.

Program pendidikan didasarkan kepada tujuan umum pengajaran yang diturunkan dari tiga sumber, yaitu masyarakat, siswa dan bidang studi. Yang diturunkan dari masyarakat mencakup konsep luas seperti membentuk kemanusiaan, menjadikan manusia pembangunan, manusia berkepribadian, manusia bertanggung jawab dan sebagainya. Tujuan umum ini menyangkut pertimbangan filsafat dan etika yang diturunkan dari harapan masyarakat Seperti apa yang tercantum dalam falsafah bangsa, tujuan pendidikan nasional, sifat lembaga pendidikan, nilai-nilai keagamaan, ideologi dan sebagainya. S. Nasution, menyatakan bahwa pada dasarnya setiap sekolah mendidik anak agar menjadi anggota masyarakat yang berguna.⁶

Pendidikan memegang peranan penting dalam membentuk dan menciptakan masyarakat sesuai dengan yang diharapkan. Dengan adanya pendidikan, apa yang dicita-citakan masyarakat dapat diwujudkan melalui anak didik sebagai generasi masa depan. Salah satu peranan pendidikan dalam masyarakat adalah dalam fungsi sosial yakni sekolah merupakan salah satu sarana pendidikan yang diharapkan masyarakat.⁷

2. Peran Masyarakat terhadap Pendidikan

Dunia ini dalam bukunya sosiologi pendidikan, individu, masyarakat dan pendidikan, menjelaskan bahwa sumbangan masyarakat terhadap pendidikan adalah:

- a. Masyarakat sebagai tempat sosialisasi
- b. Masyarakat sebagai kontrol sosial
- c. Masyarakat sebagai pelestari budaya
- d. Masyarakat sebagai seleksi pendidikan
- e. Masyarakat sebagai tempat belajar
- f. Sebagai lembaga pendidikan *life skill*.⁸

⁶ Abdullah Idi, *op.cit.*,h . 61.

⁷ Abdullah Idi, *op.cit.*,h . 61.

⁸ Abuddin Nata. 2014. *Sosiologi Pendidikan Islam*. Jakarta: Rajawaki Pers, h. 60-72..

3. Peran Pendidikan terhadap Masyarakat

- a. Pendidikan sebagai sumber ilmu pengetahuan dan keterampilan.
- b. Pendidikan sebagai pencetak ilmuwan.
- c. Pendidikan sebagai agen perubahan sosial
- d. Pendidikan sebagai pencetak tenaga kerja.
- e. Pendidikan sebagai pengawas masyarakat.⁹

4. Tujuan hubungan sekolah dengan masyarakat

Menurut Sutisna hubungan sekolah dengan masyarakat adalah untuk mengembangkan pemahaman tentang maksud-maksud dan saran-saran dari sekolah, untuk menilai program sekolah, untuk mempersatukan orang tua murid dan guru dalam memenuhi kebutuhan kebutuhan anak didik, untuk mengembangkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan sekolah dalam Era Pembangunan, untuk membangun dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap sekolah, untuk memberitahukan masyarakat tentang pekerjaan sekolah dan untuk mengarahkan dukungan dan bantuan bagi pemeliharaan dan peningkatan program sekolah.¹⁰

5. Permasalahan Hubungan sekolah dengan Masyarakat

Namun, pendidikan di sekolah sering kurang relevan dengan kehidupan masyarakat. Kurikulum kebanyakan berpusat pada bidang studi yang tersusun secara logis dan sistematis yang tidak hanya hubungannya dengan kehidupan sehari-hari anak didik. Apa yang dipelajari anak didik tampaknya hanya memenuhi kepentingan sekolah untuk ujian bukan untuk membantu totalitas anak didik agar hidup lebih efektif dalam masyarakat.¹¹

Hingga kini dapat dikatakan bahwa hubungan pendidikan di sekolah dan masyarakat masih sangat minim atau rendah karena pendidikan di sekolah dipandang terutama sebagai persiapan untuk kelanjutan pelajaran. Kurikulum sekolah bersifat akademis dan dapat dijalankan

⁹ Abuddin Nata, *op.cit.*, h. 72-77.

¹⁰ Abdullah Idi, *op.cit.*,h . 67.

¹¹ Abdullah Idi, *op.cit.*,h . 61.

berdasarkan buku pelajaran tanpa menggunakan sumber-sumber masyarakat. Masyarakat umumnya masih memandang sekolah lebih dominan bertujuan mengajarkan anak mereka dalam aspek akademik lebih dominan.¹²

6. Faktor Penyebab Kesenjangan Hubungan Sekolah dan Masyarakat

Menurut mulyasa bahwa salah satu faktor yang menyebabkan kesenjangan antara sekolah dan masyarakat adalah minimnya informasi yang bertalian dengan pendidikan di sekolah dan kurang kuatnya hubungan antara masyarakat dengan pemerintah. Oleh sebab itu, untuk memperoleh dukungan yang lebih luas dari masyarakat perlu dilakukan upaya sosialisasi yang bertujuan memperkenalkan beragam hal tentang implementasi kurikulum dan kondisi objektif. Hal ini bertujuan agar dapat menarik berbagai perhatian dari berbagai elemen yang berhubungan dengan manajemen sekolah agar terdorong untuk melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas pendidikan di sekolah.¹³

7. Usaha hubungan sekolah dan masyarakat

Usaha yang dapat dilakukan sekolah ialah menghubungkannya dengan masyarakat dan menjadikan masyarakat sebagai sumber pelajaran. Pada umumnya Untuk memanfaatkan sumber-sumber itu masyarakat dapat dibawa ke dalam kelas misalnya mengundang narasumber ke sekolah atau sekolah dibawa kepada masyarakat melalui karya wisata, praktek lapangan atau kuliah kerja nyata mahasiswa pada perguruan tinggi.¹⁴

Beragam teknik dan media dapat dilakukan dalam konteks ini seperti melakukan rapat dan pertemuan, surat menyurat, buku penghubung, buletin sekolah dan kegiatan ekstrakurikuler yang melibatkan anak didik dan orang tua.

Dalam mengembangkan hubungan sekolah dan masyarakat maka

¹² Abdullah Idi, *op.cit.*,h . 63.

¹³ Abdullah Idi, *op.cit.*, h. 66.

¹⁴ Abdullah Idi, *op.cit.*,h . 66.

elemen-elemen sekolah terutama kepala sekolah dan guru guru merupakan Kunci keberhasilan yang harus memperhatikan kebutuhan anak didik, orang tua dan masyarakat. Kepala sekolah dituntut berupaya Membina dan mengembangkan hubungan kerjasama konstruktif antara sekolah dan masyarakat guna mewujudkan sekolah yang efektif dan efisien.¹⁵

Hubungan sekolah dan masyarakat merupakan sarana yang berperan dalam membina dan mengembangkan pertumbuhan pribadi anak didik di sekolah. Sekolah dalam konteks ini sebagai sistem sosial yang merupakan bagian integral dari sistem yang lebih besar yakni masyarakat. Sekolah dan masyarakat memiliki hubungan yang lebih erat dalam mencapai tujuan sekolah atau pendidikan dengan efektif dan efisien. Sekolah juga harus menunjang proses pencapaian tujuan atau pemenuhan kebutuhan masyarakat khususnya kebutuhan pendidikan. Sekolah perlu memberi penerangan tentang tujuan-tujuan terutama terhadap sekolah. Dengan kata lain, program-program, kebutuhan serta keadaan masyarakat. Sekolah juga harus mengetahui dengan jelas apa kebutuhan, harapan dan tuntutan masyarakat terutama terhadap sekolah. Dengan singkat antara sekolah dan masyarakat perlu dibina dan dikembangkan suatu hubungan yang harmonis.¹⁶

8. Manfaat hubungan timbal balik pendidikan di sekolah dan masyarakat

Hubungan timbal balik pendidikan di sekolah dan masyarakat sangat besar manfaatnya dan artinya bagi kepentingan pembinaan dukungan moral, materi dan pemanfaatan masyarakat sebagai sumber belajar. Bagi masyarakat dapat mengetahui beragam hal tentang sekolah dan inovasi-inovasi yang dihasilkan, menyalurkan kebutuhan berpartisipasi dalam pendidikan, melakukan tekanan dan tuntutan terhadap sekolah.¹⁷

¹⁵ Abdullah Idi, *op.cit.*, h. 80.

¹⁶ Abdullah Idi, *op.cit.*, h. 80.

¹⁷ Abdullah Idi, *op.cit.*, h. 80.

BAB IX

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

A. KONSEP KEBUDAYAAN

1. Pengertian Kebudayaan

Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan cara belajar. Adapun tindakan manusia yang didapat tidak dengan belajar seperti tindakan naluri, beberapa refleks, beberapa tindakan manusia yang merupakan kemampuan naluri yang terbawa dalam gen bersama kelahirannya (seperti makan, minum, atau berjalan dengan kedua kakinya), juga dirombak olehnya menjadi tindakan kebudayaan.

Kebudayaan berasal dari bahasa *Sansekerta* yaitu *buddhayah*. Bentuk jamak dari ***buddhi*** yang berarti *budi atau akal*. Kebudayaan adalah “hal-hal yang bersangkutan dengan akal”. Budaya adalah daya dan budi yang berupa cipta karsa dan rasa. Sedangkan kebudayaan adalah hasil dari cipta, karsa dan rasa itu. Kata ***culture*** merupakan kata yang sama artinya dengan kebudayaan. Berasal dari bahasa latin ***colore*** yang berarti mengolah, mengerjakan, terutama menyangkut tanah.

Konsep tersebut lambat laun berkembang menjadi segala upaya serta tindakan manusia untuk mengolah tanah dan mengubah alam. Peradaban atau istilah Inggrisnya *civilization*, merupakan biasa dipakai untuk menyebut bagian dan unsur kebudayaan yang halus, maju dan indah. Misalnya kesenian, ilmu pengetahuan, adat sopan-santun pergaulan, kepandaian menulis, organisasi kenegaraan dan sebagainya. Istilah

peradaban sering juga disebut sebagai suatu kebudayaan yang mempunyai sistem teknologi, ilmu pengetahuan, seni bangunan, seni rupa, dan sistem kenegaraan dari masyarakat kota yang maju dan kompleks.¹

- a. Edward B. Taylor, kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks yang didalamnya terkandung pengetahuan kepercayaan kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat oleh seseorang sebagai anggota masyarakat
- b. M. Jacobs dan B. J. Stren, kebudayaan mencakup keseluruhan yang meliputi bentuk teknologi sosial ideologi religi dan kesenian serta benda yang kesemuanya merupakan warisan sosial
- c. Koentjaraningrat, kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan manusia yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar
- d. Dr. K. Kupper, kebudayaan merupakan sistem gagasan yang menjadi pedoman dan arah bagi manusia dalam bersikap dan berperilaku baik secara individu maupun kelompok
- e. William H. Haviland, kebudayaan adalah seperangkat peraturan dan norma yang dimiliki bersama oleh para anggota masyarakat yang jika dilaksanakan oleh para anggotanya akan melahirkan perilaku yang dipandang layak dan dapat diterima oleh semua masyarakat
- f. Ki Hajar Dewantara, kebudayaan berarti buah budi manusia adalah hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh kuat yakni zaman dan alam yang merupakan bukti kejayaan makhluk hidup manusia untuk mengatasi berbagai rintangan dan kesukaran di dalam hidup dan penghidupannya guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang para yang pada lahirnya bersifat tertib dan damai.
- g. Francis Meril, pola-pola perilaku yang dihasilkan oleh interaksi sosial. Semua perilaku dan semua produk yang dihasilkan oleh seseorang sebagai anggota suatu masyarakat yang ditemukan melalui interaksi simbolis
- h. Bounded et.al, kebudayaan adalah sesuatu yang terbentuk oleh

¹ Koentjaraningrat. 2011. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, h. 179.

pengembangan dan transmisi dari kepercayaan manusia melalui simbol-simbol tertentu misalnya simbol bahasa sebagai rangkaian simbol yang digunakan untuk mengalihkan keyakinan budaya di antara para anggota suatu masyarakat. Pesan-pesan tentang kebudayaan yang diharapkan dapat ditemukan di dalam media pemerintahan institusi agama sistem pendidikan dan semacam itu.

- i. Mitchell, kebudayaan adalah sebagian perulangan keseluruhan tindakan atau aktivitas manusia dan produk yang dihasilkan manusia yang telah memasyarakat secara sosial dan bukan sekedar dialihkan secara genetikal
- j. Robert H. Lowie, kebudayaan adalah segala sesuatu yang diperoleh individu dari masyarakat mencakup kepercayaan, adat-istiadat, norma-norma, artistik, kebiasaan, maka keahlian yang diperoleh bukan dari kreativitasnya sendiri melainkan merupakan warisan masa lampau yang didapat melalui pendidikan formal atau informal
- k. Arkeolog R. Seokmono, kebudayaan adalah seluruh hasil usaha manusia baik berupa benda atau pun hanya berupa buah pikiran dan dalam kehidupan.
- l. Melville J. Herskovits, mengemukakan bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Istilah untuk pendapat itu adalah *cultural determinisme*.
- m. Herskovits, memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang turun temurun dari satu generasi ke generasi yang lain yang kemudian disebut sebagai *superorganic*. menurut Andreas Eppink, kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian nilai sosial norma sosial ilmu pengetahuan serta keseluruhan struktur-struktur sosial religius dan lain-lain tambahan lagi segala pernyataan intelektual dan artistik yang menjadi ciri khas suatu masyarakat.
- n. Edward Burnet Tylor, kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks yang didalamnya terkandung pengetahuan kepercayaan kesenian moral hukum adat istiadat dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat.
- o. Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi, kebudayaan adalah sarana hasil karya rasa dan cipta masyarakat. Dari berbagai definisi

tersebut dapat diperoleh pengertian mengenai kebudayaan adalah sesuatu yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia sehingga dalam kehidupan sehari-hari kebudayaan itu bersifat abstrak sedangkan perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata misalnya pola-pola perilaku bahasa peralatan hidup organisasi sosial religi seni dan lain-lain yang kesemuanya itu ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat.²

2. Wujud Kebudayaan

Inti penting dari budaya adalah pandangan yang bertujuan untuk mempermudah hidup dengan mengajarkan orang-orang bagaimana cara beradaptasi dengan lingkungannya. Seperti yang Triandis tuliskan bahwa budaya berperan untuk memperbaiki cara anggota kelompok suatu budaya beradaptasi dengan ekologi tertentu dan hal ini melibatkan pengetahuan yang dibutuhkan orang supaya mereka dapat berperan aktif dalam lingkungan sosialnya.³

Menurut Sulasman dan Gumilar wujud kebudayaan terdiri dari:

a. Ide

Istilah ideologi meliputi nilai, norma, falsafah, kepercayaan, falsafah, sentimen, kaidah etis. Pengetahuan atau wawasan tentang dunia, etos dan semacamnya. Dalam penggunaan yang lebih modern dan sempit, ideologi biasanya mengacu pada sistem gagasan yang dapat digunakan untuk merasionalisasikan, memberikan teguran, memaafkan, menyerang, menjelaskan keyakinan, kepercayaan, tindak, atau pengaturan kultural tertentu.

Dalam pengertian ini, nuansa khusus tersebut dipertentangkan dengan kenetralan pengetahuan dalam arti yang murni. Dikatakan pula

² Lely Risnawaty Daulay. 2010. *Ilmu Alamiah Dasar, Ilmu Budaya Dasar, Ilmu Sosial Dasar*. Bandung: Perdana Mulya Sarana, h. 88-90.

³ Larry A. Samovar, Richard E. Porter dan Edwin R. McDaniel. 2010. *Komunikasi Lintas Budaya*. Jakarta: Salemba Humanity, h. 28.

bahwa ideologi menggunakan atau bahkan mencocok-cocokkan fakta demi mendukung sikap ideologisnya, dan bukan membenahi sistem gagasannya sendiri ketika fakta menghendaki demikian. Oleh sebab itu, banyak peneliti modern sungguh-sungguh berupaya untuk membedakan gagasan sebagai pengetahuan di satu pihak, dan ideologi di pihak lain.

b. Aktivitas (tindakan)

Aktivitas ialah wujud kebudayaan sebagai tindakan berpola dari manusia dari masyarakat itu. Sebagai perwujudan gagasan dalam kebudayaan, aktivitas atau perilaku dibagi menjadi dua yaitu perilaku verbal (lisan dan tulisan) dan nonverbal (artefak dan alam). Wujud perilaku sering berbentuk sistem sosial.

Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas manusia yang saling berinteraksi, mengadakan kontak serta bergaul dengan manusia lainnya menurut pola-pola tertentu yang berdasarkan adat tata kelakuan. Sifatnya konkret, terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan dapat diamati dan didokumentasikan.

Sistem sosial terkait pula dengan struktur sosial. Evans-Pritchard mengemukakan bahwa struktur sosial merupakan konfigurasi kelompok-kelompok yang mantap. Talcott Parsons menyebutkan bahwa struktur sosial merupakan sistem harapan atau ekspektasi normatif. Leah mengatakannya sebagai seperangkat norma atau aturan ideal, sedangkan Levi Strauss berpendapat bahwa struktur sosial merupakan model.

Beberapa strukturalis sosial berupaya menjelaskan struktur kemasyarakatan dengan merumuskan beberapa kaidah tertentu yang menjadi landasan organisasi. Sejumlah antropologi Inggris misalnya dalam menganalisis masyarakat yang memerlakukan garis keturunan segmentaris sering berbicara tentang kaidah segmenter itu hingga terkesan seolah-olah warga masyarakat itu memiliki cetak biru dalam pikiran mereka tentang masyarakat sendiri, yang kemudian mereka laksanakan. Radcliffe Brown mengajukan beberapa prinsip struktural macam itu untuk menyoroti beberapa ihwal dalam sistem kekerabatan: kaidah ekuivalensi saudara sekandung, kaidah solidaritas garis keturunan dan seterusnya.

c. Artefak

Artefak ialah wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas, dan karya semua manusia dalam masyarakat berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat dan didokumentasikan. Sifatnya paling konkret di antara ketiga wujud kebudayaan.

Dalam kehidupan masyarakat, antara wujud kebudayana yang satu tidak bisa dipisahkan dengan wujud kebudayana yang lain. sebagai contoh wujud kebudayaan ideal memberi contoh dan arah ke pada tindakan (aktivitas) dan karya (artefak). Sebagai perwujudan gagasan dalam kebudayaan, perilaku dibagi menjadi perilaku verbal (lisan dan tulisan) dan perilaku nonverbal (artefak dan alam). Keduanya membentuk kebudayana material. Materi yang dimaksud dalam kebudayaan material meliputi benda-benda bergerak yang disebut artefak itu.

Secara lebih terperinci, Woodward mengatakan bahwa istilah kebudayaan material menekankan cara-cara benda tak bergerak di dalam lingkungan berperan bagi manusia dan diberi peran oleh manusia, untuk melaksanakan fungsi sosial, mengatur hubungan sosial, dan memberikan makna simbolis kepada kegiatan manusia. Dengan demikian, inti kebudayaan material ialah materi dan hubungannya dengan manusia bisa menjadi alat untuk memahami kehidupan manusia pada masa lalu.

Keistimewaan materi dibandingkan dengan perilaku verbal ialah meskipun bisa materi dapat bertahan secara fisik. Pada pihak lain, perilaku verbalitas bahasa dari masa lalu hanya bisa diperoleh jejaknya melalui tulisan yang terpatri pada artefak (sudah berupa materi). Walaupun begitu, sebenarnya hubungan antara bahasa dan ilmu kebahasaan (linguistik) dengan kebudayaan material lebih luas dan dalam lagi.⁴

3. Unsur Kebudayaan

Unsur-unsur kebudayaan meliputi semua kebudayaan di dunia. Menurut Koentjaraningrat, ada tujuh unsur kebudayaan universal yang

⁴ Sulasman dan Setia Gumilar. 2013. *Teori-teori Kebudayaan: Teori dan Aplikasi*. Bandung: Pustaka Setia, h. 35-37.

disusun oleh beberapa sarjana antropologi. Tujuh unsur kebudayanya ini dapat ditemukan pada semua bangsa di dunia, terdiri dari:

1. Bahasa
2. Sistem pengetahuan
3. Organisasi sosial
4. Sistem peralatan hidup dan teknologi
5. Sistem mata pencaharian hidup
6. Sistem religi
7. Kesenian

Tiap-tiap unsur kebudayaan universal menjelma dalam bentuk tiga wujud kebudayaan baik dalam bentuk sistem sosial, sistem budaya atau kebudayaan berbentuk fisik. Sistem ekonomi misalnya mempunyai wujud berbagai konsep-konsep, rencana-rencana, kebijaksanaan, adat-istiadat yang berhubungan dengan ekonomi.

Sistem ekonomi juga mempunyai wujud yang berupa tindakan-tindakan dan interaksi berpola antara produsen, tengkulak, pedagang, ahli transpor, pengecer dan konsumen. Selain itu sistem ekonomi juga mempunyai unsur-unsur kebudayaan fisik berupa peralatan, komoditi dan benda-benda ekonomi.

Sistem religi, mempunyai wujud sebagai sistem keyakinan, gagasan tentang tuhan, dewa-dewa, roh halus, neraka, surga dan sebagainya. Mempunyai wujud berupa upacara-upacara, baik yang bersifat musiman maupun yang bersifat kadangkala, selain itu sistem religi juga mempunyai wujud sebagai benda-benda suci dan benda-benda religius.

Sistem kesenian yang berwujud gagasan-gagasan, ciptaan-ciptaan pikiran, cerita-cerita, syair-syair yang indah. Namun, kesenian juga dapat berwujud tindakan-tindakan interaksi berpola antara seniman pencipta, seniman penyelenggara, sponsor kesenian, penonton, dan konsumen hasil kesenian, selain itu kesenian juga dapat berwujud benda-benda indah, candi, kain tenun yang indah, benda-benda, kerajinan, dan sebagainya.

Wujud **sistem budaya** dari suatu unsur kebudayaan universal berupa adat, dan pada tahap pertamanya adat dapat diperinci ke dalam beberapa kompleks budaya, tiap kompleks budaya dapat diperinci lebih

lanjut ke dalam beberapa tema budaya dan akhirnya pada tahap ketiga tiap tema budaya dapat diperinci lebih khusus ke dalam berbagai tindakan.

Ketujuh unsur kebudayaan universal itu masing-masing juga mempunyai wujud fisik, walaupun tidak ada satu wujud fisik untuk keseluruhan dari satu unsur kebudayaan universal. Oleh sebab itu, kebudayaan fisik tidak perlu diperinci menurut keempat tahap pemerincian seperti yang dilakukan pada sistem budaya dan sistem sosial. Namun, semua unsur kebudayaan fisik sudah tentu secara khusus terdiri dari benda-benda kebudayaan.

Unsur kebudayaan universal sistem mata pencaharian misalnya dapat diperinci ke dalam beberapa sub unsur seperti: perburuan, perladangan, pertanian, peternakan, perdagangan, perkebunan, industri, kerajinan, industri pertambangan, industri jasa, dan industri manufaktur. Tiap bagian sub unsur mempunyai wujudnya sebagai sistem budaya atau disebut juga adatnya, sub unsur budaya juga mempunyai wujud sosial berupa aktivitas sosialnya, dan setiap sub unsur budaya juga mempunyai wujud fisik berupa berbagai peralatan yang merupakan benda-benda kebudayaan.

Begitu juga dengan unsur kebudayaan universal lainnya, misalnya organisasi sosial yang wujudnya terdiri dari sub sistem budaya, sistem sosial dan benda-benda. Sedangkan sub unsurnya terdiri dari sistem kekerabatan, sistem komunikasi, sistem pelapisan sosial, sistem pimpinan, sistem politik dan sebagainya. Demikian juga dengan unsur kebudayaan universal berupa kesenian yang terdiri dari sistem budaya, sistem sosial, dan benda-benda fisik dari seni rupa, seni suara, seni gerak, seni sastra, seni drama dan sebagainya.

Unsur-unsur kebudayaan universal tersebut ada yang bersifat universal seperti misalnya sistem kekerabatan. Sub unsur itu pasti ada di dalam setiap masyarakat dan kebudayaan di mana pun juga berada di dunia. Namun, untuk keperluan logika dari metode pemerintahan sistem kekerabatan sebaiknya tetap dimasukkan saja ke dalam golongan adat atau kompleks budaya, dan tidak ke dalam golongan unsur kebudayaan universal. Hal ini disebabkan karena sistem kekerabatan hanya merupakan suatu sub unsur khusus dalam rangka organisasi sosial.

Contoh dari pemerincian adat dan aktivitas sosial ke dalam beberapa

kompleks budaya dan kompleks sosial misalnya pemerincian dari pertanian ke dalam irigasi, pengelolaan tanah, penggarapan tanah, teknologi penanaman, penimbunan hasil pertanian, pemrosesan dan pengawatan hasil pertanian dan sebagainya. Contoh lain misalnya pemerincian dari sistem kekerabatan ke dalam: perkawinan, tolong menolong, antar-kerabat, sopan-santun pergaulan antar kerabat, sistem istilah kekerabatan dan sebagainya. Setiap sub unsur sudah tentu mempunyai peralatannya sendiri-sendiri yang secara konkret terdiri dari benda-benda kebudayaan.

Dari contoh-contoh di atas jelas bahwa di antara unsur-unsur golongan ketiga ini pun ada yang bersifat universal, yaitu perkawinan. Unsur ini dapat dikatakan ada di setiap masyarakat. Namun seperti halnya contoh sistem kekerabatan tersebut, demi logika sistematis pemerincian, maka sistem perkawinan tidak kita sebut unsur kebudayaan universal melainkan tetap kompleks budaya dan kompleks sosial saja.

Usaha pemerincian dapat dilanjutkan untuk memerinci kompleks budaya dan kompleks sosial ke dalam tema budaya dan pola sosial. Contohnya: perkawinan dapat diperinci ke dalam pelamaran, upacara pernikahan, perayaan, mas kawin, harta pembawaan pengantin wanita, adat menetap sesudah nikah, poligami, poliandri, perceraian dan sebagainya.

Akhirnya, masih ada satu tahap perincian lagi yaitu perincian dari tema budaya dan pola sosial ke dalam gagasan dan tindakan. Dalam hal itu sub-sub unsur mas kawin misalnya dapat kita perinci satu langkah lebih lanjut lagi ke dalam sub-sub unsur yang kecil seperti bagian harta mas kawin yang berupa ternak, bagian harta mas kawin yang berupa benda adat, bagian harta mas kawin yang berupa benda-benda pralambang, bagian harta mas kawin yang berupa uang tunai, upacara penyerahan mas kawin, upacara pertukaran harta pengantin pria dan harta penganti wanita, dan sebagainya.

Di antara unsur-unsur golongan kecil ini biasanya tak ada yang bersifat universal, karena unsur-unsur kebudayaan seperti itu sudah terlampau kecil. Apabila kita tinjau mengenai sub unsur mas kawin tersebut di atas, maka tampak harta mas kawin yang berupa ternak tidak terdapat di semua kebudayaan di dunia.

Di Indonesia saja misalnya sub unsur kebudayaan harta mas kawin yang berupa ternak tidak terdapat di seluruh masyarakat Indonesia

kecuali pada beberapa suku bangsa di Irian Jaya di mana babi merupakan unsur harta mas kawin, bahkan tak ada juga di kebudayaan-kebudayaan di Asia Tenggara pada umumnya.

Sebaliknya pada banyak kebudayaan suku-suku bangsa Afrika Timur, ternak sapi merupakan unsur yang amat dominan dalam mas kawin. Adapun unsur kecil upacara penyerahan mas kawin juga bukan suatu hal yang universal. Pada kebudayana suku bangsa Jawa upacara itu tidak jelas ada, sebaliknya dalam kebudayaan beberapa suku bangsa di pantai Utara Irian Jaya, upacara itu merupakan suatu upacara penting tersendiri, lepas dari upacara pernikahan.⁵

B. HUBUNGAN ANTARA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sekolah mentransmisi kebudayaan. Demi kelangsungan hidup bangsa dan negara, kepada generasi muda di sampaikan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa itu. Setiap warga negara diharapkan menghormati pahlawannya, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur yang diwariskan nenek moyang dan dengan demikian merasakan rasa kesatuan dan persatuan bangsa.⁶

Sekolah di samping mempunyai tugas pemersatu budaya-budaya etnik yang beraneka ragam juga perlu melestarikan nilai-nilai budaya daerah yang masih layak dipertahankan. Seperti bahasa daerah, kesenian daerah, budi pekerti dan suatu upaya mendayagunakan sumber daya lokal bagi kepentingan sekolah dan sebagainya. Fungsi sekolah berkaitan dengan konversi nilai-nilai budaya daerah setidaknya ada dua fungsi yaitu:

1. Sekolah digunakan sebagai salah satu lembaga masyarakat untuk mempertahankan nilai-nilai tradisional masyarakat dari suatu masyarakat pada suatu daerah tertentu. Misalnya sekolah di Jawa Tengah digunakan untuk mempertahankan nilai-nilai budaya Jawa Tengah, sekolah di Jawa Barat untuk mempertahankan nilai-nilai budaya Sunda, sekolah di Sumatera untuk mempertahankan nilai-nilai Sumatera

⁵ Koentjaraningrat, *op.cit.*, h. 203-20g.

⁶ S. Nasution, *op.cit.*, h. 16.

Selatan dan sekolah di Bangka Belitung untuk mempertahankan nilai-nilai budaya Bangka Belitung.

2. Sekolah mempunyai tugas mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa dengan mempersatukan nilai-nilai yang beragam demi kepentingan nasional.

Untuk memenuhi dua tuntutan tersebut maka perlu disusun kurikulum yang baku yang berlaku untuk semua daerah dan kurikulum yang disesuaikan dengan kondisi dan nilai-nilai daerah tertentu. Dalam hal ini sekolah harus menanamkan nilai-nilai yang dapat menjadikan anak-anak tersebut menjadi generasi yang mencintai daerah, bangsa dan tanah air.⁷

C. KEBUDAYAAN SEKOLAH

1. Kenaikan kelas

Belajar dengan rajin agar naik kelas merupakan patokan yang mempengaruhi kehidupan anak selama bersekolah. Untuk itu ia harus menguasai bahan pelajaran yang ditentukan oleh kurikulum yang sering diolah dalam bentuk buku pelajaran. ulangan akhir tes guru menilai kemampuan anak. Angka dari guru sangat penting bagi murid. Hak guru memberi angka memberinya kekuasaan yang disegani oleh murid. Pemberian rapor dan penentuan kenaikan kelas sering dilakukan dalam upacara tertentu sekalipun sederhana. Mereka yang naik kelas termasuk kekasih baru dalam hidupnya dan makin tinggi tingkat kelas maka makin banyak yang diharapkan darinya misalnya kelakuan yang lebih matang. Tinggal kelas merupakan masalah yang berat bagi murid. Bagi anak yang bersangkutan ini berarti bahwa ia akan ditinggalkan oleh teman-temannya dan ia harus masuk kelompok anak-anak yang lebih mudah daripadanya yang selama ini lebih rendah kedudukannya. Oleh sebab, kenaikan kelas itu Begitu pentingnya maka murid-murid siswa belajar dengan giat.

⁷ Abdullah Idi, *op.cit.*, h.75-76.

2. Upacara-upacara

Peristiwa yang biasanya dilakukan dengan upacara adalah penerimaan murid baru, upacara wisuda. upacara itu melambangkan berbagai hal:

- a. Untuk menyatakan besarnya nilai pendidikan dan pembinaan generasi muda dan kepercayaan bahwa pendidikan membawa kemajuan bagi setiap siswa. Dalam upacara itu sering turut serta orang tua dan tokoh-tokoh lain dari masyarakat yang mendukung sekolah sebagai lembaga pendidikan yang besar manfaatnya bagi bangsa dan negara.
- b. Bagi mereka yang lulus wisuda itu merupakan pengakuan hak antara pendidikan yang telah mereka capai. Wisuda ini juga menyakiti masa periode tertentu dalam hidupnya dan membuka lembaran baru serta memasukkan periode yang baru yang menuju masa kedewasaan. Selain itu sudah merupakan tanda penghargaan atas keberhasilan siswa dalam pelajaran yang diperoleh dengan jeri payah.

3. Upacara bendera

Ada sekolah yang memulai sekolah dengan lebih dahulu mengumpulkan semua murid untuk melakukan upacara tertentu dengan acara yang mungkin berbeda beda menurut sekolahnya. upacara ini selain mempunyai fungsi kontrol dalam menanamkan rasa identitas anak dengan sekolahnya dan semangat persatuan serta rasa turut bertanggung jawab atas nama baik sekolah. Dalam menghimpun murid-murid untuk saat upacara tidak sekolah mengembangkan cara-cara yang khas bagi sekolah itu yang akhirnya dapat menjadi tradisi di sekolah itu.⁸

⁸ S. Nasution, *op.cit.*, h. 63-64.

BAB X

PENDIDIKAN DAN STRATIFIKASI SOSIAL

A. KONSEP STRATIFIKASI SOSIAL

1. Pengertian Stratifikasi Sosial

Stratifikasi berasal dari kata *stratum* yang merupakan bentuk jamak dari *strata* artinya lapisan.¹

Stratifikasi sosial membedakan individu-individu dalam masyarakat karena timbulnya hierarki yang terdiri atas lapisan atau strata yang berlainan kedudukannya berdasarkan nilai utama masyarakat.²

1. **Sorokin**, mengartikan stratifikasi sosial sebagai perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat.
2. **Hendropuspito**, memahami stratifikasi sosial sebagai tatanan vertikal berbagai lapisan sosial berdasarkan tinggi-rendahnya kedudukan.
3. **Garna**, memandang stratifikasi sosial sebagai proses yang membedakan para individu dalam masyarakat yang menyebabkan munculnya suatu hirarki yang terdiri dari strata atau lapisan yang berlainan kedudukannya.
4. **Henslin**, memahami stratifikasi sosial sebagai suatu sistem dimana kelompok manusia terbagi dalam lapisan-lapisan sesuai dengan kekuasaan, kepemilikan, dan prestise relasi mereka. Stratifikasi sosial tidak merujuk pada individu tetapi merupakan cara untuk menggolongkan sejumlah

¹ Eko Handoyo, *op.cit.*, h.40.

² Sidi Gazalba, *op.cit.*, h. 17.

besar kelompok manusia kedalam suatu hierarki sesuai dengan hak-hak istimewa relatif mereka.³

2. Sifat Stratifikasi Sosial

Pelapisan sosial dalam masyarakat dapat menimbulkan mobilitas sosial secara vertikal maupun horizontal adalah menunjukkan kewenangan atau hak untuk melakukan sesuatu yang memberikan kemudahan dalam kehidupan. Selain itu sistem pelapisan sosial guna memudahkan pemecahan masalah yang timbul dalam masyarakat. Pelapisan masyarakat dalam konteks keruangan global misalnya adanya negara maju dan negara berkembang diperlukannya organisasi masyarakat dunia seperti misalnya PBB ASEAN dan lain-lain. Berdasarkan sifat dibedakan menjadi tiga yaitu:

a. Stratifikasi sosial tertutup

Stratifikasi ini adalah stratifikasi di mana anggota dari setiap strata sulit mengadakan mobilitas vertikal. Walaupun ada tetapi sangat terbatas pada mobilitas horizontal saja. Sebagai contoh misalnya sistem kasta Sudra tidak bisa pindah posisi naik di lapisan Brahmana, rasialis etnis kulit hitam dianggap di posisi rendah tidak bisa pindah posisi dan feodal para buruh tidak bisa pindah ke posisi juragan atau majikan. Berdasarkan contoh diatas stratifikasi ini terjadi atau berlaku pada konteks ruang yakni sistem kasta di India rasialis di Amerika dan tata pemerintahan sesuai zamannya.

b. Stratifikasi sosial terbuka

Stratifikasi ini bersifat dinamis karena mobilitasnya sangat besar. Setiap anggota serta dapat bebas melakukan mobilitas sosial baik vertikal maupun horizontal. Perpindahan strata relatif mudah contohnya dalam stratifikasi terbuka adalah seorang miskin karena usahanya yang turun di bidang ekonomi menjadi kaya dan dan contoh lain adalah seseorang memperoleh gelar keserjanaan karena menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Pelapisan terbuka terjadi karena adanya rekayasa misalnya adanya eselon yang membedakan tugas dan wewenang hak dan kewajiban perbedaan tanggung jawab dari

³ Eko Handoyo, *op.cit.*, h.40.

masing-masing pekerjaan atau sesuatu hak misalnya adanya pimpinan karyawan dan lain-lain, perbedaan kepentingan atau tanggung jawab dari masing-masing pekerjaan hal ini menimbulkan kedudukan jabatan tinggi menengah dan rendah.

c. Stratifikasi sosial campuran

Stratifikasi sosial campuran merupakan adanya kondisi kombinasi antara stratifikasi tertutup dan terbuka misalnya seorang Bali atau ruang A berkasta Sudra Namun apabila ia pindah ke Jakarta atau ruang B menjadi seseorang berjiwa ulet dan sukses niscaya dapat memperoleh kedudukan tinggi Maka dirinya harus menyesuaikan terhadap aturan kelompok masyarakat kelas tinggi dengan pergaulan tinggi.⁴

3. Fungsi Stratifikasi Sosial

Stratifikasi sosial dapat berfungsi sebagai berikut:

- a. Distribusi hak-hak istimewa yang objektif seperti menentukan penghasilan tingkat kekayaan keselamatan dan wewenang pada jabatan atau pangkat kedudukan seseorang.
- b. Sistem hirarki pada strata yang diciptakan masyarakat menyangkut prestis dan penghargaan misalnya pada seseorang yang menerima anugerah penghargaan atau gelar kebangsawanan
- c. Kriteria sistem pertentangan yaitu apakah didapat melalui kualitas pribadi keanggotaan kelompok tertentu kepemilikan wewenang atau kekuasaan
- d. Penentu lambang lambang simbol status atau kedudukan seperti tingkah laku cara berpakaian dan bentuk rumah
- e. Tingkat mudah tidaknya bertukar kedudukan
- f. Alat solidaritas diantara individu-individu atau kelompok yang menduduki sistem sosial yang sama dalam masyarakat.⁵

⁴ Eva Banowati, *op.cit.*, h. 59-61.

⁵ Eva Banowati, *op.cit.*, h. 61.

4. Ukuran Stratifikasi Sosial

Ukuran-ukuran dasar pembentukan pelapisan atau stratifikasi sosial

a. Ukuran kekayaan

Kekayaan dapat dijadikan ukuran penempatan anggota masyarakat kedalam lapisan-lapisan sosial yang ada barang siapa memiliki kekayaan paling banyak maka ia akan termasuk lapisan teratas dalam sistem pelapisan sosial, demikian pula sebaliknya barangsiapa tidak mempunyai kekayaan akan digolongkan ke dalam lapisan yang rendah. Kekayaan tersebut dapat dilihat antara lain pada bentuk tempat tinggal benda-benda tersiar yang dimilikinya cara berpakaian maupun kebiasaannya dalam berbelanja.

b. Ukuran kekuasaan dan wewenang

Seseorang yang mempunyai kekuasaan atau wewenang paling besar akan menempati lapisan teratas dalam sistem pelapisan sosial dalam masyarakat yang bersangkutan. Ukuran kekuasaan sering tidak lepas dari ukuran kekayaan sebab orang yang kaya dalam masyarakat biasanya dapat menguasai orang-orang lain yang tidak kaya atau sebaliknya kekuasaan dan wewenang dapat mendatangkan kekayaan.

c. Ukuran kehormatan

Ukuran kehormatan dapat terlepas dari ukuran-ukuran kekayaan atau kekuasaan. orang-orang yang disegani atau dihormati akan menempati lapisan atas dari sistem pelapisan sosial masyarakatnya. Ukuran kehormatan ini sangat terasa pada masyarakat tradisional biasanya mereka sangat menghormati orang-orang yang banyak jasanya kepada masyarakat para orang tua ataupun orang-orang yang berperilaku dan berbudi luhur.

d. Ukuran ilmu pengetahuan

Ukuran ilmu pengetahuan sering dipakai oleh anggota-anggota masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan. Seseorang yang paling menguasai ilmu pengetahuan akan menempati lapisan tinggi dalam sistem pelapisan sosial masyarakat yang bersangkutan. Penguasaan

ilmu pengetahuan ini biasanya terdapat dalam gelar-gelar akademik atau profesi yang disandang oleh seseorang misalnya dokter Insinyur dokterandes Dr ataupun gelas gelar profesional seperti profesor. Namun sering timbul akibat negatif dari kondisi ini jika gelar-gelar yang disandang tersebut lebih dinilai tinggi daripada ilmu yang dikuasainya sehingga banyak orang yang berusaha dengan cara-cara yang tidak benar untuk memperoleh gelar kesarjanaan misalnya dengan membeli skripsi, menyuap membeli palsu dan seterusnya.⁶

B. STRATIFIKASI SOSIAL DALAM PENDIDIKAN

Bagi kalangan kelompok masyarakat dari kelas bawah akan sangat berarti bila setelah memperoleh pendidikan tinggi memiliki akses memperoleh pekerjaan sehingga dapat mengubah struktur sosial yang seringkali diukur dengan tingkat pendapatannya. Akses untuk berbagai bentuk status pekerjaan juga akan menyulitkan bila tidak memiliki latar belakang pendidikan atau tidak menamatkan pendidikan tertentu atakanlah di perguruan tinggi di mana aksesnya akan terbatas. hal ini menunjukkan bahwa ijazah, tamatan pendidikan di perguruan tinggi kalau pun tidak selalu memperoleh akses langsung dalam status pekerjaan pada suatu perusahaan atau instansi tetapi akan jauh lebih baik dan lebih berprospek dalam memperoleh pekerjaan dibandingkan dengan mereka generasi muda yang tidak menempuh atau gagal dalam pendidikan. Kelompok masyarakat atau generasi muda yang *education* ini umumnya cenderung akan lebih sulit merangkak dan akhirnya dapat mengubah struktur sosial ekonomi ke arah yang lebih tinggi pada masyarakat manapun di dunia ini.⁷

⁶ Lely Risnawaty Daulay, *op.cit.*, h. 132-134.

⁷ Abdullah Idi, *op.cit.*, h. 190-191.

BAB XI

PENDIDIKAN DAN MOBILITAS SOSIAL

A. KONSEP MOBILITAS SOSIAL

1. Pengertian Mobilitas Sosial

Setiap manusia memiliki keinginan untuk mencapai status dan penghasilan yang lebih tinggi dari yang pernah dicapai oleh orang tuanya. Keinginan untuk mengubah nasib, dari nasib yang kurang baik menjadi nasib yang lebih baik merupakan impian setiap orang. Akan tetapi, apakah impian ini tercapai atau tidak, akan sampai atau tidak ialah lain persoalan. Di dalam sosiologi, proses keberhasilan seseorang mencapai jenjang sosial yang lebih tinggi atau kegagalan seseorang hingga jatuh di kelas sosial yang lebih rendah dinamakan mobilitas sosial.

Mobilitas berasal dari kata *Movere* (Bahasa Latin), artinya memindahkan atau berpindah. Mobilitas mudah dipindahkan atau banyak bergerak berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Mobilitas sosial berarti perpindahan orang atau kelompok dari suatu strata sosial ke strata sosial yang lain. Kimbal Yoeng mengatakan mobilitas sosial adalah suatu gerakan dalam struktur sosial yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Mobilitas sosial individu terjadi bersamaan dengan mobilitas sosial masyarakat.¹

Mobilitas sosial atau gerakan sosial yaitu keinginan akan perubahan yang diorganisasikan, perubahan itu didorong oleh keinginan manusia

¹ Philipus. 2009. *Sosiologi dan Politik*. Jakarta: Rajawali Pers, h. 49.

akan kehidupan dan keadaan yang lebih baik serta penggunaan penemuan-penemuan baru.² Mobilitas sosial adalah suatu pergerakan di dalamnya terbuka maupun tertutup. Dalam ilmu sosiologi mobilitas sosial berarti perpindahan status dalam stratifikasi sosial.³

Berikut pendapat beberapa ahli tentang mobilitas sosial:

- a. Menurut Horton dan Hunt, mengartikan mobilitas sosial sebagai suatu gerak perpindahan dari suatu kelas sosial ke kelas sosial lainnya.
- b. Menurut Kimball Young dan Raymond W. Mack, mobilitas sosial ialah suatu gerak dalam struktur sosial yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial.⁴
- c. Haditono dalam Idi (2011: 195) menyatakan bahwa mobilitas sosial adalah perpindahan seseorang atau kelompok dari kedudukan yang satu ke kedudukan yang lain, tetapi sejajar.

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan mobilitas sosial ialah peningkatan atau penurunan dari segi status dan peranan seseorang atau sekelompok orang yang biasanya dilihat dari segi penghasilan yang diperoleh. Misalnya, seorang anak pengusaha ingin mengikuti jejak ayahnya. Namun ia gagal dan jatuh miskin. Proses keberhasilan ataupun kegagalan setiap orang dalam melakukan gerak sosial seperti inilah yang disebut mobilitas sosial.

2. Jenis Mobilitas Sosial

a. Mobilitas Sosial Antar dan Inter Generasi

Suatu pokok bahasan yang banyak mendapat perhatian ahli sosiologi ialah masalah mobilitas intragenerasi dan mobilitas antargenerasi. Mobilitas intergenerasi mengacu pada mobilitas sosial yang dialami seseorang dalam masa hidupnya misalnya dari status asisten dosen menjadi guru besar atau dari perwira pertama menjadi perwira tinggi. Sedangkan mobilitas antargenerasi di lain pihak mengacu pada perbedaan status yang dicapai

² Sidi Gazalba, *op.cit.*, h. 142.

³ Lely Risnawaty Daulay, *op.cit.*, h. 135.

⁴ Setiadi, Elly M dan Usman Kolip. 2013. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, h. 503

seseorang dengan status orang tuanya misalnya anak seorang tukang sepatu yang berhasil menjadi seorang insinyur ataupun anak menteri yang menjadi pedagang kaki lima.⁵

b. Vertikal dan Horizontal

1) Mobilitas sosial vertikal: mobilitas sosial vertikal bisa berarti arah gerakannya ke atas dan arah gerakannya ke bawah. Pertama berarti individu yang kedudukannya rendah beralih kedudukannya kelebihan tinggi atau karena adanya pembentukan kelompok sosial baru yang menempatkan individu ke derajat yang lebih rendah atau karena pembentukan sosial baru. Pitirim A. Sorokin mengatakan ada beberapa prinsip gerakan vertikal yaitu:

- a) Hampir tidak ada masyarakat yang sistem pelapisan sosialnya tertutup seperti Kasta di India.
- b) Betapapun terbukanya suatu sistem pelapisan sosial masyarakat pasti ada hambatan-hambatannya
- c) Gerakan sosial vertikal berlaku umum bagi semua masyarakat
- d) Lalu gerakan sosial vertikal masyarakat disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi politik serta pekerjaan yang berbeda.
- e) Iya juga mengatakan gerakan sosial vertikal mendapatkan saluran-salurannya dalam lembaga Angkatan Bersenjata Lembaga Keagamaan sekolah-sekolah, organisasi politik, organisasi ekonomi, organisasi keahlian dan perkawinan.

2) Mobilitas sosial horizontal:

Perubahan kedudukan seseorang pada lapisan sosial yang sama. Kedudukan seseorang yang dapat maju atau mundur tetapi masa masih pada lapisan sosial yang sama. Konsekuensi mobilitas sosial: konflik antara kelas sosial, konflik antara kelompok sosial, konflik antara generasi kemungkinan adanya adaptasi.⁶

⁵ Lely Risnawaty Daulay, *op.cit.*, h. 135.

⁶ Philipus. 2009. *Sosiologi dan Politik*. Jakarta: Rajawali Pers, h. 49-50.

B. HUBUNGAN ANTARA PENDIDIKAN DAN MOBILITAS SOSIAL

Pendidikan menjadi salah satu saluran bagi seorang individu atau kelompok sosial untuk melakukan mobilitas sosial. Pendidikan telah membuka kemungkinan adanya mobilitas sosial, dengan pendidikan seseorang dapat meningkatkan status sosialnya. Pendidikan secara merata memberi kesamaan dasar pendidikan dan mengurangi perbedaan antara golongan tinggi dan rendah. Melalui pendidikan seseorang yang tidak bisa membaca jadi bisa membaca surat kabar dan majalah yang sama, bisa memikirkan masalah sosial, budaya, politik dan ekonomi yang sama. Pendidikan dapat dilihat sebagai suatu persiapan bagi struktur pekerjaan dan pendidikan juga bisa memberi peluang bagi individu untuk meningkatkan status pekerjaannya dibandingkan dengan misalnya pekerjaan ayahnya.⁷

Menurut Nasution, bahwa pendidikan dipandang sebagai jalan untuk mencapai kedudukan yang lebih baik di masyarakat. Makin tinggi pendidikan yang diperoleh makin besar harapan untuk mencapai tujuan itu, sehingga terbuka kesempatan untuk meningkat ke golongan sosial yang lebih tinggi. Dikatakan bahwa pendidikan merupakan jalan bagi mobilitas sosial.⁸

Adanya upaya untuk memperluas dan meratakan pendidikan diharapkan batasan antara golongan-golongan dapat dicairkan. Kesempatan belajar yang sama membuka jalan bagi setiap anak untuk memperoleh pekerjaan yang diinginkannya. Kewajiban belajar atau pendidikan universal memberikan pengetahuan dan keterampilan yang sama bagi semua dari semua golongan sosial.

Pendidikan membuka kemungkinan adanya mobilitas sosial. Berkat pendidikan seseorang dapat meningkat dalam status sosialnya. Pendidikan secara merata memberikan kesamaan dasar pendidikan dan mengurangi perbedaan antara golongan tinggi dan rendah. Melalui pendidikan tiap warga negara dapat membaca surat kabar dan majalah yang sama, dapat memikirkan masalah-masalah politik, sosial, ekonomi yang sama. Pendidikan sebagai salah satu lembaga yang memberikan bekal keterampilan,

⁷ Abdullah Idi, *op.cit.*, h. 200.

⁸ S. Nasution. 2009. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, h. 38.

keahlian, dan pengetahuan yang menyebabkan seseorang memperoleh posisi tertentu dalam masyarakat atau lingkungan kerjanya.

Menurut Nasution, bahwa sekolah dapat membuka kesempatan untuk meningkatkan status anak-anak dari golongan rendah. Di sekolah mereka mempunyai hak yang sama atas pelajaran, mempelajari buku yang sama, mempunyai guru yang sama, bahkan berpakaian seragam yang sama dengan anak-anak dari golongan tinggi. Prestasi yang tinggi di bidang akademis, olahraga, kegiatan ekstrakurikuler, organisasi sekolah, dan lain-lain, mereka akan diterima dan dihargai oleh semua murid. Ia diharapkan meneruskan pelajarannya di perguruan tinggi. Akan tetapi, bila ia hanya memiliki ijazah sekolah menengah, mungkin tingkat pendidikan itu kurang memadai dan tidak banyak artinya dalam meningkatkan kedudukan sosialnya. Pendidikan tinggi masih dapat memberikan mobilitas sosial walaupun dengan bertambahnya lulusan perguruan tinggi makin berkurang jaminan ijazah untuk meningkat dalam status sosial.⁹

Menurut PA. Sorokin, bahwa lembaga pendidikan umumnya merupakan saluran yang konkret dari mobilitas vertikal ke atas, bahkan dianggap sebagai *social elevator* (perangkat) yang bergerak dari kedudukan yang rendah ke kedudukan lebih tinggi. Pendidikan memberikan kesempatan pada setiap orang untuk mendapatkan kedudukan lebih tinggi. Seorang anak dari keluarga miskin mengenyam sekolah sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Setelah lulus dia memiliki pengetahuan bisnis dan menggunakan pengetahuannya untuk berusaha, sehingga dia berhasil menjadi pengusaha sukses, yang telah meningkatkan status sosialnya.¹⁰

C. FAKTOR PENGHAMBAT TERJADINYA MOBILITAS SOSIAL DALAM PENDIDIKAN

Sejumlah faktor yang dapat menghambat terjadinya mobilitas sosial dalam pendidikan antara lain:

1. Perbedaan Kelas Rasial

Seperti terjadi di Afrika Selatan pada masa lalu ketika itu Ras berkulit

⁹ S.N asution, *op.cit.*, h. 40.

¹⁰ Abdullah Idi, *op.cit.*, h. 199.

putih berkuasa dan tidak memberi kesempatan kepada mereka yang berkulit hitam untuk dapat duduk bersama-sama di pemerintahan sebagai penguasa dan juga termasuk di sistem pendidikan. Sistem ini dinamakan *Apartheid* dan dianggap berakhir ketika Nelson Mandela seorang kulit hitam terpilih menjadi presiden Afrika Selatan.

2. Agama

Negara yang mayoritas penduduknya menganut agama tertentu kadangkala mereka yang menganut agama tertentu akan mendapat kesulitan untuk menduduki tempat yang terhormat dalam realitas kehidupan berbangsa walaupun secara resmi agama minoritas memiliki hak yang sama.

3. Diskriminasi kelas

Dalam sistem kelas terbuka dapat menghalangi mobilitas ke atas. Hal ini terbukti dengan adanya pembatasan status organisasi tertentu dengan berbagai syarat dan ketentuan sehingga hanya sedikit orang yang mampu memperolehnya. Misalnya ketika penerimaan beasiswa unggulan dibatasi hanya 120 orang siswa berprestasi terbaik yang lulus sehingga adanya 120 orang yang mendapat kesempatan untuk menaikkan status sosialnya menjadi siswa unggulan di kota tertentu.

4. Kemiskinan

Kemiskinan dapat menghambat seseorang untuk berkembang dan mencapai status sosial tertentu. Misalnya seorang anak memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolahnya karena orang tuanya tidak dapat lagi membiayai sekolahnya. Sehingga anak tadi tidak memiliki kesempatan untuk meningkatkan status sosialnya.

5. Perbedaan jenis kelamin

Dalam masyarakat perbedaan jenis kelamin juga berpengaruh terhadap prestasi, kekuasaan, status sosial dan kesempatan kesempatan untuk meningkatkan status sosial. dalam bidang pendidikan jika ada siswa perempuan dan siswa laki-laki yang lebih cerdas karena kalah perlakuan berbeda juga terjadi misalnya anak laki-laki lebih diutamakan untuk menjadi ketua kelas.¹¹

¹¹ Abdullah Idi, *op.cit.*, h. 203-205.

BAB XII

PENDIDIKAN DAN PERUBAHAN SOSIAL

A. PENGERTIAN PERUBAHAN SOSIAL

Perubahan sosial merupakan gejala perubahan dari suatu keadaan sosial tertentu ke suatu keadaan sosial lain. Perubahan sosial pasti memiliki suatu arah dan tujuan tertentu. Pengaruh perubahan sosial hanya dapat diketahui seseorang yang sempat mengadakan penelitian susunan dan kehidupan suatu masyarakat pada saat tertentu, yang kemudian dibandingkan dengan keadaan pada waktu lain. Perubahan sosial dapat berupa suatu kemajuan (*progress*) atau sebaliknya dapat berupa suatu kemunduran (*regress*). Perubahan sosial tidak hanya membawa pengaruh positif bagi kehidupan masyarakat, tetapi juga berdampak negatif. Bagi seorang pendidik/guru, pengetahuan tentang perubahan sosial dan pendidikan serta berbagai dinamika perubahan sosial diperlukan sebagai upaya antisipatif dan responsif terhadap perubahan tersebut yang diharapkan berdampak positif dalam proses pembelajaran.¹

Perubahan-perubahan yang terjadi bisa merupakan kemajuan atau mungkin justru suatu kemunduran. Unsur-unsur kemasyarakatan yang mengalami perubahan biasanya adalah mengenai nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, pola-pola perikelakuan, organisasi sosial, lembaga-lembaga kemasyarakatan, stratifikasi sosial, kekuasaan, tanggung jawab, kepemimpinan dan sebagainya. Dalam masyarakat maju atau pada masyarakat berkembang, perubahan-perubahan sosial dan kebudayaan

¹ Abdullah Idi. 2011. Sosiologi Pendidikan: Individu, Masyarakat dan Pendidikan. Jakarta: Rajawali Pers., h. 207.

selalu berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi. Menurut Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi bahwa perubahan-perubahan di luar bidang ekonomi tidak dapat dihindarkan oleh karena setiap perubahan dalam suatu lembaga kemasyarakatan akan mengakibatkan pula perubahan-perubahan di dalam lembaga kemasyarakatan lainnya. Oleh karena antara lembaga-lembaga kemasyarakatan tersebut selalu ada proses saling mempengaruhi secara timbal balik. Perubahan-perubahan pada dewasa ini nampak sangat cepat sehingga semakin sulit untuk mengetahui bidang-bidang manakah yang akan berubah terlebih dahulu dalam kehidupan masyarakat. Namun demikian secara umum perubahan-perubahan itu biasanya bersifat berantai dan saling berhubungan antara satu unsur dengan unsur kemasyarakatan yang lainnya.² Berdasarkan uraian di atas maka yang dimaksud dengan perubahan sosial itu adalah perubahan fungsi kebudayaan dan perilaku manusia dalam masyarakat dari keadaan tertentu keadaan yang lain.

Dalam penelaahan mengenai perubahan-perubahan sosial yang relatif kompleks tersebut sering para ahli mengalami kekaburan tertentu tentang ruang lingkup, batasan pengertian dan aspek-aspek yang utama dalam perubahan tersebut. Untuk menghindari kesulitan tersebut, maka faktor utama yang paling penting untuk diketahui dan dipahami adalah tentang batas pengertian dari perubahan sosial itu sendiri.

1. **William F. Ogburn**, mengemukakan ruang lingkup perubahan-perubahan meliputi unsur-unsur kebudayaan baik yang material maupun yang immaterial, yang ditekankan adalah pengaruh besarnya perubahan kebudayaan material terhadap unsur-unsur immaterial.
2. **Kingsley Davis**, mengartikan perubahan sosial sebagai perubahan perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat, misalnya timbulnya pengorganisasian buruh dalam masyarakat kapitalis yang menyebabkan perubahan-perubahan hubungan antara buruh dengan majikan dan seterusnya yang menyebabkan perubahan perubahan dalam organisasi ekonomi dan politik.
3. **Mac Iver** lebih suka membedakan antara *utilitarian* dengan *cultural elements* yang didasarkan pada kepentingan-kepentingan manusia

² Abdul Syani, *op.cit.*, h. 163.

yang beriman dan sekunder. Semua kegiatan ciptaan manusia dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori tersebut yaitu primer dan sekunder. Mesin ketik, alat pencetak atau keuangan merupakan *utilitarian elements* karena benda-benda tersebut tidak langsung memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia tetapi dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia. *Unilitarian element* disebutnya *civilization* artinya suatu mekanisme dan organisasi yang dibuat manusia dalam upaya menguasai kondisi-kondisi kehidupannya termasuk di dalamnya sistem-sistem organisasi sosial, teknik dan alat-alat material, telepon, jalan kereta api, sekolah, hukum dan seterusnya dimaksudkan ke dalam golongan tersebut. *Culture* menurut Mac Iver adalah ekspresi jiwa yang terwujud dalam cara-cara hidup dan berfikir, pergaulan hidup, seni, kesusastraan, agama, rekreasi dan hiburan. Sebuah potret, novel, drama, film, permainan filsafat dan sebagainya termasuk kultur karena hal hal ini secara langsung memenuhi kebutuhan manusia. Dengan pernyataan itu, Mac Iver mengeluarkan unsur material dari ruang lingkup kultur. Perubahan-perubahan sosial dikatakan sebagai perubahan-perubahan dalam hubungan sosial dan sebagai perubahan terhadap keseimbangan hubungan sosial.

4. **Gillin dan Gillin** menyatakan perubahan-perubahan sosial sebagai suatu variabel dari cara-cara hidup yang telah diterima baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan, material, komposisi penduduk, ideologi maupun karena adanya difusi atau penemuan penemuan baru dalam masyarakat.
5. **Samuel Koenig**, mengatakan bahwa perubahan sosial menunjuk pada modifikasi-modifikasi yang terjadi dalam pola-pola kehidupan manusia. Modifikasi-modifikasi terjadi karena sebab-sebab Intern menuju sebab-sebab ekstern.
6. **Selo Soemardjan**, rumusannya adalah segala perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap dan pola perilaku di antara kelompok kelompok dalam masyarakat. Tekanan pada definisi tersebut terletak pada lembaga-lembaga kemasyarakatan sebagai bagian himpunan pokok

manusia, perubahan-perubahan tersebut kemudian mempengaruhi segi-segi struktur masyarakat lainnya.³

7. **Bruce Jenner dan Cohem**, mengemukakan bahwa perubahan sosial adalah perubahan struktur sosial dan perubahan pada organisasi sosial. Misalnya, perubahan dalam satu segi dari kehidupan sosial menunjukkan perubahan karena terjadi perubahan dalam struktur sosial dan organisasi sosial, yang merupakan syarat utama dalam perubahan itu adalah sistem sosial dalam pergaulan hidup yang menyangkut nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat.
8. **Roucek dan Warren**, mengemukakan bahwa perubahan sosial adalah perubahan dalam proses sosial atau dalam struktur masyarakat.⁴
9. **Daniel Bell**, menyebut adanya masyarakat *post industrial* dengan ciri berorientasi pada orang yakni pelayanan jasa meningkatnya pekerjaan profesional dan teknis misalnya hukum kedokteran konselor dan lain-lain.
10. **Karl Marx**, perubahan sosial terjadi karena perkembangan teknologi atau kekuatan produktif dan hubungan antara kelas-kelas sosial yang berubah.⁵
11. **Everet M. Rogers**, ada tiga macam perubahan sosial:
 - a. *Immament change*, suatu perubahan sosial yang berasal dari sistem itu sendiri dengan sedikit atau tanpa inisiatif dari luar.
 - b. *Selective contract change*, suatu perubahan sosial yang terjadi apabila *outsder* secara tidak sengaja dan spontan membawa ide-ide baru kepada anggota dari suatu sistem sosial.
 - c. *Direct contract change*, suatu perubahan terjadi bila ide-ide atau cara-cara baru di bawah secara sengaja oleh *outsider*.

³ Soerjono Soekanto, *op.cit.*, . 336-337.

⁴ Abdul Syani, *op.cit.*, h. 163.

⁵ Philipus dan Nurul Aini. 200g. *Sosiologi Politik*. Jakarta: Rajawali Pers, h. 56.

B. BENTUK-BENTUK PERUBAHAN SOSIAL

1. Perubahan Lambat dan Perubahan Cepat

a. Perubahan lambat atau evolusi

Perubahan-perubahan yang memerlukan waktu lama dan rentetan-rentetan perubahan kecil yang saling mengikuti dengan lambat dinamakan evolusi. Pada evolusi perubahan terjadi dengan sendirinya tanpa rencana atau kehendak tertentu. Perubahan tersebut terjadi karena usaha-usaha masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan keperluan-keperluan, keadaan-keadaan dan kondisi-kondisi baru yang timbul sejalan dengan pertumbuhan masyarakat. Rentetan perubahan-perubahan tersebut tidak perlu sejalan dengan rentetan peristiwa-peristiwa dalam sejarah masyarakat yang bersangkutan.

b. Perubahan cepat atau revolusi

Sementara itu perubahan-perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung dengan cepat dan menyangkut dasar-dasar atau sendi-sendi pokok kehidupan masyarakat yaitu lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya dinamakan **revolusi**. Unsur-unsur pokok revolusi adalah adanya perubahan yang cepat dan perubahan tersebut mengenai dasar-dasar atau sendi-sendi pokok kehidupan masyarakat. Di dalam revolusi perubahan-perubahan yang terjadi dapat direncanakan terlebih dahulu atau tanpa rencana. Ukuran kecepatan suatu perubahan yang dinamakan revolusi sebenarnya bersifat relatif karena revolusi dapat memakan waktu yang lama. Misalnya revolusi industri di Inggris, di mana perubahan-perubahan terjadi dari tahap produksi tanpa mesin menuju tahap produksi menggunakan mesin. Perubahan tersebut sangat cepat karena mengubah sendi-sendi pokok kehidupan masyarakat seperti sistem kekeluargaan, hubungan antara buruh dengan majikan dan seterusnya. Suatu revolusi dapat berlangsung dengan didahului oleh suatu pemberontakan yang kemudian menjelma menjadi revolusi. Pemberontakan para petani di Banten pada 1888 misalnya didahului dengan suatu kekerasan, sebelum menjadi revolusi yang mengubah sendi-sendi kehidupan masyarakat.

2. Perubahan Kecil dan Perubahan Besar

Agak sulit untuk menuliskan masing-masing pengertian tersebut di atas. Sebagai pegangan dapatlah dikatakan bahwa perubahan-perubahan kecil adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat. Perubahan mode pakaian misalnya, tidak membawa pengaruh apa-apa bagi masyarakat dalam keseluruhan karena tidak mengakibatkan perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan. Sebaliknya suatu proses industrialisasi yang berlangsung pada masyarakat agraris misalnya, merupakan perubahan yang akan membawa pengaruh besar pada masyarakat. Berbagai lembaga-lembaga kemasyarakatan akan ikut terpengaruh misalnya hubungan kerja, sistem milik tanah, hubungan kekeluargaan, stratifikasi masyarakat dan seterusnya.⁶

3. Perubahan yang dikehendaki dan direncanakan atau perubahan yang tidak dikehendaki dan tidak direncanakan

Perubahan yang dikehendaki atau direncanakan merupakan perubahan yang diperkirakan atau yang telah direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan di dalam masyarakat. Pihak-pihak yang menghendaki perubahan dinamakan *Agent of Change* yaitu seseorang atau kelompok orang yang mendapat kepercayaan masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. *Agent of change* langsung masyarakat dalam mengubah sistem sosial. Dalam melaksanakan *agent of changes* langsung tersangkut dalam tekanan-tekanan yang mengadakan perubahan. Bahkan mungkin menyebabkan pada perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya. Suatu perubahan yang dikehendaki atau yang direncanakan berada di bawah pengendalian serta pengawasan *agent of change* tersebut. Cara-cara mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu dinamakan rekayasa sosial atau sering pula dinamakan perencanaan sosial.⁷

Perubahan sosial yang tidak dikehendaki atau yang tidak direncanakan

⁶ Soerjono Soekanto, *op.cit.*, h. 348-349.

⁷ Soerjono Soekanto, *op.cit.*, h. 348.

merupakan perubahan-perubahan yang terjadi tanpa dikehendaki, berlangsung di luar jangkauan pengawasan masyarakat dan dapat menyebabkan timbulnya akibat-akibat sosial yang tidak diharapkan masyarakat. Apabila perubahan yang tidak dikehendaki tersebut berlangsung bersamaan dengan suatu perubahan yang dikehendaki, maka perubahan tersebut mungkin mempunyai pengaruh yang demikian besarnya terhadap perubahan-perubahan yang dikehendaki. Dengan demikian, keadaan tersebut tidak mungkin diubah tanpa mendapat halangan-halangan masyarakat itu sendiri atau dengan perkataan lain perubahan yang dikehendaki diterima oleh masyarakat dengan cara mengadakan perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada atau dengan cara membentuk yang baru. Seringkali terjadi bahwa perubahan yang dikehendaki bekerjasama dengan perubahan yang tidak dikehendaki dan kedua proses tersebut saling pengaruh-mempengaruhi.⁸

C. PROSES TERJADINYA PERUBAHAN SOSIAL

Dilihat dari proses terjadinya perubahan sosial, proses awal perubahan sosia-budaya adalah:

1. Komunikasi

Dimana melalui kontak komunikasi unsur-unsur baru dapat menyebar baik berupa ide, gagasan, keyakinan maupun kebendaan. Proses penyebaran unsur kebudayaan dari satu masyarakat kepada masyarakat lain disebut proses difusi. Proses berlangsungnya difusi akan mendorong terjadinya akulturasi dan asimilasi. Dalam proses difusi berlangsung ada banyak kejadian yang beragam masuk unsur-unsur kebudayaan baru, dari satu kelompok masyarakat kepada kelompok masyarakat lainnya. Beberapa kejadian tersebut adalah secara damai melalui paksaan atau kekerasan, melalui simbolik yaitu melalui proses hidup secara berdampingan. Ada tiga macam proses simbiotik:

- a) *Mutualistik*, proses simbiotik yang saling menguntungkan.
- b) *Komensalistik*, proses simbiotik dimana satu pihak untung, sedangkan pihak lainnya tidak untung dan tidak rugi.

⁸ Soerjono Soekanto, *op.cit.*, h. 348.

- c) *Parasilistik* yaitu proses simbiotik dimana yang satu untung dan yang lain dirugikan.⁹

2. Akulturasi

Merupakan proses penerimaan unsur-unsur kebudayaan baru dari luar secara lambat dengan tidak menghilangkan sifat khas kepribadian kebudayaan. Contohnya, budaya selamatan merupakan bentuk akulturasi antara budaya lokal dengan Jawa dengan budaya Islam.¹⁰

Akulturasi ialah proses sosial yang timbul apabila sekelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan pada unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri, tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu. Unsur kebudayaan tidak pernah didifusikan secara terpisah, tapi senantiasa dalam suatu gabungan kompleks yang terpadu. Gerak migrasi suku-suku bangsa yang telah berlangsung sejak lama telah mempertemukan berbagai kelompok manusia dengan kebudayaan yang berbeda-beda, sehingga terjadi unsur-unsur pengenalan mereka dengan unsur-unsur kebudayaan asing, contohnya: modernisasi sebagai unsur-unsur kebudayaan Eropa dan Amerika telah menyebar.¹¹

3. Asimilasi

Asimilasi ialah suatu proses sosial yang terjadi pada berbagai golongan manusia dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda setelah mereka bergaul secara intensif, sehingga sifat khas dari unsur-unsur kebudayaan golongan-golongan itu masing-masing berubah menjadi unsur-unsur kebudayaan campuran. Biasanya suatu proses asimilasi terjadi antara suatu golongan dengan golongan minoritas yang berubah dan menyesuaikan diri dengan golongan mayoritas, sehingga sifat-sifat khas dari kebudayaannya lambat laun berubah dan menyatu dengan kebudayaan golongan mayoritas. Dari berbagai proses asimilasi yang diteliti, diketahui bahwa pergaulan intensif saja belum tentu mengakibatkan terjadinya suatu proses asimilasi, tanpa adanya toleransi dan simpati antara kedua golongan, contohnya adalah orang cina

⁹ Abdullah Idi, *op.cit.*, h. 212.

¹⁰ Abdullah Idi, *op.cit.*, h. 212.

¹¹ Koentjaraningrat, *op.cit.*, h. 247.

di Indonesia yang walaupun telah bergaul secara intensif dengan penduduk pribumi bangsa Indonesia sejak beberapa abad, belum seluruhnya terintegrasi ke dalam masyarakat dan kebudayaan Indonesia. Sebaliknya, kurangnya toleransi dan simpati terhadap suatu kebudayaan lain umumnya disebabkan karena berbagai kendala yaitu kurangnya pengetahuan mengenai kebudayaan pihak yang dihadapi, kekhawatiran akan kekuatan yang dimiliki kebudayaan tersebut, dan perasaan bahwa kebudayaannya sendiri lebih unggul daripada kebudayaan pihak yang dihadapi.¹²

Soerjono Soekanto menjelaskan mengenai proses perubahan sosial-budaya yaitu:

1. Penemuan

Penemuan merupakan persepsi manusia yang dianut secara bersama mengenai suatu aspek kenyataan yang semula sudah ada. Prinsip pengungkit atau lever, sirkulasi darah dan refleks yang sudah menjadi kebiasaan memang sudah lama ada sebelum manusia menemukannya. Penemuan merupakan tambahan pengetahuan terhadap perbendaharaan pengetahuan dunia yang telah diverifikasi. Penemuan menambahkan sesuatu yang baru pada kebudayaan karena meskipun kenyataan tersebut sudah lama ada, namun kenyataan itu baru menjadi bagian dari kebudayaan pada saat kenyataan tersebut ditemukan.¹³

Penemuan baru menjadi satu faktor dalam perubahan sosial jika hasil penemuan didayagunakan. Meskipun orang Yunani purba telah mengetahui kekuatan tenaga uap dan sebelum tahun 100 Hero dari Alexandria telah membangun mesin tenaga uap kecil sebagai barang mainan, namun tenaga uap belum menimbulkan perubahan sosial hingga tenaga uap itu didayagunakan secara serius, kurang lebih 2000 tahun kemudian. Penemuan baru menjadi satu faktor dalam perubahan sosial jika penemuan tersebut diterapkan untuk kegunaan baru.¹⁴

¹² Koentjaraningrat, *op.cit.*, h. 255.

¹³ Paul B. Horton dan Chester L. Hunt, *op.cit.*, h. 211.

¹⁴ Paul B. Horton dan Chester L. Hunt, *op.cit.*, h. 212.

2. Invensi

Invensi seringkali disebut sebagai suatu kombinasi baru atau cara penggunaan baru dari pengetahuan yang sudah ada. Pada tahun 1895 George Selden mengkombinasikan mesin gas cair tangki, gas cair gigi, persneling, kopeling, tangkai kemudi atau (stir) dan badan kereta kemudian mempatenkan mesin aneh tersebut sebagai mobil. Tidak satupun dari semua benda tersebut yang baru diciptakan. Satu-satunya yang baru adalah penggunaan segenap itu dengan cara menggabungkannya. Hak paten selden mendapat kecaman dan pada akhirnya hak patennya dicabut kembali oleh badan pengadilan dengan alasan bahwa ide pengkombinasian alat tersebut bukanlah ide asli Selden.¹⁵

Meskipun unsur-unsur yang sudah ada memang berperan dalam suatu invensi baru, tetapi ide pengkombinasian alat-alat demi satu kegunaan itulah yang menyebabkan timbulnya sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Jadi besi yang ditambah dengan sejumlah kecil logam lainnya berubah menjadi baja suatu logam campuran yang ciri khasnya tidak sama dengan jenis logam yang telah dikenal sebelumnya. Demikian pula halnya dengan potongan batang kayu yang bundar atau batu dan kayu yang panjang bukanlah sesuatu yang baru, tetapi roda dan gandar merupakan sesuatu yang baru. Roda menggunakan bahan dan potongan pohon atau batu sebagai roda.¹⁶

Invensi dapat dibagi ke dalam dua klasifikasi:

- a. Invensi material misalnya busur, dan anak panah, telepon dan pesawat terbang.
- b. Invensi sosial misalnya abjad pemerintahan konstitusional dan perusahaan.

Pada kedua ragam invensi tersebut unsur-unsur lama digunakan, dikombinasikan dan dikembangkan untuk suatu kegunaan baru. Dengan demikian, invensi merupakan proses yang berkesinambungan, setiap invensi baru diawali oleh serangkaian invensi dan penemuan terdahulu. Dalam sebuah buku yang ditulis secara populer, Burlingame menganalisis sejumlah invensi yang sudah dikenal dan menunjukkan bagaimana

¹⁵ Paul B. Horton dan Chester L. Hunt, *op.cit.*, h. 212.

¹⁶ Paul B. Horton dan Chester L. Hunt, *op.cit.*, h. 212

setiap invensi itu lahir ratusan atau ribuan tahun lalu dan memulai puluhan invensi terdahulu serta beberapa tahap antara. Invensi bukanlah semata-mata gejala yang berjalan sendiri melainkan suatu proses sosial yang mencakup serangkaian modifikasi pengembangan dan kombinasi ulang yang tanpa akhir. Sebagaimana yang dikatakan oleh Gillin, setiap invensi dapat bersifat baru dalam segi bentuk fungsi dan makna. Bentuk mengacu pada wujud objek baru atau tindakan yang bersifat baru. Fungsi mengacu pada ada sesuatu yang dapat diberikan oleh invensi. Makna mengacu pada konsekuensi jangka panjang dari penggunaan invensi tersebut. Dapat ditambahkan bahwa suatu invensi dapat bersifat baru dari segi prinsip yakni dalil dasar ilmu pengetahuan yang mendasari invensi itu.¹⁷

Mesin jahit dan mesin seher atau piston menggunakan prinsip yang sama, pengembangan daya gas yang dipanasi tetapi berbeda dalam segi bentuk, yang satu menggunakan desakan gas langsung untuk mendorong yang lainnya untuk menekan seher dalam silinder. Mesin uap dan mesin seher berbahan bakar bensin memiliki persamaan dalam segi prinsip, yang satu menciptakan pengembangan daya gas dengan cara mendidihkan air yang lainnya dengan cara memanaskan bensin. Busur dan anak panah berbeda dengan tombak primitif baik dalam segi prinsip maupun segi bentuk, tetapi semuanya memiliki fungsi dan makna yang sama. Kereta beroda merupakan sesuatu yang baru dari segenap segi, baru dalam segi prinsip karena beban kereta tersebut diangkut dengan menggunakan roda atau as roda, bukannya dibungkus lalu diseret, baru dalam bentuk kereta model kereta itu belum ada sebelumnya, baru dalam segi fungsi karena kereta itu mengangkut baik manusia maupun barang, baru dalam segi makna karena kereta tersebut memungkinkan dilakukannya perjalanan jarak jauh ke banyak pelosok. Tidak banyak invensi yang baru dalam persegi tersebut.¹⁸

Kebanyakan invensi ditemukan oleh orang yang telah bekerja sendiri dalam kelompok kecil. Sebelum menjadi produk yang dapat dipasarkan hasil invensi biasanya ditemukan setelah melalui masa pengembangan yang lama yang mencakup puluhan tahun, kebanyakan penemun bukan

¹⁷ Paul B. Horton dan Chester L. Hunt, *op.cit.*, h. 213.

¹⁸ Paul B. Horton dan Chester L. Hunt, *op.cit.*, h. 213.

ilmuwan melainkan orang-orang yang citranya sangat bertentangan dengan gambaran umum. Mereka adalah orang yang bekerja dengan para ilmuwan dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan pada masanya

Mereka terutama didorong oleh keinginan untuk membuat sesuatu yang baru bukannya oleh keinginan untuk menjadi kaya, sehingga kebanyakan penemu hanya memperoleh uang sedikit atau sama sekali tidak ada dari hasil temuannya. Edison misalnya menyatakan bahwa ia menghabiskan uang untuk membiayai invensinya dan hanya memperoleh pendapatan dari pabriknya.¹⁹

Dewasa ini semakin banyak invensi yang ditemukan melalui upaya tim penelitian pada perusahaan besar badan pemerintahan dan laboratorium universitas. Kebanyakan penelitian dan kegiatan pengembangan perusahaan bertujuan untuk meningkatkan mutu produk bukannya untuk menemukan invensi baru, sedang dana pemerintah sebagian besar disalurkan untuk pengembangan persenjataan. Jadi terlepas dari adanya institusionalisasi penelitian penemu tunggal atau tim penemu kecil yang tidak terikat masih memberikan banyak informasi baru yang bermanfaat.²⁰

3. Difusi

Difusi ialah proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan. Bersama dengan penyebaran dan migrasi kelompok-kelompok manusia, turut tersebar pula berbagai unsur kebudayaan. Penyebaran unsur-unsur kebudayaan juga dapat terjadi tanpa ada perpindahan kelompok-kelompok manusia atau bangsa-bangsa, tetapi karena unsur-unsur kebudayaan itu memang sengaja dibawa oleh individu-individu tertentu, seperti para pedagang dan pelaut. Penyebaran unsur-unsur kebudayaan berdasarkan pertemuan-pertemuan antara individu-individu dari berbagai kelompok yang berbeda. Hubungan antara kelompok-kelompok yang berbeda-beda yang telah berlangsung selama berabad-abad itu dan hampir tidak mempengaruhi bentuk kebudayaan masing-masing disebut hubungan simbiotik. Selain itu ada juga penerobosan dengan jalan damai misalnya perdagangan

¹⁹ Paul B. Horton dan Chester L. Hunt, *op.cit.*, h. 213.

²⁰ Paul B. Horton dan Chester L. Hunt, *op.cit.*, h. 213.

disebut “*penetration pacifique*”. Unsur-unsur kebudayaan asing turut masuk ke dalam kebudayaan penerima secara tidak sengaja dan tanpa paksaan. Perang dan serangan penaklukan merupakan cara penerobosan dengan jalan tidak damai, dan sebenarnya merupakan awal dari proses masuknya unsur-unsur kebudayaan asing. Proses lanjutan dari penaklukan adalah penjajahan, yang merupakan saat masuknya unsur-unsur kebudayaan asing.²¹

Pertemuan antara kebudayaan-kebudayaan yang disebabkan oleh penyebaran agama biasanya baru dimulai setelah terjadi suatu penaklukan, karena proses akulturasi seperti itu biasanya baru mulai dengan kedatangan para penyiari agama yang turut bersama suatu pemerintahan jajahan. Suatu difusi yang meliputi suatu wilayah yang luas biasanya terjadi melalui serangkaian pertemuan antara sejumlah suku bangsa. Suku bangsa A, misalnya bertemu dengan suku bangsa B dengan suatu cara tertentu. Suku bangsa B bertemu dengan suku bangsa C dengan cara yang sama pula atau dengan cara yang lain. Suku bangsa C mungkin bertemu dengan suku bangsa D dengan cara lain lagi. Cara-cara yang berbeda itu kemudian didifusikan dari A ke B, ke C, ke D dan seterusnya. Proses difusi semacam ini dalam *antropologi* disebut stimulus *diffusion*. Dengan berkembangnya media elektronik akhir-akhir ini, difusi unsur-unsur kebudayaan yang muncul disuatu tempat berlangsung sangat cepat, bahkan umumnya tanpa adanya kontak secara pribadi antara individu-individu di dua tempat yang berbeda itu.²²

D. KAITAN ANTARA PERUBAHAN SOSIAL DALAM PENDIDIKAN

Pertama perubahan sosial ditinjau dari pendidikan tradisional, kita lihat pedagogik tradisional memandang lembaga pendidikan sebagai salah satu dari struktur sosial dan kebudayaan dalam suatu masyarakat. Lembaga pendidikan seperti sekolah perlu disiapkan agar lembaga tersebut berfungsi sosial dengan perubahan sosial yang terjadi. Apabila lembaga

²¹ Koentjaraningrat, *op.cit.*, h. 242.

²² Koentjaraningrat, *op.cit.*, h. 243.

sekolah tidak dapat mengikuti perubahan sosial, maka dia kehilangan fungsinya dan kemungkinan besar dia ditinggalkan masyarakat.²³

Sebagai lembaga sosial proses belajar di sekolah disesuaikan dengan fungsi dan peranan lembaga pendidikan. Fungsi sekolah ialah mentransmisikan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat dan kebudayaan pada saat itu. Di dalam *pedagogik* tradisional tempat individu adalah sebagai objek perubahan sosial. Individu tersebut mempelajari peranan yang baru di dalam kehidupan sosial yang berubah. Sekolah adalah tempat yang memperoleh legitimasinya dari kehidupan masyarakat atau pemerintah yang mempunyainya. Dalam pendekatan perencanaan pendidikan kita mengenal 4 pendekatan:

- a. Pendekatan kebutuhan sosial
- b. Pendekatan ketenagakerjaan
- c. Pendekatan untung rugi
- d. Efektivitas.

Keempat pendekatan ini mencoba memberikan alternatif pendekatan perencanaan pendidikan agar sesuai dengan perubahan sosial di lingkungan sekitarnya, misalnya di suatu daerah lebih banyak dibutuhkan tenaga kerja dalam bidang teknik maka dapat mendirikan sekolah dengan pendekatan perencanaan *man power approach* seperti STM dan SMK.²⁴

Kedua perubahan sosial ditinjau dari pedagogik modern. Titik tolak dari *pedagogik* transformatif ialah individu yang menjadi. Hal ini berarti seorang individu hanya dapat berkembang di dalam interaksinya dengan tatanan kehidupan sosial budaya di mana dia hidup. Individu tidak dapat berkembang apabila diisolasikan dari dunia sosial budaya di mana ia hidup. Adanya suatu pengakuan peran aktif partisipatif dari individu menjadi dalam tatanan kehidupan sosial dan budayanya. Individu bukanlah sekedar menerima nilai-nilai tersebut hanya dapat dimilikinya melalui peranannya yang aktif partisipatif di dalam aktivitas sosial budaya dalam lingkungannya. Jadi berbeda dengan pandangan pedagogik tradisional yang melihat individu sebagai suatu makhluk yang pasif atau reaktif

²³ Abdullah Idi, *op.cit.*, h. 22o.

²⁴ Abdullah Idi, *op.cit.*, h. 22o.

yang hanya berkembang karena pengaruh pengaruh dari luar termasuk pengaruh dari perubahan sosial yang terjadi dalam lingkungannya.²⁵

Pandangan pedagogik transformatif terhadap individu bukanlah sebagai suatu *entity* yang telah terjadi tetapi yang sedang menjadi. Individu mempunyai peran emansipatif di dalam kehidupan sosial-budaya termasuk melalui proses pendidikan dalam lingkungan keluarga dan sekolah. Di dalam peranannya yang emansipatif tersebut maka individu bukan hanya sebagai objek dari perubahan sosial tetapi sekaligus pula berperan sebagai faktor dari pengubah dan pengarah dari perubahan sosial atau sebagai agen perubahan agen.²⁶

Dalam pendidikan transformatif peserta didik yang berperan terjadinya perubahan dalam diri mereka. Adapun peran guru hanyalah sebagai pendorong dan motivator. Dalam hal ini kita ingat filosofi Ki Hajar Dewantara yang berbunyi Tut Wuri Handayani artinya dari belakang memberikan dorongan dan arahan. Hal ini mempunyai makna yang kuat tentang peran dan fungsi guru. Para guru perlu berperan sebagai pendorong atau motivator. Mereka juga perlu berperan sebagai pengarah atau pembimbing yang tidak membiarkan peserta didik melakukan hal yang kurang sesuai dengan tujuan pendidikan. Dengan demikian, para guru perlu menjadi fasilitator agar dorongan dan bimbingan dapat terwujud dalam perubahan perilaku peserta didik.²⁷

Kalau di atas telah di singgung berbagai persoalan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat maupun di lingkungan lembaga pendidikan baik pendidikan tradisional maupun modern peran pendidikan nasional sebagai pendorong perubahan sosial terlihat dalam undang-undang sisdiknas 2003 pasal 3:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan

²⁵ Abdullah Idi, *op.cit.*, h. 220-221.

²⁶ Abdullah Idi, *op.cit.*, h. 221.

²⁷ Abdullah Idi, *op.cit.*, h. 221.

*Yang Maha Esa berakhlak mulia sehat berilmu cakap kreatif mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.*²⁸

Dalam undang-undang Sisdiknas di atas tampak bahwa fungsi pendidikan nasional sebagai salah satu faktor perubahan sosial atau pengembangan potensi kompetensi peserta didik. Perubahan-perubahan tersebut adalah pengembangan kemampuan baik intelektual maupun interaksi sosial, pembentukan watak, pembentukan peradaban bangsa yang bermartabat di mata bangsa lain dan mencerdaskan bangsa kehidupan bangsa dan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.²⁹

Sebagai antisipasi perubahan sosial yang senantiasa dinamis dan mondial diupayakan suatu persiapan generasi masa depan yang dapat hidup sesuai dengan zamannya. Karena itu dalam peraturan pemerintah atau PP Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan diperlukan standar nasional pendidikan sebagai kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setidaknya terdapat 8 standar nasional pendidikan yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian pendidikan.³⁰ Jadi, dengan melihat nilai-nilai perubahan sosial yang termasuk dalam fungsi pendidikan nasional dapat dipahami bahwa pendidikan nasional memiliki muatan nilai sebagai pendorong terjadi perubahan sosial khususnya pengembangan potensi kompetensi peserta didik sebagai salah satu bagian dari masyarakat sosial.³¹

Sebagai pandangan pendidikan transformasi terhadap individu bukanlah sebagai suatu *entity* yang telah terjadi tetapi yang sedang menjadi. Individu mempunyai peran emansipatif di dalam kehidupan sosial budaya

²⁸ Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) 2003. UU RI No. 20 TH. 2003. 2007. Jakarta: Sinar Grafika, h. 5.

²⁹ Abdullah Idi, *op.cit.*, h. 222.

³⁰ Abdullah Idi, *op.cit.*, h. 222.

³¹ Abdullah Idi, *op.cit.*, h. 222.

termasuk melalui proses pendidikan dalam lingkungan keluarga dan sekolah. Di dalam perannya yang emansipatif tersebut individu bukan hanya sebagai objek dari perubahan sosial, tetapi sekaligus sebagai faktor dari pengubah dan pengarah dari perubahan sosial.³²

Keberadaan pendidikan sebagai faktor perubahan sosial, peranan pendidik atau guru memiliki peranan strategi dalam mewujudkan anak didik agar siap dalam menghadapi perubahan sosial yang diharapkan. Sebagaimana diungkapkan Amanda Coffey bahwa pendidik atau guru dari hari ke hari bekerja untuk sekolah sebagai kunci pelaku implementasi kebijakan pendidikan, sebagai faktor sosial yang utama dalam pendidikan. pendidik memiliki tanggungjawab dalam melengkapi praktik pedagogik sebagai mana halnya transmisi pengetahuan dan keterampilan. Mereka juga bertanggung jawab terhadap manajemen ruangan kelas. Pendidik menempati posisi terdepan dalam kebijakan dan perubahan sosial.³³

Karena pendidikan sebagai suatu proses sosial yang terdapat banyak jenis masyarakat suatu kriteria untuk mengkritisi dan membangun pendidikan berimplikasi pada suatu masyarakat yang ideal. Terdapat dua hal penting dalam mengukur suatu bentuk masyarakat, yang dikatakan ideal adalah sejauh mana keinginan dari suatu kelompok dapat diperoleh semua anggota kelompok masyarakat tersebut dan pembunuhan serta kebebasan dalam berinteraksi, berkomunikasi dan dengan kelompok masyarakat di mana suatu perubahan sosial tanpa mengakibatkan ketidakteraturan.³⁴

E. EKSISTENSI PENDIDIKAN

Menurut Tilaar, pendidikan saat ini telah direduksikan sebagai pembentukan intelektual semata sehingga menyebabkan terjadinya kedangkalan budaya dan hilangnya identitas lokal dan nasional. Perubahan global dan liberalisasi pendidikan memaksa lembaga-lembaga pendidikan menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Pendidikan yang hanya berorientasi pasar sesungguhnya telah kehilangan akar pada kesejatan dan identitas diri. Gejala-gejala pendangkalan ini sekarang

³² Abdullah Idi, *op.cit.*, h. 222.

³³ Abdullah Idi, *op.cit.*, h. 223.

³⁴ Abdullah Idi, *op.cit.*, h. 223.

mudah dibaca. Pendidikan mempunyai fungsi untuk mengadakan perubahan sosial mempunyai fungsi:

1. Melakukan reproduksi budaya,
2. Difusi budaya
3. Mengembangkan analisis kultural terhadap kelembagaan-kelembagaan tradisional
4. Melakukan perubahan-perubahan atau modifikasi tingkat ekonomi sosial tradisional dan
5. Melakukan perubahan-perubahan yang lebih mendasar terhadap institusi-institusi tradisional yang telah ketinggalan.³⁵

³⁵ Tila'ar. 2012. *Perubahan Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, h. 65.

BAB XIII

PENDIDIKAN SEBAGAI KAPITAL

A. PENDIDIKAN SEBAGAI KAPITAL MANUSIA

1. Pengertian Modal Manusia

Modal manusia secara individual yaitu keahlian dan kecakapan yang kita peroleh. Para ahli ekonomi menegaskan bahwa investasi dalam pendidikan dan pelatihan adalah sama besarnya dengan investasi dalam barang-barang modal. Kaum fungsionalis menyimpulkan apabila suatu kelompok menderita ketidaksamarataan di sektor ekonomi, pemecahannya adalah meningkatkan modal manusia anggota-anggota kelompok itu melalui peningkatan pencapaian pendidikan.¹

Pembahasan modal manusia lazim dikaitkan dengan usaha mengelola, meningkatkan dan mendayagunakan kepandaian, keterampilan, tingkat dan keragaman pendidikan serta pengalaman sebagai sumber daya manusia yang diinvestasikan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dan manfaat sosial melalui kegiatan produktif. Kepandaian, keterampilan, tingkat dan keragaman pendidikan serta pengalaman hanya cukup disebut sebagai potensi apabila tidak diinvestasikan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dan manfaat sosial. Kekuatan modal sosial terletak pada keberhasilan mengembangkan sistem yang mampu mendayagunakan kepandaian, keterampilan, tingkat dan keragaman pendidikan serta pengalaman tersebut untuk kegiatan produktif.²

¹ Jane C. Ollenburger dan Helen A. Moore. 1996. *Sosiologi Wanita*. Jakarta: Rineka Cipta, h. 140.

² Sunyoto Usman. 2018. *2 Modal Sosial*. Jakarta: Ikapi, h. 4.

Sumber daya manusia (*human capital*) menempati kedudukan dan peran yang sangat penting dalam pembangunan. Tidak saja sebagai pengelola dan pelaku pembangunan, tetapi pembangunan itu sendiri harus mampu memberikan manfaat dan perbaikan kehidupan dan kesejahteraan manusia. Itulah sebabnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi yang jauh lebih penting dari itu adalah perbaikan mutu hidup yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*), sebagaimana yang dikenalkan oleh *Mahbul-ul Haq* yang kemudian dikembangkan oleh Amartya Sen sebagai penerima hadiah Nobel ilmu ekonomi pada tahun 1998.

Sumber daya manusia adalah seperangkat kecakapan, pengetahuan, sifat sosial dan kepribadian termasuk kreativitas yang terkandung dalam diri manusia yang dapat diupayakan untuk melaksanakan kegiatan yang telah menghasilkan atau memberikan manfaat ekonomi.

Damsar (2012: 178), konsep modal manusia diperkenalkan oleh Theodore W. Schultz lewat pidato yang berjudul "*Investment in human capital*" di hadapan para ekonom Amerika pada 1960, kemudian dipublikasikan melalui jurnal *American Economic Review* pada Maret 1961.

Sebelumnya para ekonom hanya mengenal modal fisik berupa alat-alat, mesin dan peralatan produktif lainnya yang ditengarai memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Gagasan tentang modal manusia memperoleh sambutan yang luas di kalangan para ekonom seperti Bowman, Denison, dan Becker. Selain itu gagasan tentang modal manusia juga berkembang ke dalam sosiologi seperti yang dilakukan oleh Parsons, Coleman, Blau, dan Duncan.

Dari keempat rumusan modal manusia tersebut tidak tampak perbedaan yang mencolok di antara satu sama lain. Ketiga rumusan ini seperti yang dikatakan oleh James S. Coleman menunjukkan bahwa sebagaimana modal fisik yang diciptakan dengan mengubah materi untuk membentuk alat yang memudahkan produksi, modal manusia diciptakan dengan mengubah manusia dan memberikan mereka keterampilan dan kemampuan yang memungkinkan mereka bertindak dengan cara-cara baru.

Modal fisik berwujud, ia diwujudkan dalam bentuk materi yang jelas. Adapun modal manusia tidak berwujud, melainkan diajarkan dalam keterampilan dan pengetahuan yang dipelajari oleh individu. Model fisik memudahkan aktivitas produktif demikian juga dengan modal manusia.

Pembahasan tentang modal manusia lain dikaitkan dengan usaha mengelola, meningkatkan dan mendayagunakan keterampilan, kepandaian, tingkatan keragaman pendidikan serta pengalaman sebagai sumber daya manusia yang diinvestasikan untuk memperoleh keuntungan atau manfaat sosial melalui kegiatan produktif.

Kepandaian, keterampilan, tingkat pendidikan, pengetahuan dan pengalaman tersebut diposisikan sebagai sumber daya yang bergerak mengikuti tindakan untuk memperoleh keuntungan ekonomi atau manfaat sosial. Pergerakan tersebut berjalan mengikuti sebuah sistem yang mempertimbangkan kebutuhan tenaga kerja, modal usaha, proses produksi dan pemasaran.

Modal manusia bukan kepandaian, keterampilan, pendidikan dan pengalaman, tetapi kepandaian, keterampilan, pendidikan dan pengalaman yang diinvestasikan untuk memperoleh keuntungan ekonomi atau manfaat sosial. Maksudnya kepandaian, keterampilan, pendidikan dan pengalaman hanya cukup disebut sebagai potensi manakala tidak diinvestasikan untuk memperoleh keuntungan ekonomi atau manfaat sosial.

Kekuatan modal manusia terletak pada keberhasilan mengembangkan sistem yang mampu mendayagunakan kepandaian, keterampilan, pendidikan, pengetahuan dan pengalaman tersebut untuk kegiatan produktif.

Konsep modal manusia dapat ditelusuri dari tulisan-tulisan Jane Jacobs, Pierre Bourdieu, James Arthur. Coleman dan Robert D. Purnama. Diskusi panjang tentang konsep ini semakin menjadi perhatian sejak perdebatan tentang karya Purnama yang berjudul "*Making Democracy Work*", dan berlanjut dengan judul debat tentang *Bowling Alone*.

2. Pendidikan sebagai Modal Manusia

Dari pengertian konsep dan teori kapital manusia yang berkembang terlihat bahwa pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan atribut serupa lainnya yang diperoleh seseorang yang diperlukan untuk melakukan suatu kegiatan dalam kehidupannya dapat diperoleh melalui berbagai pendidikan yaitu pendidikan formal seperti sekolah, pendidikan nonformal seperti pelatihan di tempat kursus, maupun pendidikan informal seperti

belajar *life skill* di surau. Kesemua pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan atribut serupa lainnya ini dipandang sebagai kapital manusia.

Pengakuan kepemilikan kapital manusia berupa pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan atribut serupa lainnya diwujudkan dalam cara yang berbeda. Pengakuan terhadap kapital manusia yang diperoleh melalui pendidikan formal diwujudkan dalam bentuk ijazah pendidikan. Ketika seseorang melamar suatu pekerjaan tertentu, maka ijazah pendidikan formal yang dimiliki diterima sebagai salah satu persyaratan atau kualifikasi untuk pekerjaan ini. Bisa saja pengakuan yang diberikan terhadap suatu ijazah dikaitkan dengan apakah lembaga dimana ijazah tersebut dikeluarkan terakreditasi sesuai dengan lembaga akreditasi yang berhak untuk melaksanakannya.

Adapun pengakuan terhadap kapital manusia yang didapatkan melalui pendidikan nonformal ditunjukkan oleh penerimaan terhadap sertifikat yang dimiliki. Sertifikat yang dimiliki dapat saja dipertanyakan oleh pemberi kerja, namun keraguan terhadap suatu sertifikat dapat sirna ketika pengetahuan, keterampilan, kemampuan atau atribut serupa lainnya yang diperlukan oleh masyarakat seperti kemampuan memijat atau melakukan pengobatan alternatif misalnya ketika mereka langsung merasakannya.³

B. PENDIDIKAN SEBAGAI KAPITAL SOSIAL

1. Pengertian Kapital Sosial

Menurut Pierre Bourdieu, kapital sosial adalah kewajiban-kewajiban sosial dan jaringan yang dapat dikonversikan menjadi kapital ekonomi.⁴ Modal manusia lazim dikaitkan dengan upaya mengelola, meningkatkan dan mendayagunakan relasi-relasi sosial sebagai sumber daya yang diinvestasikan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dan manfaat sosial. Relasi-relasi sosial tersebut diendapi oleh norma-norma yang memberikan jaminan, nilai-nilai yang menghargai perkembangan atau *trust*, serta melembagakan hubungan yang saling menguntungkan atau *reciprocal*

³ Damsar, *op.cit.*, h. 181-182.

⁴ H. A. R. Tilaar. 2009. *Kekuasaan dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*. Jakarta: Rineka Cipta, h. 54.

relationship. Modal sosial dapat diketahui keberadaannya dan diidentifikasi gejalanya apabila orang menjalin relasi-relasi sosial.⁵ Menurut Pierre Bourdieu, kapital sosial adalah kewajiban-kewajiban sosial dan jaringan yang dapat dikonversikan menjadi kapital ekonomi.⁶

Putnam menjelaskan bahwa modal sosial terkait dengan organisasi sosial, ikatan atau hubungan sosial, norma dan kepercayaan yang memfasilitasi koordinasi dan kerja sama untuk keuntungan bersama. Keterlibatan individu dalam asosiasi sukarela mengajarkan kepercayaan, resiprositas, solidaritas dan kerjasama.⁷

Usman (2018: 79-80), modal sosial ditandai relasi-relasi sosial yang melembagakan *trust*, *reciprocity relationship* dan *networking*. Modal sosial baru dapat diidentifikasi setelah orang menjalin hubungan sosial. Atribut, kekayaan dan peran modal sosial diketahui melalui relasi-relasi sosial.

Sedangkan modal manusia melekat dalam diri orang misalnya tingkat pendidikan, keterampilan dan kemampuan mengidentifikasi masalah dan strategi memecahkan masalah tersebut. Atribut, kekayaan dan peran modal dapat diidentifikasi tanpa melalui relasi relasi sosial. Pembahasan tentang peran modal sosial dalam meningkatkan prestasi akademik menunjukkan bahwa modal sosial memiliki peran penting dalam menciptakan atau mengembangkan modal sosial.

Keterampilan atau kemampuan semacam itu dapat dikembangkan melalui akumulasi informasi dari modal sosial. Modal sosial melembagakan relasi relasi sosial yang memberi ruang atau *channel* akan memperoleh informasi yang terkait dengan berbagai macam pengetahuan. Semakin luas relasi sosial aktor semakin banyak informasi yang diperoleh dan pada gilirannya semakin luas pula pengetahuan yang dimiliki.

Bukankah informasi dapat diperoleh melalui media cetak, media elektronik dan akhir-akhir ini melalui media sosial? Sudah barang tentu benar adanya. Namun, memperoleh informasi yang tersalur melalui

⁵ Sunyoto Usman. 2018. *Modal Sosial*. Jakarta: Ikapi, h. -5.

⁶ H. A. R. Tilaar. 2009. *Kekuasaan dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*. Jakarta: Rineka Cipta, h. 54.

⁷ Trubus Rahardiansyah. 2011. *Transformasi Nilai Kearifan Lokal dalam Pendidikan Bangsa: Diaklektika Pentingnya Pendidikan Berbasis Local Genius*. Jakarta: Universitas Trisakti, h.103-104.

relasi relasi sosial dalam kalkulasi ekonomi adalah lebih murah daripada melalui media-media tersebut. Relasi-relasi sosial membuka peluang diskusi sehingga lebih mudah dikonfirmasi dan pengetahuan yang diperoleh aktor relatif lebih cepat.

2. Pendidikan sebagai Kapital Sosial

Mengikuti pendidikan formal dan informal, seseorang dapat memperoleh segala sumber daya sosial seperti jaringan, kepercayaan, nilai, dan norma. Terutama dalam pendidikan formal, ketika seseorang menyelesaikan studi di suatu tingkatan pendidikan SD sampai perguruan tinggi, segera dia memperoleh predikat sebagai alumni dari suatu lembaga pendidikan formal di mana dia belajar. Sumber daya sosial sebagai alumni dari suatu lembaga pendidikan formal, bila mampu mengolahnya menjadi suatu jaringan sosial sesama alumni, maka ia akan menjadi kapital sosial.

Dalam realitas kehidupan sehari-hari, betapa fungsionalnya jaringan alumni sebagai sumber daya sosial seseorang dalam menumbuhkembangkan kapital sosial. Perguruan tinggi ternama seperti Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, dan Institut Pertanian Bogor mampu secara efektif membuat jaringan alumni sebagai kapital sosial bagi para anggotanya. Perguruan tinggi ini ditengarai menguasai kementerian tertentu yang diperlihatkan dari dominasi alumni mereka pada jabatan strategis tertentu dan jumlah alumni mereka yang bekerja pada kementerian tersebut. Alumni UGM, misalnya, menguasai Kementerian Dalam Negeri. Adapun alumni UI mendominasi Kementerian Keuangan.

Kapital sosial yang diolah dari sumber daya jaringan alumni akan bertambah kuat bila orang tersebut mampu pula menciptakan suatu derajat kepercayaan antara dia dan para alumni lainnya. Selain itu, ketika dia masih sebagai mahasiswa, dia juga memperoleh nilai dan norma tertentu, biasanya nilai dan norma tentang kerja keras, jujur, santun dan lainnya yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Bila kesemua sumber daya sosial tersebut mampu diolah oleh sang alumni ini dengan baik, maka kapital sosial yang dimiliki akan semakin kuat. Sumber daya sosial yang diperoleh dari lembaga pendidikan informal tampaknya kurang banyak didapatkan dibandingkan seseorang dari pendidikan formal.

Meskipun demikian, sumber daya sosial yang diperoleh pada pendidikan informal dapat diolah menjadi kapital sosial.⁸

C. PENDIDIKAN SEBAGAI KAPITAL BUDAYA

1. Pengertian Kapital Budaya

Kapital budaya merupakan cita rasa yang diperoleh, nilai-nilai, bahasa dan dialek, kualifikasi pendidikan yang menentukan kedudukan seseorang di dalam kelas sosial dan budaya. Kapital budaya biasanya diperoleh tidak melalui pendidikan formal, tetapi dipelajari secara tidak disadari. Dalam istilah Bourdieu, kapital budaya merupakan bentuk-bentuk yang tersembunyi yang diturunkan pada generasi berikutnya.⁹

2. Pendidikan sebagai Kapital Budaya

Pendidikan memberikan seseorang modal pengetahuan dan kompetensi yang dibutuhkan untuk membuat pembedaan dan penaksiran nilai. Nilai sopan santun, malu, kerja keras, kejujuran, kepercayaan dan lainnya dibentuk, diperkuat dan dipertahankan melalui pendidikan formal. Hal itu tampak bagaimana nilai dan norma yang disosialisasikan oleh guru pada pendidikan dasar, terutama pada taman kanak-kanak dan sekolah dasar mampu menjadi rujukan berpikir, bersikap dan berperilaku peserta didik. Nilai dan norma ini biasanya berasal dari kelas menengah atas menjadi *mainstream* dalam kehidupan bermasyarakat.

Contoh: memakai sarung tangan dipandang tidak pantas, tidak sopan dan tidak elok untuk dipakai ke tempat kerja? Pendidikanlah yang membuat kita berpikir, bersikap, bertindak dan berperilaku seperti itu. Pendidikan membentuk kompetensi dan pengetahuan kultural seseorang. Kompetensi dan pengetahuan kultural tersebut memberikan seseorang preferensi dalam berpikir, bersikap, bertindak dan berperilaku dalam bahasa, nilai, asumsi-asumsi dan model tentang keberhasilan dan kegagalan, cantik dan jelek, indah dan buruk, sehat dan sakit, sopan dan tidak sopan.¹⁰

⁸ Damsar, *op.cit.*, h. 1g5-1g6.

⁹ H.A.R. Tilaar, *op.cit.*, h. 54.

¹⁰ Damsar, *op.cit.*, h. 201-202.

D. PENDIDIKAN SEBAGAI KAPITAL SIMBOLIK

1. Pengertian Kapital Simbolik

Mahar, dkk memahami *prestise*, status dan otoritas sebagai kapital simbolik. Jenkins, Ritzer dan Goodman menjelaskan bahwa kapital simbolik terwujud dalam *prestise*, status, otoritas dan kehormatan atau gengsi sosial. Dari berbagai pemahaman di atas maka dapat disimpulkan bahwa kapital simbuli merupakan kapital yang terwujud dalam *prestise*, status, otoritas, dan kehormatan atau gengsi sosial yang berasal dari keterampilan mengatur simbol sosial.¹¹

Kaitan kapital simbolik dengan kapital lainnya. Turner misalnya melihat kapital simbolik sebagai penggunaan simbol-simbol untuk melegitimasi pemilikan berbagai tingkat dan konfigurasi ketiga bentuk kapital lainnya: ekonomi, sosial dan budaya. Adapun Lee menoba melukiskan hubungan antara kapital simbolik dan kapital lainnya melalui proposisi berikut: semakin besar kepemilikan dan investasi modal pendidikan dan kultural, semakin artikulatif dan khas bentuk konsumsi kultural yang dilakukan, dan dengan demikian, semakin besar pula hasil modal simbolis yang dapat diperoleh.¹²

Contoh kapital simbolik: Katakanlah seseorang yang baru saja mendapatkan undian 500 Milyar akan masuk ke dalam golongan ekonomi atas. Namun, orang ini belum tentu memiliki kapital budaya dan simbolik yang tinggi. Berbeda dengan seseorang yang berasal dari keluarga kaya, melalui sosialisasi dengan reproduksi sosial, memperoleh jenis pendidikan, gaya, rasa, dan selera tertentu tentang sesuatu: makanan, pakaian, perabotan rumah, musik, drama, sastra, lukisan, film, fotografi, dan preferensi etis lainnya, pada gilirannya memberi dampak terhadap perbedaan orang dalam *prestise*, status, otoritas, dan kehormatan atau gengsi sosial. Dengan kata lain, keterampilan mengatur simbol sosial tidak serta merta atau segera setelah diperoleh seseorang ketika dia mendapatkan kapital ekonomi tinggi, karena keterampilan ini diperoleh melalui proses yang panjang melalui pendidikan atau reproduksi sosial lainnya.¹³

¹¹ Damsar, op.cit., h. 202-203.

¹² Damsar, op.cit., h. 203.

¹³ Damsar, op.cit., h. 203

2. Pendidikan sebagai Kapital Simbolik

Pendidikan sebagai kapital simbolik. Kemampuan mengatur simbol seseorang berbeda menurut prestise, status, otoritas, dan kehormatan atau gengsi sosial. Kemampuan mengatur simbol ini tidak diperoleh sejak lahir tetapi didapat melalui pendidikan formal dan nonformal, serta reproduksi sosial lainnya seperti pendidikan informal dalam keluarga. Keluarga kelas menengah atas diuntungkan dengan reproduksi sosial dalam keluarga sehingga kemampuan mengatur simbolnya lebih tajam dan kuat dibandingkan dengan kelas bawah.

Kompetisi dalam meraih prestise, status, otoritas dan kehormatan atau gengsi sosial, oleh karena itu, menguntungkan kelas menengah atas. Sebab pendidikan yang dimasuki oleh anggota kelas bawah ternyata habitus dari kelas menengah atas. Sehingga kompetisi antara anggota kelas menengah atas dan bawah berjalan tidak seimbang. Sehingga kapital simbolik yang ada melanggengkan stratifikasi sosial yang ada.¹⁴

¹⁴ Damsar, *op.cit.*, h. 203-204.

BAB VIX

PENDIDIKAN MULTIKULTURAL

A. PENDIDIKAN MULTIKULTURAL

Menurut Parekh, multikulturalisme meliputi tiga hal yaitu:

1. Berkenaan dengan budaya.
2. Merujuk pada keragaman yang ada.
3. Berkenaan dengan tindakan spesifik pada respon terhadap keragaman tersebut

Akhiran **isme** menandakan suatu doktrin normatif yang diharapkan bekerja pada setiap orang dalam konteks masyarakat dengan beragam budaya. Proses dan cara multikulturalisme sebagai doktrin normatif menjadi ada dan implementasi gagasan-gagasan multikultural yang telah dilakukan melalui kebijakan-kebijakan politik, dalam hal ini kebijakan pendidikan.¹

Multikulturalisme adalah sebuah filosofi yang kadang-kadang ditafsirkan sebagai ideologi yang menghendaki adanya persatuan dari berbagai kelompok kebudayaan dengan hak dan status sosial politik yang sama dalam masyarakat modern. Istilah multikulturalisme yang juga sering digunakan untuk menggambarkan kesatuan berbagai *etnis* masyarakat yang berbeda dalam suatu negara. **Secara etimologis multikulturalisme** terdiri atas kata *multi* yang berarti *plural*, *kultural* yang berarti *kebudayaan*,

¹ Yana Suryana dan Rusdiana. 2015. *Pendidikan Multikultural: Suatu Upaya Penguatan Jati Diri Bangsa Konsep, Prinsip dan Implementasi*. Bandung: Pustaka Setia, h. 226.

dan *isme* yang berarti *aliran* atau *kepercayaan*. Jadi multikulturalisme secara sederhana adalah paham atau aliran tentang budaya yang plural.

Dalam pengertian yang lebih mendalam istilah multikulturalisme bukan hanya pengakuan terhadap budaya yang beragam melainkan juga pengakuan yang memiliki implikasi-implikasi politik, sosial, ekonomi, dan lainnya.

B. PENGERTIAN PENDIDIKAN MULTIKULTURAL

Berikut pengertian pendidikan multikultural menurut beberapa ahli:

1. Menurut Anderson dan Cusher bahwa pendidikan multikultural dapat diartikan sebagai pendidikan mengenai keragaman kebudayaan.
2. Menurut James Bank, pendidikan multikultural ingin mengeksplorasi perbedaan sebagai keniscayaan, kemudian bagaimana kita menyikapi hal tersebut dengan penuh toleran dan semangat egaliter.
3. Menurut Muhaemin El Ma'hady berpendapat bahwa secara sederhana pendidikan multikultural dapat didefinisikan sebagai pendidikan tentang keragaman kebudayaan dalam merespon perubahan demografis dan kultural lingkungan masyarakat tertentu atau bahkan dunia secara keseluruhan.
4. Hilda Hernandez, mengartikan pendidikan multikultural sebagai perspektif yang mengakui realitas politik, sosial dan ekonomi yang dialami oleh masing-masing individu dalam pertemuan manusia yang kompleks dan beragam secara kultural, dan merefleksikan pentingnya budaya, ras, seksualitas dan gender, entitas, agama, status sosial, ekonomi dan pengecualian-kecualian dalam proses pendidikan. Ruang pendidikan sebagai media transformasi ilmu pengetahuan hendaknya mampu memberikan nilai-nilai multikulturalisme dengan cara saling menghargai dan menghormati atas realitas yang beragam, baik latar belakang maupun basis sosial budaya yang melingkupinya.
5. James Bank, menjelaskan bahwa pendidikan multikultural memiliki beberapa dimensi yang saling berkaitan satu dengan yang lain yaitu:

- a. *Content integration* yaitu mengintegrasikan berbagai budaya dan kelompok untuk mengilustrasikan konsep mendasar, generalisasi dan teori dalam mata pelajaran atau disiplin ilmu.
 - b. *The knowledge construction process* yaitu membawa siswa untuk memahami implikasi budaya ke dalam sebuah mata pelajaran.
 - c. *En equity paedagogy*, menyesuaikan metode pengajaran dengan cara belajar siswa dalam rangka menghasilkan prestasi akademik siswa yang beragam baik dari segi ras, budaya ataupun sosial.
 - d. *Prejudice reduction*, yaitu mengidentifikasi karakteristik siswa dan menentukan metode pengajaran mereka. Kemudian melatih kelompok untuk berpartisipasi dalam kegiatan olahraga, berinteraksi dengan seluruh staf dan siswa yang berbeda etnis dan ras dalam upaya menciptakan budaya akademik yang toleran dan inklusif.²
6. Sleeter dan Grant, dan Smith mendefinisikan pendidikan multikultural sebagai suatu pendekatan progresif untuk melakukan transformasi pendidikan yang secara holistik memberikan kritik dan menunjukkan kelemahan-kelemahan, kegagalan-kegagalan dan diskriminasi yang terjadi di dunia pendidikan saat ini.
 7. Nieto memahami pendidikan multikultural sebagai suatu bentuk pendidikan yang bertumpu pada keadilan sosial, kesetaraan pendidikan dan suatu dedikasi guna memberikan pengalaman pembelajaran dimana seluruh siswa dapat mencapai perkembangan secara optimal.
 8. Ladson-Billings melihat pendidikan multikultural sebagai bentuk pendidikan yang dapat dijadikan pondasi guna melakukan transformasi masyarakat dan menghilangkan penindasan dan ketidakadilan.³
 9. Azra menjelaskan pendidikan multikultural sebagai pengganti dari pendidikan interkultural diharapkan dapat menumbuhkan sikap peduli dan mau mengerti atau adanya politik pengakuan terhadap kebudayaan kelompok manusia seperti toleransi, perbedaan *ethnocultural*

² Chairul Mahfud. 2006. *Pendidikan Multikultural*. Yogyakarta: Pustaka Penerbit, h. 175-178.

³ Zamroni. 2013. *Pendidikan Demokrasi pada Masyarakat Multikultural*. Yogyakarta: IKAPI, h. 124.

dan agama, diskriminasi, HAM, demokrasi dan pluralitas, kemanusiaan universal serta subjek-subjek lain yang relevan.

10. Howard berpendapat bahwa pendidikan multikultural memberikan kompetensi multikultural. Pada masa awal kehidupan siswa, waktu banyak dilalui daerah etnis dan budayanya masing-masing. Kesalahan dalam mentransformasi nilai, aspirasi, etiket dari budaya tertentu sering berdampak pada primordialisme kesukuan, agama dan golongan yang berlebihan. Faktor ini penyebab timbulnya permusuhan antar etnis dan golongan. Melalui pendidikan multikultural sejak dini anak diharapkan mampu menerima dan memahami perbedaan budaya yang berdampak pada perbedaan *usage* (cara individu bertingkah laku), *folkways* (kebiasaan yang ada di masyarakat), *mores* (tata kelakuan di masyarakat), dan *customs* (adat istiadat suatu komunitas). Dengan pendidikan multikultural peserta didik mampu menerima perbedaan, kritik dan memiliki rasa empati serta toleransi pada sesama tanpa memandang golongan, status, gender dan kemampuan akademis.
11. Hal Senada juga ditekankan oleh Musa Asy'arie bahwa pendidikan multikultural bermakna sebagai proses pendidikan cara hidup menghormati, tulus, toleransi terhadap keragaman budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat plural sehingga peserta didik kelak memiliki kekenyalan dan kelenturan mental bangsa dalam menyikapi konflik sosial di masyarakat.⁴

C. TUJUAN PENDIDIKAN MULTIKULTURAL

Tujuan utama pendidikan multikultural adalah mengubah pendekatan pelajaran dan pembelajaran ke arah memberikan peluang yang sama pada setiap anak. Jadi tidak ada yang dikorbankan demi persatuan. Untuk itu, kelompok-kelompok harus damai dan saling memahami mengakhiri perbedaan tetapi tetap menekankan pada tujuan umum untuk mencapai persatuan. Siswa ditanamkan pemikiran lateral, keanekaragaman dan keunikan itu dihargai. Hal ini berarti harus ada perubahan sikap, perilaku dan nilai-nilai khususnya civitas akademika sekolah. Ketika siswa berada di antara sesamanya yang berlatar belakang berbeda, mereka harus

⁴ Yana Suryana dan Rusdiana, *op.cit.*, h. 197.

belajar satu sama lain berinteraksi dan berkomunikasi sehingga dapat menerima perbedaan di antara mereka sebagai sesuatu yang memperkaya mereka.

Menurut Nieto, bahwa pendidikan multikulturalisme bertujuan untuk sebuah pendidikan yang bersifat anti rasis yang memperhatikan keterampilan-keterampilan dan pengetahuan dasar bagi warga dunia.⁵ Harapannya, dengan implementasi pendidikan yang berwawasan multikulturalisme dapat membantu siswa mengerti, menerima, menghargai orang lain yang berbeda suku, budaya, dan nilai kepribadian. Lewat penanaman semangat multikulturalisme di sekolah-sekolah akan menjadi media pelatihan dan penyadaran bagi generasi muda untuk menerima perbedaan budaya, ras, etnis, dan kebutuhan di antara sesama dan makhluk hidup bersama secara damai.⁶ Adapun secara luas pendidikan multikultural mencakup seluruh siswa tanpa membedakan kelompok-kelompok yang seperti gender, etnis, ras, budaya, strata sosial dan agama.⁷

D. PRINSIP DASAR PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN MULTIKULTURAL

Garis besar pokok pengembangan model pembelajaran multikultural disandarkan pada beberapa prinsip yaitu sebagai berikut:

1. Pengenalan jati diri

Pendidikan multikultural seyogianya dimulai dari diri sendiri. Prinsip ini menekankan bahwa pendidikan multikultural harus dimulai dari pengenalan terhadap jati diri sendiri bukan jati diri etnik lain. Keterlibatan seseorang dalam pendidikan multikultural akan terjadi apabila ada relevansi dengan kehidupannya. Relevansi masalah orang lain terhadap kehidupannya akan membuat seseorang berminat untuk terlibat dalam pendidikan multikultural.

2. Mengembangkan sikap non etnosentris

Pendidikan multikultural hendaknya dikembangkan agar pembelajar

⁵ Rudy Gunawan. 2013. *Pendidikan IPS: Filosofi, Konsep dan Aplikasi*. Bandung: ALFABETA, h. 123.

⁶ Rudy Gunawan, *op.cit.*, h. 124.

⁷ Yana Suryana, *op.cit.*, h. 199-200.

tidak mengembangkan sikap etnosentris. dengan mengembangkan sikap non etnosentris, kebencian dan konflik antar etnik akan dapat dihindarkan secara maksimal. Hal itu berarti bahwa pendidikan multikultural bertujuan untuk meningkatkan kesadaran desentris etnik.

Kesadaran etnosentris digunakan sebagai jembatan untuk memahami budaya lain dengan menunjukkan paralelisme antara ciri etniknya sendiri dan etnik lainnya. Dengan cara demikian akan dapat dikembangkan sebuah pemahaman mutualistis dan empati antar beragam etnik dalam sebuah masyarakat.

3. Pengembangan secara integratif komprehensif dan konseptual
Pendidikan multikultural seharusnya dikembangkan secara integratif komprehensif dan konseptual. Pendekatan demikian mengisyaratkan agar kurikulum pendidikan multikultural menginkooperasi sebuah kurikulum yang bersifat lokal. Oleh karena itu, kurikulum pendidikan multikultural terintegrasi ke dalam sebuah mata pelajaran seperti bahasa, ilmu pengetahuan sosial, matematika, sains, pendidikan jasmani, kesenian atau pendidikan moral.
4. Menghasilkan sebuah perubahan
Pendidikan multikultural harus menghasilkan sebuah perubahan tidak hanya pada materi kurikulum tetapi juga pada praktik pembelajaran dan struktur sosial dari sebuah kelas. Banyak guru yang berkonsentrasi pada penyelesaian bahan ajar yang terdapat dalam kurikulum sehingga kehilangan peluang untuk menciptakan suasana pembelajaran kreatif dan spontan seperti yang diminati oleh siswa. Untuk mencapai suasana pembelajaran demikian pembelajaran harus berorientasi pada proses misalnya bermain peran, simulasi permainan, gaya mengajar non direktif, diskusi kelompok kecil, pembelajaran kooperatif dan sebagainya. Pendekatan pembelajaran konstruktivisme sangat sesuai dengan model pembelajaran multikultural.
5. Menekankan aspek afektif dan kognitif
Pendidikan multikultural lebih menekankan aspek afektif dan kognitif dengan cara mengaitkan isu atau masalah keseharian yang dihadapi oleh siswa di lingkungan sempit ataupun luasnya. Kita sering menemukan perasaan dan emosi siswa ditekan secara sistematis karena diperkirakan akan mengganggu pembelajaran. Perasaan dan emosi dapat dikem-

bangkan sebagai stimulan yang kuat bagi berkembangnya situasi pembelajaran kreatif, spontan dan inovatif. Model pembelajaran yang bermakna diperkirakan atau dapat meningkatkan perasaan dan emosi siswa secara positif terhadap pembelajaran.

6. Kontekstual

Pendidikan multikultural harus mencakup realitas sosial dan kesejarahan dari etnik-etnik dan bangsa Indonesia. Kontekstualisasi pendidikan multikultural harus bersifat lokal, nasional dan global. Kontekstualisasi demikian bertujuan untuk menumbuhkan rasa hormat menghormati sesama etnik dan warga negara Indonesia. Tidak cukup hanya memperkenalkan kepada siswa tentang jenis-jenis makanan khas etnik, rumah adat etnik atau upacara adat etnik karena hal itu hanya bersifat permukaan.⁸

E. PERAN GURU DALAM PENDIDIKAN MULTIKULTURAL

1. Membangun Paradigma Keberagaman

Guru merupakan faktor penting dalam mengimplementasikan nilai-nilai keberagaman yang impresif dan moderat di persekolahan. Hal ini disebabkan guru yang memiliki paradigma pemahaman keberagaman yang moderat akan mampu mengajarkan dan mengimplementasikan nilai-nilai keberagaman kepada peserta didik di sekolah. Peran guru dalam hal ini yaitu sebagai berikut:

- a. Guru harus mampu bersikap demokratis. Artinya dalam segala tingkah lakunya baik sikap maupun perkataannya tidak diskriminatif (bersikap tidak adil atau menyinggung) peserta didik yang menganut agama yang berbeda dengannya.
- b. Guru seharusnya memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kejadian-kejadian tertentu yang berhubungan dengan agama.

Selain guru, peran sekolah juga sangat penting dalam membangun lingkungan pendidikan yang keluar *alis* dan toleran terhadap semua pemeluk agama. Oleh sebab itu sekolah sebaiknya memperhatikan hal-hal berikut:

⁸ Yana Suryana dan Rusdiana, *op.cit.*, h. 247-250.

- a. Sebaiknya sekolah membuat dan menerapkan peraturan lokal yaitu peraturan sekolah yang diterapkan secara khusus di sekolah tertentu. Dengan ditetapkannya peraturan ini diharapkan semua unsur yang ada seperti guru, kepala sekolah, pegawai administrasi dan peserta didik dapat belajar untuk selalu menghargai orang lain yang berbeda agama di lingkungan mereka.
- b. Untuk membantu rasa saling pengertian beragama antar peserta didik sekolah diharapkan berperan aktif dalam menggalakkan dialog keagamaan dengan bimbingan guru-guru.
- c. Buku-buku pelajaran yang digunakan dan diterapkan di sekolah sebaiknya adalah buku-buku yang dapat membangun rencana peserta didik tentang pemahaman keberagaman yang moderat.

2. Menghargai keragaman bahasa

Guru harus memiliki sikap menghargai keragaman bahasa dan mempraktikkan nilai-nilai tersebut di sekolah sehingga dapat membangun sikap peserta didik agar mereka selalu menghargai orang lain yang memiliki bahasa, aksen dan dialek yang berbeda. Oleh karena itu, guru harus menunjukkan sikap dan tingkah laku yang selalu menghargai perbedaan bahasa yang ada. Dengan demikian, diharapkan peserta didik akan mempelajari dan mempraktikkan sikap yang sama.

3. Membangun sensitifitas gender

Dalam pendidikan multikultural, pendidikan memiliki peran yang sangat strategis untuk membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya menjunjung tinggi hak perempuan dan membangun sikap anti diskriminasi terhadap kaum perempuan. Oleh karena itu, guru dituntut untuk memiliki peran dalam membangun kesadaran peserta didik terhadap nilai-nilai kesadaran gender dan sikap anti diskriminasi terhadap kaum perempuan di sekolah dengan cara berikut:

- a. Guru harus memiliki wawasan yang cukup tentang kesetaraan gender. Kawasan ini penting karena guru merupakan figur utama yang menjadi pusat perhatian peserta didik di kelas sehingga diharapkan mampu

bersikap adil dan tidak diskriminatif terhadap peserta didik perempuan ataupun laki-laki.

- b. Guru harus mampu mempraktikkan nilai-nilai keadilan gender secara langsung di kelas atau di sekolah.
- c. Sensitif terhadap permasalahan gender di dalam ataupun di luar kelas

Sementara itu, sekolah juga memiliki peran yang sangat penting dalam menanamkan nilai-nilai tentang kesetaraan dan keadilan gender dengan cara berikut:

- a. Sekolah harus memiliki sekaligus menetapkan undang-undang sekolah anti diskriminasi gender.
- b. Sekolah harus berperan aktif untuk memberikan pelatihan gender terhadap seluruh staf termasuk guru dan peserta didik agar pemahaman nilai-nilai tentang persamaan hak dan sikap anti diskriminasi gender dapat berjalan dengan efektif.
- c. Untuk memupuk dan menggugah kesadaran peserta didik tentang kesetaraan gender dan sikap anti diskriminasi terhadap kaum perempuan, pihak sekolah dapat mengadakan seminar atau kegiatan sosial lainnya yang berkaitan dengan pengembangan kesetaraan gender.

4. Membangun sikap kepedulian sosial

Guru dan sekolah memiliki peran terhadap pengembangan sikap peserta didik untuk peduli dan kritis terhadap segala bentuk ketidakadilan sosial, ekonomi dan politik yang ada di dalam ataupun di luar lingkungan sekitarnya.

- a. Guru harus memiliki wawasan yang cukup tentang berbagai macam fenomena sosial yang ada di lingkungan para peserta didiknya, terutama yang berkaitan dengan masalah kemiskinan, pengangguran, para siswa yang tidak dapat melanjutkan sekolah, korupsi, pengusuran dan lain-lain.
- b. Guru dapat menerapkan sikap tersebut di sekolah atau di kelas dengan cara bersikap adil kepada seluruh siswa tanpa harus mengistimewakan

salah satu dari mereka meskipun latar belakang status sosial mereka berbeda.

Pihak sekolah sebaiknya membuat dan menerapkan peraturan fenomena ketidakadilan sosial, ekonomi dan politik yang ada disekitar mereka. Dengan diberlakukannya peraturan tersebut diharapkan dapat membangun sikap siswa untuk percaya diri, menghargai orang lain dan bertanggung jawab.

Kegiatan lain yang dapat dilaksanakan oleh pihak sekolah adalah menyelenggarakan acara bakti sosial atau aksi nyata lainnya secara bulanan atau tahunan. Dengan demikian, peserta didik dapat merasakan permasalahan masyarakat yang ada di sekitar atau di luar lingkungannya.

5. Membangun sikap anti diskriminasi etnis

Guru berperan sangat penting dalam menumbuhkan sensitifitas anti diskriminasi terhadap etnis lain di sekolah. Oleh sebab itu seorang guru dituntut untuk:

- a. Memiliki pemahaman dan wawasan yang cukup tentang sikap anti diskriminasi etnis sehingga dapat memberikan contoh secara langsung melalui sikap dan perilakunya yang tidak memihak atau tidak berlaku diskriminatif terhadap peserta didik yang memiliki latar belakang etnis atau ras tertentu.
- b. Memberikan perlakuan adil terhadap seluruh peserta didik yang ada. Dengan demikian diharapkan peserta didik meniru dan berlatih untuk bersikap dan bertingkah laku adil terhadap teman-temannya yang berbeda etnis.

Demikian pula pihak sekolah sebaiknya berperan aktif dalam membangun pemahaman dan kesadaran siswa tentang pentingnya sikap menghargai dan anti diskriminasi terhadap etnis lain melalui cara membuat Pusat Kajian atau forum dialog untuk menggagas hubungan yang harmonis antar etnis.

6. Membangun sikap anti diskriminasi terhadap perbedaan kemampuan

Pada aspek ini guru sebagai penggerak utama kesadaran peserta didik agar selalu menghindari sikap yang diskriminatif terhadap perbedaan kemampuan peserta didik baik di dalam maupun di luar kelas termasuk di luar sekolah. Dengan memberikan contoh secara langsung kepada peserta didik diharapkan peserta didik dapat mencontoh, menerapkan dan membangun kesadaran untuk tidak melakukan tindakan yang diskriminatif terhadap mereka yang memiliki perbedaan kemampuan sehingga dapat saling memahami, menghormati dan menghargai. Demikian pula, sekolah harus mampu menjadi institusi yang membangun sikap peserta didik yang selalu menghargai orang lain yang memiliki kemampuan berbeda dengan cara:

- a. Membuat dan menerapkan peraturan sekolah yang menekankan bahwa sekolah menerima para peserta didik yang normal dan memiliki kemampuan berbeda.
- b. Menyediakan pelayanan khusus seperti guru dengan keterampilan khusus untuk menangani peserta didik yang memiliki perbedaan kemampuan dan menyediakan fasilitas khusus seperti ruang khusus tempat duduk khusus atau fasilitas khusus lainnya.
- c. Memberikan pelatihan bagi guru dan staf tentang cara bersikap dan cara menghadapi peserta didik yang memiliki perbedaan kemampuan di sekolah tersebut.

7. Membangun sikap anti diskriminasi umur

Sekolah seharusnya menerapkan peraturan yang intinya menyatakan bahwa segala bentuk diskriminasi terhadap umur tertentu dilarang keras di sekolah dan mengajarkan kepada peserta didik untuk selalu saling memahami dan menghormati perbedaan umur yang ada di sekitar mereka. Sekolah sebaiknya tidak memberikan batasan umur tertentu bagi seseorang yang akan masuk dan belajar di sekolah tersebut apabila yang bersangkutan memiliki kemampuan dan kemauan seperti yang telah diatur dalam undang-undang sekolah atau negara.

Guru dituntut memiliki pemahaman dan wawasan yang luas tentang

pentingnya sikap yang tidak diskriminatif terhadap orang lain yang berbeda umur diharapkan dapat mempermudah guru untuk memberikan contoh dan bimbingan tentang bersikap kepada orang yang berbeda umur. Misalnya, guru harus dapat memberikan perhatian yang sama terhadap peserta didiknya tanpa harus membedakan anak yang lebih tua dan yang lebih muda.

F. PENTINGNYA PENDIDIKAN MULTIKULTURAL

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat multikultural, dimana masing-masing daerah memiliki karakteristik yang unik dan khas. Jumlah wilayah NKRI sekitar kurang lebih 13.000 pulau besar dan kecil, dan jumlah penduduk kurang lebih 200 juta jiwa, terdiri dari 300 suku yang menggunakan hampir 200 bahasa yang berbeda. Selain itu juga menganut agama dan kepercayaan yang beragam seperti Islam, Kristen, Hindu, Budha, Konghucu, serta berbagai macam kepercayaan. Zamroni menyatakan bahwa jika kemajemukan ini dapat diharmonisasi dan diberdayakan akan menjadi kekayaan, kekuatan dan aset bangsa yang maha dahsyat. Di sisi lain, ternyata keberagaman yang ada pada masyarakat Indonesia telah menimbulkan banyak terjadinya konflik antara golongan masyarakat Indonesia. Ini dibuktikan pada saat jatuhnya rezim pemerintahan orde baru, akumulasi kekecewaan berubah menjadi konflik yang nyata dalam bentuk demonstrasi, pembakaran, perkosaan dan bahkan perusakan barang barang milik etnis Cina. Kemudian contoh lain adalah adanya konflik yang terjadi di Ambon, Kalimantan, konflik agama yang terjadi di Tolikara Papua, dan lain-lain.⁹

Masyarakat dan bangsa Indonesia mengalami krisis integrasi bangsa. Keadaan tersebut merupakan hasil pengalaman kehidupan politik, sosial dan ekonomi masa lalu, khususnya pada masa orde baru. Seperti yang telah dijelaskan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa pada masa itu ditentukan oleh suatu budaya *mainstream*, yaitu budaya sentralistik dan mengabaikan kehidupan bhineka dari masyarakat dan bangsa Indonesia. Politik kebudayaan pada era tersebut cenderung membentuk suatu

⁹ Eka Susanti. 2015. *Implementasi Model Pembelajaran IPS Berbasis Multikultural*. Medan: UIN SU, h. 1.

mainstream budaya yang menguntungkan kepentingan budaya tertentu. Budaya minoritas dilecehkan dan tidak mendapat hak hidup. Sebagai contoh misalnya hampir menghilangkan budaya suku-suku kecil lainnya selama ini. Tanpa disadari, kebudayaan Jawa dijadikan sebagai kebudayaan *mainstream*. Sehingga menimbulkan rasa dianaktirikan dari suku-suku bangsa yang lain. Di dalam hal ini, rasa ketidakpuasan bukan hanya di dalam bidang ekonomi atau pembangunan peranan fisik, tetapi juga di dalam pengertian meremehkan identitas dari keanekaragaman suku dan budayanya masing-masing.¹⁰

Indonesia adalah salah satu negeri multikultural. Kenyataan ini dapat dilihat dari keragaman sosial, kelompok etnis, budaya, agama, aspirasi politik, dan lain-lain. Keragaman ini diakui atau tidak akan dapat menimbulkan berbagai persoalan. Oleh karena itu, pendidikan multikulturalisme berperan penting dalam penyelesaian persoalan tersebut serta pembangunan di Indonesia. Hal ini didasarkan pada beberapa alasan, yaitu:

1. Bahwa secara alamiah manusia diciptakan Tuhan dalam keanekaragaman. Setiap manusia memiliki keanekaragaman kebiasaan atau kebudayaan, keanekaragaman pendapat, serta keanekaragaman sifat yang berdasarkan setiap manusia itu berbeda.
2. Banyaknya masalah yang berhubungan dengan SARA (suku, agama dan rasa). Banyaknya masalah yang berhubungan dengan SARA dikarenakan kurangnya kesadaran, konsep serta pendidikan multikulturalisme. Selain itu kebanyakan masalah SARA disebabkan oleh kurangnya kemauan untuk menerima dan menghargai perbedaan, ide, pendapat, karya, serta jerih payah orang lain. Oleh karena itu, untuk mencegah dan meminimalkan masalah tersebut perlu dikembangkan pendidikan multikulturalisme.
3. Pemahaman multikulturalisme merupakan kebutuhan bagi umat manusia terutama untuk menghadapi tantangan global pada saat ini. Indonesia perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi arus globalisasi

¹⁰ Tilaar. 2002. *Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Pedagogik Transformatif untuk pendidikan*. Jakarta: Ikapi, h. 494.

dan menyatukan bangsa agar munculnya konflik antar manusia dapat dihindari.¹¹

Hal yang menjadi perhatian adalah upaya membangun Indonesia yang multikultural hanya mungkin dapat terwujud apabila konsep serta pemahaman multikulturalisme menyebar luas dan dipahami pentingnya bagi negara Indonesia. Konsep multikulturalisme dapat dijelaskan dan dipahami melalui pendidikan multikulturalisme. Pada dasarnya pendidikan multikulturalisme dapat ditempuh melalui pendidikan formal dan non formal.¹²

Pendidikan formal di Indonesia maupun di berbagai negara lain menunjukkan keragaman tujuan yang menerapkan strategi dan sarana yang dipakai untuk mencapainya. Penambahan materi multikulturalisme dalam pendidikan formal sebenarnya sangat penting dalam pengembangan konsep yang menerangkan tentang pentingnya multikulturalisme sejak dini.

Multikulturalisme merupakan sebuah ideologi dan sebuah alat untuk meningkatkan derajat manusia dan kemanusiaannya. Untuk dapat memahami multikulturalisme diperlukan suatu landasan. Landasan tersebut adalah pendidikan. Pendidikan merupakan suatu sistem dan cara untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dalam segala aspek kehidupan. Pendidikan juga merupakan suatu usaha yang sadar yang dibutuhkan untuk manusia demi menunjang perannya di masa depan. Pada posisi ini, pendidikan multikulturalisme memegang peranan penting. Sebab pendidikan merupakan lapangan sentral dalam upaya menerjemahkan serta mensosialisasikan gagasan multikulturalisme, sehingga menjadi kenyataan pada perilaku.¹³

Menurut Sosiolog UI Parsudi Suparlan, multikulturalisme adalah konsep yang mampu menjawab tantangan perubahan zaman dengan alasan multikulturalisme membagirupakan sebuah ideologi yang mengagungkan perbedaan atau sebuah keyakinan yang mengakui dan mendorong terwujudnya pluralisme budaya sebagai kehidupan masyarakat.¹⁴

¹¹Rudy Gunawan. 2013. *Pendidikan IPS: Filosofi, Konsep dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta, h. 116-117.

¹² Rudy unawan, *op.cit.*, h. 118.

¹³ Rudy Gunawan, *op.cit.*, h.120.

¹⁴ Rudy Gunawan, *op.cit.*, h. 123.

Salah satu penyebab perlunya pendidikan multikultural ialah karena adanya globalisasi. Globalisasi melahirkan peluang, ancaman dan tantangan bagi kehidupan manusia di berbagai belahan bumi termasuk Indonesia. Salah satu aspek kehidupan yang terkena imbasnya adalah kebudayaan bangsa. Menurut Tilaar, bangsa yang tidak punya strategi untuk mengelola kebudayaan yang mendapat tantangan yang demikian dahsyatnya, dikhawatirkan akan mudah terbawa arus hingga akhirnya kehilangan jati diri lokal dan rasionalnya.

Pendidikan multikultural hendaknya dijadikan strategi dalam mengelola kebudayaan dengan menawarkan strategi transformasi budaya yang ampuh yakni melalui mekanisme pendidikan yang menghargai perbedaan budaya. Hal Senada juga dikatakan Rektor UNI, Prof. Dr. Sutjipto dan Dr. Cut Kamaril Wardani. Ia berpendapat bahwa globalisasi sebagai tantangan global perlu diimbangi dengan penguatan budaya lokal. Namun demikian, fanatisme berlebihan pada budaya lokal beresiko menimbulkan disintegrasi bangsa. Maka, *fanatisme* dan *primordialisme* selayaknya dikikis habis. Di sinilah urgensi pendidikan multikultural untuk dihadirkan dalam dunia pendidikan kita saat ini. Sebab, pendidikan merupakan instrumen paling ampuh untuk memberikan pengajaran kepada masyarakat, supaya tidak timbul konflik etnis, budaya dan agama.

Dalam buku paradigma pendidikan universal, Ali Maksun menggambarkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang masyarakatnya sangat majemuk atau pluralis. Kemajemukan bangsa Indonesia dapat dilihat dari dua perspektif yaitu:

1. Horizontal, kemajemukan bangsa kita dapat dilihat dari perbedaan agama, etnis, bahasa daerah, geografis, pakaian, makanan dan budayanya.
2. Vertikal, kemajemukan bangsa kita dapat dilihat dari perbedaan tingkat pendidikan, ekonomi, pemukiman, pekerjaan dan tingkat sosial budaya.

Kemajemukan masyarakat memberikan dampak secara positif. Namun pada sisi yang lain, ia juga menimbulkan dampak negatif karena faktor kemajemukan itulah justru terkadang sering menimbulkan konflik antar kelompok masyarakat. Pada akhirnya, konflik-konflik antar kelompok masyarakat tersebut akan melahirkan di stabilitas keamanan, sosial ekonomi dan ketidak harmonisan sosial.

Menurut Chairul Mahfud, dalam menghadapi pluralisme budaya tersebut diperlukan paradigma baru yang lebih toleran yaitu paradigma pendidikan multikultural. Pendidikan berparadigma multikulturalisme tersebut penting sebab akan mengarahkan anak didik untuk bersikap dan berpandangan toleran dan inflasi terhadap realitas masyarakat yang beragam, baik dalam hal budaya, suku, ras, etnis maupun agama. Paradigma ini dimaksudkan bahwa kita hendaknya apresiatif terhadap budaya orang lain, perbedaan dan keberagaman merupakan kekayaan dan khazanah bangsa kita. Dengan pandangan tersebut, diharapkan sikap eksklusif yang selama ini bersemayam dalam otak kita dan sikap membenarkan pandangan sendiri dengan menyalahkan pandangan dan orang lain dapat dihilangkan atau diminimalisir.

Pendidikan multikultural di sini juga dimaksudkan bahwa manusia dipandang sebagai makhluk makro dan sekaligus makhluk mikro yang tidak akan terlepas dari akar budaya bangsa dan kelompok etnisnya. Akar makro yang kuat akan menyebabkan manusia tidak pernah tercabut dari akar kemanusiaannya, sedangkan akar mikro yang kuat akan menyebabkan manusia mempunyai tempat berpijak yang kuat dan dengan demikian tidak mudah diombang-ambingkan oleh perubahan yang aman cepat yang menandai kehidupan modern dan pergaulan dunia global.¹⁵

Fenomena-fenomena yang terjadi menegaskan bahwa kita hidup dalam dunia yang sangat majemuk, tetapi sebagian dari kita memiliki toleransi dan respon yang rendah terhadap kemajemukan tersebut. Pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pluralisme nampaknya masih perlu mendapat perhatian khusus. Akibatnya, ketegangan dan bahkan konflik sosial penuh kekerasan yang kerap destruktif yang terjadi.

Terjadinya konflik yang bernuansa SARA pada beberapa daerah di Indonesia dari banyak studi salah satu penyebabnya adalah akibat dari lemahnya pemahaman dan pemaknaan tentang konsep kearifan budaya. Konflik akan muncul apabila tidak ada distribusi nilai yang adil kepada masyarakat. Terjadinya konflik etnis tersebut juga sesungguhnya merupakan salah satu dampak dari minimnya pemahaman komunitas imajiner kelompok masing-masing etnis terhadap kultur subjektif masyarakat

¹⁵Chairul Mahfud, *op.cit.*, h. 180.

adat yang berbeda-beda. Oleh karena itu etnis hidup dalam wilayah teritorial yang sama tersebut menjadi terisolasi.

Menurut Ainul Yaqin, faktor penting keterpurukan jalinan yang harmonis dalam bingkai keberagaman adalah tidak diterapkannya pendidikan berbasis multikulturalisme sejak awal. Dengan kata lain pendidikan multikultural adalah salah satu alternatif yang dilakukan untuk mengatasi masalah urgensi pendidikan berbasis multikulturalisme dan bagaimana konsep pendidikan tersebut dapat diaplikasikan dalam program pendidikan di Indonesia sebagai upaya untuk mencegah terjadinya berbagai konflik etnis, agama muncul konflik lainnya.

Merujuk kepada hal-hal tersebut di atas, maka perlu diupayakan adanya pendidikan yang berbasis multikulturalisme. Melalui pendidikan multikultural diharapkan dapat menyadarkan masyarakat terutama anak-anak yang hidup di antara berbagai macam budaya berbeda dalam satu wadah Negara Republik Indonesia. Asra mengatakan bahwa Indonesia adalah negara yang pluralis dengan keanekaragaman budaya yang sangat kompleks dan memiliki nilai-nilai kebersamaan, kekeluargaan, gotong royong dan adaptif. Jika kearifan budaya ini dapat dikemas dan ditransformasikan dengan baik melalui proses pendidikan diyakini akan memberikan pengetahuan, nilai-nilai dan ketrampilan multikultur yang memadai bagi masyarakat Indonesia dan dapat bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia sehingga bisa hidup damai dan harmonis. Apa yang dikemukakan Asra sejalan dengan undang-undang nomor 20 tahun 2003 pasal 4 menyatakan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis, tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi HAM, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa.¹⁶

Husniyatus Salamah dalam artikel pendidikan multikultural: *upaya membangun keragaman inklusif di sekolah* mengemukakan faktor mengapa pendidikan multikultural penting sebagai berikut:

1. Pendidikan multikultural secara inheren sudah ada sejak bangsa Indonesia ada. Falsafah bangsa Indonesia adalah suka gotong royong, membantu, menghargai antara suku dan lainnya.
2. Pendidikan multikultural memberikan secercah harapan dalam meng-

¹⁶ Eka Susanti, *op.cit.*, h. 1-3.

atasi berbagai gejala masyarakat yang terjadi akhir-akhir ini. Keberhasilan pendidikan dengan mengabaikan ideologi, nilai-nilai, budaya, kepercayaan dan agama yang dianut masing-masing suku dan etnis harus dibayar mahal dengan terjadinya berbagai gejala dan pertentangan antar etnis dan suku. Salah satu penyebab munculnya gejala seperti ini adalah model pendidikan yang dikembangkan selama ini lebih mengarah pada pendidikan kognitif intelektual dan keahlian motorik yang bersifat teknis semata. Padahal kedua ranah pendidikan ini lebih mengarah pada keahlian yang lepas dari ideologi dan nilai-nilai yang ada dalam tradisi masyarakat, sehingga terkesan monolitik berupa nilai-nilai demi akademis dan teknis empiris. Sementara menurut pendidikan multikultural adalah pendidikan yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai keyakinan heterogenitas pluralitas agama apapun aspeknya dalam masyarakat.

3. Pendidikan multikultural menentang pendidikan yang berorientasi bisnis. Pendidikan yang diharapkan oleh bangsa Indonesia sebenarnya bukanlah pendidikan keterampilan semata melainkan pendidikan yang harus mengakomodir semua jenis kecerdasan yang disebut kecerdasan ganda. Jika keterampilan saja yang dikembangkan maka pendidikan itu jelas berorientasi bisnis.
4. Pendidikan multikultural sebagai resistensi fanatisme yang mengarah pada jenis kekerasan dan kekerasan muncul ketika saluran perdamaian sudah tidak ada lagi.¹⁷

G. ASUMSI PENDIDIKAN MULTIKULTURAL

Timbul keragu-raguan yang muncul dalam pertanyaan apakah mungkin tujuan pendidikan multikultural dapat dicapai? Setiap program yang memiliki tujuan, memiliki pola-pola pikir, dasar atau asumsi. Asumsi pendidikan multikultural adalah sebagai berikut:

1. Semua siswa berhak mendapatkan pelayanan terbaik yang mampu disajikan tanpa memandang latar belakang siswa apapun juga.

¹⁷ Mardianto. 2018. *Pembelajaran Pendidikan Multikultural Berbasis Penelitian*. Yogyakarta: Publishing, h. 12-13.

2. Pendidikan yang menjamin kesetaraan jauh melampaui standar isi kurikulum.
3. Ketimpangan kualitas hasil tidak separah ketimpangan dalam memperoleh kesempatan. Artinya apa yang terjadi perbedaan pada pencapaian prestasi antara siswa hitam dan siswa putih tidak separah perbedaan pelayanan yang diterima kedua kelompok siswa tersebut.
4. Ketidaksetaraan secara keseluruhan terjadi di sekolah, satu upaya yang hanya bersifat tambal sulam cenderung menemui kegagalan karena yang diperlukan adalah reformasi menyeluruh tetapi dilaksanakan secara bertahap dan sistematis.¹⁸

¹⁸ Zamroni, *op.cit.*, h. 126-127.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. 2007. *Sosiologi: Skematika, Teori dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Adisusilo, Sutarjo. 2014. *Pembelajaran Nilai Karakteristik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ahmadi, Abu. 2007. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Rinea Cipta.
- Amini. 2013. *Profesi Keguruan*. Medan: Perdana Publishing.
- Anwar, Muhammad. 2018. *Menjadi Guru Profesional*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Berry, David. 1995. *Pokok-pokok Pikiran dalam Sosiologi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Chairunnisa, Connie. 2006. *Manajemen Pendidikan dalam Multiperspektif*. Jakarta: Rajawalipers.
- Damsar. 2012. *Pengantar Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Daulay, Lely Risnawaty. 2010. *Ilmu Alamiah Dasar, Ilmu Budaya Dasar, Ilmu Sosial Dasar*. Bandung: Perdana Mulya Sarana.
- Djamarah, Syaiful Bahri. 2010. *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif: Suatu Pendekatan Teoritis Psikologis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- I.B. Wirawan. 2013. *Teori-teori Sosial dalam Tiga Paradigma*. Jakarta: Prenada Media.
- Inom Nasution dan Nurabdiah Pratiwi. 2017. *Profesi Kependidikan*. Jakarta: Kencana.
- Ismawati, Esti. 2012. *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. Yogyakarta: Ombak.

- Gunawan, Rudy. 2013. *Pendidikan IPS: Filosofi, Konsep dan Aplikasi*. Bandung: ALFABETA.
- Gazalba, Sidi. 1993. *Islam dan Perubahan Sosiobudaya*. Jakarta: Alhusna.
- Handoyo, Eko. 2013. *Sosiologi Politik*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Henslin, James M. 2006. *Sosiologi: dengan Pendekatan Membumi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Idi, Abdullah. 2011. *Sosiologi Pendidikan: Individu, Masyarakat dan Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Jurdi, Syarifuddin. 2013. *Sosiologi Nusantara: Memahami Sosiologi Integralistik*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Koentjaraningrat. 2011. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mahfud, Chairul. 2006. *Pendidikan Multikultural*. Yogyakarta: Pustaka Penerbit.
- Mamud. 2012. *Sosiologi Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Mardianto. 2018. *Pembelajaran Pendidikan Multikultural Berbasis Penelitian*. Yogyakarta: Publishing.
- Musfah, Jejen. 2015. *Redesain Pendidikan Guru: Teori, Kebijakan, dan Praktik*. Jakarta: Kencana.
- Ollenburger, Jane C. dan Helen A. Moore. 1996. *Sosiologi Wanita*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Philipus dan Nurul Aini. 2009. *Sosiologi dan Politik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nata, Abuddin. 2014. *Sosiologi Pendidikan Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rahardiansyah, Trubus. 2011. *Transformasi Nilai Kearifan Lokal dalam Pendidikan Bangsa: Dialektika Pentingnya Pendidikan Berbasis Local Genius*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Ritzer, George. 2014. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana.
- Saidah. 2016. *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Person.
- Samovar, Larry A., Richard E. Porter dan Edwin R. Mc. Daniel. 2010. *Komunikasi Lintas Budaya*. Jakarta: Salemba Humanika.

- Sanderson, Stephen King. 2011. *Makrososiologi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- S.Nasution. 2015. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Setiadi, Elly M., H. Kama A. Hakim dan Ridwan Efendi. 2008. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Jakarta: Kencana.
- Shadily, Hasan. 1980. *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia*. Surabaya. Usana Offset.
- Soekanto, Soerjono. 2015. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- St. Vembriarto. 1993. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Grasindo.
- Sulaeman, Munandar. 1992. *Ilmu Budaya Dasar: Suatu Pengantar*. Bandung: Eresco.
- Sulasman dan Setia Gumilar. 2013. *Teori-teori Kebudayaan: Teori dan Aplikasi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sunarto, Kamanto. 2004. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Suryana, Yana dan Rusdiana. 2015. *Pendidikan Multikultural: Suatu Upaya Penguatan Jati Diri Bangsa Konsep, Prinsip dan Implementasi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Supardan, Dadang. 2011. *Pengantar Ilmu Sosial: Sebuah Kajian Pendekatan Struktural*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Susanto, Ahmad. 2018. *Manajemen Peningkatan Kinerja Guru*. Depok: Prenada Mediagroup.
- Tila'ar. 2012. *Perubahan Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) 2003. UU RI No. 20 TH. 2003. 2007. Jakarta: Sinar Grafika.
- Usman, Sunyoto. 2018. *2 Modal Sosial*. Jakarta: Ikapi.
- Zamroni. 2013. *Pendidikan Demokrasi pada Masyarakat Multikultural*. Yogyakarta: IKAPI.

